



Pemerintah  
Kabupaten Sidoarjo

# LAPORAN

*Kinerja Instansi Pemerintah 2022*





## **PERTANYAAN TELAH DIREVIU**

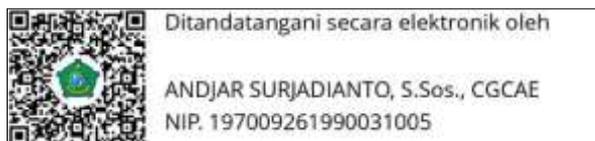
### **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 30 Maret 2023  
**INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO**



**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197009261990031005



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat dan stake holder, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sidoarjo, 30 Maret 2023





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua (ke-2) dari periode perencanaan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Secara umum tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik, dari 6 tujuan yang mencakup 9 indikator dan 13 sasaran yang mencakup 31 indikator rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 125,49% atau bermakna **SANGAT BERHASIL**.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, 9 Indikator Kinerja Tujuan, 13 Sasaran dan 31 Indikator Kinerja Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran tahun kedua (2022) periode perencanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Misi I terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 8 indikator kinerja sasaran:
  - a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:



<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Berhasil

b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 8 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Berhasil
2.	Opini Atas Audit BPK	Sangat Berhasil
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Berhasil
4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Berhasil
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Cukup
6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Berhasil
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Sangat Berhasil
8.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sangat Berhasil

b) Misi II terdapat 2 tujuan, 4 indikator kinerja tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran:

a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 4 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Sangat Berhasil
2.	Indeks GINI	Berhasil
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Sangat Berhasil
4.	Persentase Penduduk Miskin	Sangat Berhasil



- b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 9 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Sangat Berhasil
2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	Berhasil
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	Cukup
4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Sangat Berhasil
5.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	Sangat Berhasil
6.	Persentase Koperasi Berkualitas	Sangat Berhasil
7.	Persentase Desa Mandiri	Sangat Berhasil
8.	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	Sangat Berhasil
9.	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	Sangat Berhasil

- c) Misi III terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja sasaran:

- a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	Indeks Infrastruktur	Sangat Berhasil
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Berhasil

- b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 7 indikator sasaran , dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Sangat Berhasil



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Berhasil
3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Sangat Berhasil
4.	Indeks Kualitas Air	Berhasil
5.	Indeks Kualitas Udara	Berhasil
6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Cukup
7.	Indeks Resiko Bencana	Sangat Berhasil

d) Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran:

a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sangat Berhasil

b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Berhasil
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Berhasil
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Berhasil
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Sangat Berhasil

e) Misi V terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran:

a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Sangat Berhasil



- b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Indeks Toleransi	Sangat Berhasil
2.	Indeks Pelestarian Budaya	Belum ada rilis
3.	Indeks Rasa Aman	Sangat Berhasil

Berdasarkan dengan ketercapaian indikator tujuan dan sasaran diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis pencapaian terhadap 6 (enam) tujuan dengan 9 (delapan) indikator kinerja tujuan, diketahui 3 indikator dalam katagori Berhasil dan 7 (tujuh) indikator Sangat Berhasil. Kalau dirata-rata capaian kinerja tujuan tercapai 152,93% atau Sangat Berhasil.
- 2) Hasil analisis pencapaian terhadap 13 (tiga belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 20 indikator sasaran atau 64,5% dinilai Sangat Berhasil, 8 indikator atau 25,8% katagori Berhasil dan 3 indikator atau 9,7% dalam katagori Cukup, kalau dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 117,53% atau masih dalam katagori Sangat Berhasil. Jika dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran dengan 9 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 125,49%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sudah Sangat Berhasil dan meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun



anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban. Disamping itu juga merupakan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

## **1.2 Penjelasan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo**

### **1.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo**

#### 1) Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112o5' – 112o9' Bujur Timur dan 7o3' – 7o5' Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- b. Sebelah Timur : Selat Madura
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.



Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area).

**Tabel 1. 1 Desa dan Kelurahan per Kecamatan**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	3
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	18	-
8.	Jabon	14	-
9.	Krian	19	3
10	Balongbendo	20	-
11	Wonoayu	23	-
12	Tarik	20	-
13	Prambon	20	-
14	Taman	16	8
15	Waru	17	-
16	Gedangan	15	-
17	Sedati	16	-
18	Sukodono	19	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>322</b>	<b>31</b>

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo



**Gambar 1.1: Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu:

- a. 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur meliputi 29,99% dari luas wilayah;
- b. 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar meliputi 40,81% dari luas wilayah; dan
- c. 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat meliputi 29,20% dari luas wilayah.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar.



Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer

**Tabel 1. 2 Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Tinggi Rata - Rata (m dpl)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Sidoarjo	4	62.03
2	Buduran	4	43.65
3	Candi	4	42.86
4	Porong	4	30.71
5	Krembung	5	27.90
6	Tulangan	7	31.31
7	Tanggulangin	4	29.78
8	Jabon	2	82.92
9	Krian	12	25.89
10	Balombangendo	20	44.34
11	Wonoayu	4	30.29
12	Tarik	16	39.73
13	Prambon	10	29.89
14	Taman	9	31.36
15	Waru	5	30.59
16	Gedangan	4	24.01
17	Sedati	4	79.23
18	Sukodono	7	32.85
<b>Jumlah</b>			<b>719.34</b>

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2023

Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter di bawah permukaan tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, banjir periodik di sebagian 5 (lima) kecamatan, dan banjir karena air pasang berada di sebagian 4 (empat) kecamatan.



**Tabel 1. 3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2021**

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4.063,62	308,14	-	-	6.256,00
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Kremlung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balombangendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
<b>Total</b>		<b>16.312,67</b>	<b>1.573,75</b>	<b>610,40</b>	<b>2.018,55</b>	<b>71.424,25</b>

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah di bulan Agustus.

**Tabel 1. 4 Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021**

No	Lokasi Penakar Hujan	B U L A N											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Ju 1	Ags	Sep	Ok t	Nop	Des
1	Kemlaten	226.0	442.0	152.0	229.0	-	16.0	-	-	-	-	91.8	374.0
2	Ponokawan	196.0	909.0	313.0	189.0	-	23.0	-	-	-	-	231.0	222.0
3	Bakalan	261.0	470.0	268.0	109.0	-	18.0	-	-	-	-	182.0	197.0



4	Krian	173.0	377.0	325.0	175.0	-	20.0	-	-	-	-	216.0	198.0
5	Ketawang	280.0	450.0	318.0	135.0	-	27.0	-	-	-	-	242.5	223.5
6	Ketintang	250.0	483.0	252.0	234.0	-	24.0	-	-	-	-	130.2	234.0
7	Watutulis	238.0	398.0	228.0	178.0	-	20.0	-	-	-	-	290.0	243.0
8	Pertapan Maduretno	242.0	436.0	361.0	111.8	-	27.0	-	-	-	-	236.0	279.0
9	Cepiples	159.0	361.0	191.0	136.0	-	18.0	-	-	-	-	25.0	220.0
10	Luwung	176.0	438.0	228.0	183.0	-	20.0	-	-	-	-	42.0	241.0
11	Gedangrowo	111.1	322.0	144.0	166.0	-	15.0	-	-	-	-	98.0	121.0
12	Prambon	136.0	438.0	169.0	138.0	-	19.0	-	-	-	-	143.0	181.0
13	Botokan	292.0	529.0	410.0	174.0	-	32.0	-	-	-	-	191.0	214.0
14	Durungbedug	253.0	583.0	196.0	217.0	-	31.0	-	-	-	-	174.0	157.0
15	Bono	301.0	432.0	497.0	124.0	-	53.0	-	-	-	-	126.0	187.0
16	Sruni	359.0	578.0	523.0	147.0	-	35.0	-	-	-	-	240.0	278.0
17	Sedati	346.0	336.0	457.0	257.0	-	49.0	-	-	-	-	76.0	207.0
18	Bankar Kemantren	227.0	548.0	453.0	191.0	-	27.0	-	-	-	-	203.0	337.0
19	Ketegan	406.0	473.0	539.0	292.0	-	60.0	-	-	-	-	74.0	379.0
20	Sumput	66.0	295.0	91.0	47.0	-	4.0	-	-	-	-	62.0	135.0
21	Klagen	256.0	269.0	76.0	88.0	-	5.0	-	-	-	-	287.0	229.0
22	Karangnongko	267.0	543.0	248.0	111.0	-	22.0	-	-	-	-	145.0	163.0
23	Sidoarjo	-	490.0	247.0	235.0	-	36.0	-	-	-	-	119.0	209.0
24	Kludan	201.0	441.0	344.0	167.0	-	15.0	-	-	-	-	67.0	254.0
25	Putat	284.0	518.0	334.0	138.0	-	-	-	-	-	-	44.0	211.0
26	Kedung Cangkring	152.0	371.0	248.0	37.0	-	-	-	-	-	-	48.0	80.0
27	Porong	189.0	423.0	259.0	65.0	-	14.0	-	-	-	-	68.0	125.0
28	Krembung / Biting	129.0	391.0	80.0	122.0	-	4.0	-	-	-	-	49.0	98.0
29	Bedugbulus	140.0	399.0	113.0	168.0	-	5.0	-	-	-	-	136.0	154.0
30	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata		<b>217.8</b>	<b>453.2</b>	<b>278.1</b>	<b>155.6</b>	<b>0.0</b>	<b>22.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>141.4</b>	<b>210.6</b>

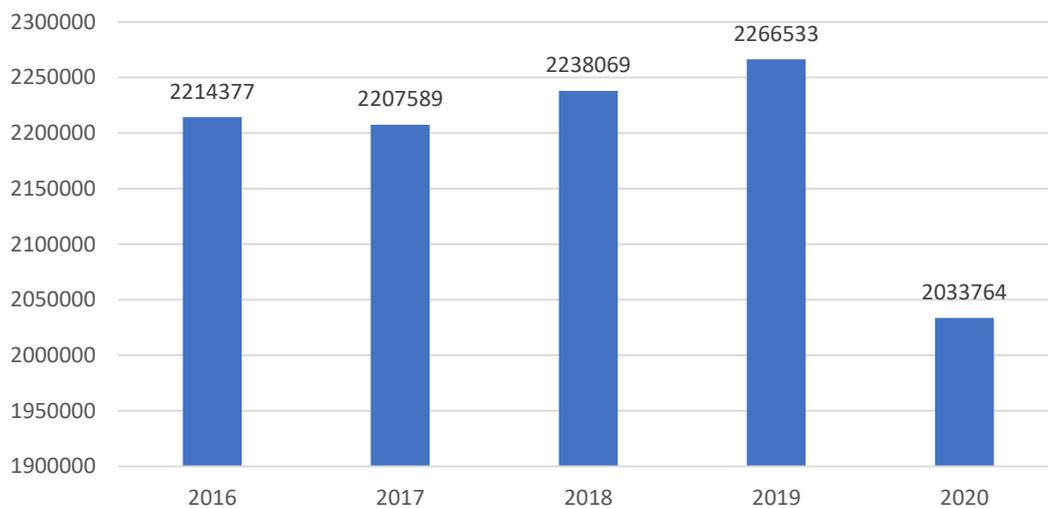
Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2021



## 2) Kondisi Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2020, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.266.533 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

**Grafik1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo**



Sumber data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 240.674 jiwa, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 61.092 jiwa. Jumlah penduduk per Kecamatan dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1. 5: Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kecamatan Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	TARIK	69.189	22.614
2	PRAMBON	79.952	26.231



3	KREMBUNG	69.887	22.530
4	PORONG	73.446	23.892
5	JABON	56.266	18.167
6	TANGGULANGIN	89.804	27.919
7	CANDI	153.423	47.630
8	SIDOARJO	201.115	63.231
9	TULANGAN	102.339	33.586
10	WONOAYU	85.586	27.367
11	KRIAN	130.930	41.659
12	BALONGBENDO	76.050	24.744
13	TAMAN	207.815	66.235
14	SUKODONO	121.859	37.716
15	BUDURAN	98.710	30.780
16	GEDANGAN	120.003	37.218
17	SEDATI	96.636	30.587
18	WARU	200.754	64.919
	<b>TOTAL</b>	<b>2.033.764</b>	<b>647.025</b>

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 1. 6 Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin  
Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	33.392	32.752	66.144
2	PRAMBON	38.633	37.813	76.446
3	KREMBUNG	33.382	33.476	66.858
4	PORONG	34.911	34.360	69.271
5	JABON	27.157	26.897	54.054
6	TANGGULANGIN	42.814	42.662	85.476
7	CANDI	74.533	74.686	149.219
8	SIDOARJO	96.330	94.917	191.247
9	TULANGAN	49.096	48.864	97.960
10	WONOAYU	41.025	40.370	81.395
11	KRIAN	64.023	62.695	126.718

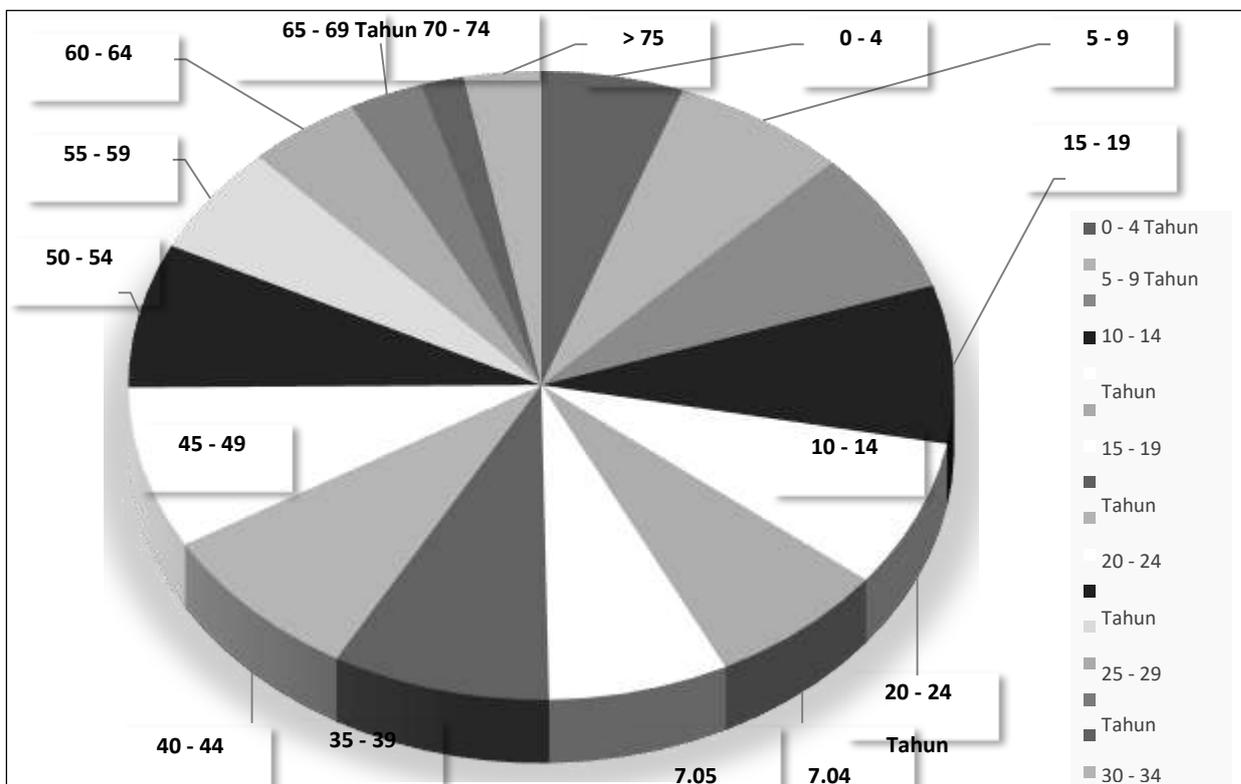


NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
12	BALONGBENDO	36.754	35.833	72.587
13	TAMAN	99.139	98.753	197.892
14	SUKODONO	59.791	58.656	118.447
15	BUDURAN	48.441	48.139	96.580
16	GEDANGAN	58.146	57.888	116.034
17	SEDATI	46.724	46.337	93.061
18	WARU	95.276	97.337	192.613
	<b>T O T A L</b>	<b>979.567</b>	<b>975.435</b>	<b>1.955.002</b>

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya usia tua. Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 35 tahun sampai dengan 39 tahun.

### **Grafik 1.3 Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2021**



Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel 1.9: Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0 - 4	61.555	57.086	118.641
2.	5 - 9	75.824	70.962	146.786
3.	10 - 14	82.089	76.677	158.766
4.	15 - 19	76.081	71.907	147.988
5.	20 - 24	80.433	76.646	157.079
6.	25 - 29	77.657	75.492	153.149
7.	30 - 34	71.032	69.140	140.172
8.	35 - 39	76.228	76.346	152.574
9.	40 - 44	76.978	80.403	157.381
10.	45 - 49	73.776	79.266	153.042
11.	50 - 54	73.053	61.845	126.010
12.	55 - 59	56.102	42.295	88.608
13.	60 - 64	42.856	26.109	52.213



NO	STRUKTUR UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
14.	65 - 69	29.130	21.370	40.316
15.	70 - 75	13.923	15.647	27.824
16.	>75	12.850	17.185	27.841
<b>TOTAL</b>	<b>979.567</b>	<b>1.135.399</b>	<b>2.282.215</b>	

Sumber Data: SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.146.816 jiwa atau 50,25%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.135.399 jiwa atau 49,74%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut:

**Grafik 1.4: Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**



Sumber: SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan Lulusan SMA Sederajat, yaitu 42,04% dari jumlah penduduk. Meski demikian, masih ada 25,20% penduduk Kabupaten Sidoarjo yang masih berpendidikan rendah atau Lulusan SD Sederajat. Komposisi penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.10: Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2021**



NO	NAMA KECAMATAN	TDK/B LM SEKOL AH	BLM TAMA T SD/SE DE RAJA T	TAMAT SD/ SEDE RAJ AT	SLTP/S ED ERAJ A T	SLTA/ S E DERAJ A T	D-I/II	AKAD E MI/D- III/ SARJA N A MUDA	D-IV/S- I	S-II	S-III	TOTAL
1.	TARIK	14.000	4.984	16.35 9	13.390	17.673	145	496	2.067	72	3	<b>69.189</b>
2.	PRAMBON	14.197	6.588	18.47 7	14.201	22.597	180	690	2.930	88	4	<b>79.952</b>
3.	KREMBUNG	13.414	6.562	13.82 5	12.630	20.042	174	677	2.473	87	3	<b>69.887</b>
4.	PORONG	20.476	1.794	15.64 3	12.682	19.207	121	623	2.775	120	5	<b>73.446</b>
5.	JABON	12.605	2.980	13.94 5	10.911	13.584	108	449	1.630	49	5	<b>56.266</b>
6.	TANGGULANGIN	19.958	5.489	17.07 0	15.417	25.717	187	1.024	4.737	201	4	<b>89.804</b>
7.	CANDI	31.829	14.202	25.53 0	21.222	44.841	469	2.632	12.031	627	40	<b>153.423</b>
8.	SIDOARJO	44.243	13.853	27.41 1	24.501	58.968	825	4.811	24.910	1.523	70	<b>201.115</b>
9.	TULANGAN	19.302	9.500	18.71 9	17.054	31.518	217	1.119	4.747	161	2	<b>102.339</b>
10.	WONOAYU	21.176	4.322	20.44 6	13.367	21.721	184	760	3.474	131	5	<b>85.586</b>
11.	KRIAN	27.335	11.420	25.29 7	20.737	37.012	349	1.645	6.879	248	8	<b>130.930</b>
12.	BALONGBENDO	18.086	4.660	16.24 6	13.794	19.762	174	600	2.643	84	1	<b>76.050</b>
13.	TAMAN	36.331	20.240	30.54 3	28.769	68.332	1.219	4.200	17.018	1.076	87	<b>207.815</b>
14.	SUKODONO	25.096	9.503	19.12 0	17.342	38.261	515	2.041	9.519	437	25	<b>121.859</b>
15.	BUDURAN	19.340	8.982	12.97 2	14.106	31.061	365	1.884	9.401	578	21	<b>98.710</b>
16.	GEDANGAN	29.664	6.875	16.81 5	16.547	36.505	428	2.205	10.373	563	28	<b>120.003</b>
17.	SEDATI	19.950	7.264	15.42 9	13.056	30.326	358	1.840	7.734	652	27	<b>96.636</b>
18.	WARU	42.105	15.550	23.44 1	25.481	62.121	674	4.438	24.993	1.856	95	<b>200.754</b>
<b>TOTAL</b>		429.107	154.768	347.288	305.207	599.248	6.692	32.134	150.334	8.553	433	<b>2.033.764</b>

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
2021

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.11 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2021**

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	615.678	45.	USTADZ/MUBALIGH	126



<b>NO.</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NO.</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	118.096	46.	JURU MASAK	35
3	PELAJAR/MAHASISWA	325.217	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	15.685	48.	ANGGOTA DPR RI	5
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	27.382	49.	ANGGOTA DPD RI	2
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	13.915	50.	ANGGOTA BPK	2
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	4.655	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	17.764	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	41.640	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	2
10	PETERNAK	48	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	787	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	166	56.	GUBERNUR	0
13	KONSTRUKSI	192	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	189	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	718.225	59.	WAKIL BUPATI	1
16	KARYAWAN BUMN	5.685	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	562	61.	WAKIL WALIKOTA	0
18	KARYAWAN HONORER	689	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.759	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	20
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.966	64.	DOSEN	3,145
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	65.	GURU	22,064
22	BURUH PETERNAKAN	17	66.	PILOT	38
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	326	67.	PENGACARA	131
24	TUKANG CUKUR	20	68.	NOTARIS	93
25	TUKANG LISTRIK	65	69.	ARSITEK	42
26	TUKANG BATU	1.046	70.	AKUNTAN	21
27	TUKANG KAYU	212	71.	KONSULTAN	76
28	TUKANG SOL SEPATU	26	72.	DOKTER	1,647
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	102	73.	BIDAN	1,317
30	TUKANG JAHIT	429	74.	PERAWAT	2,345
31	TUKANG GIGI	4	75.	APOTEKER	183
32	PENATA RIAS	48	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	16
33	PENATA BUSANA	6	77.	PENYIAR TELEVISI	1
34	PENATA RAMBUT	36	78.	PENYIAR RADIO	4
35	MEKANIK	240	79.	PELAUT	245
36	SENIMAN	72	80.	PENELITI	7
37	TABIB	18	81.	SOPIR	3.445



NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	9	83.	PARANORMAL	10
40	PENTERJEMAH	6	84.	PEDAGANG	13.434
41	IMAM MASJID	5	85.	PERANGKAT DESA	2.442
42	PENDETA	131	86.	KEPALA DESA	219
43	PASTOR	4	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	8
44	WARTAWAN	155	88.	WIRASWASTA	70.280
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	248
				<b>JUMLAH</b>	<b>2.033.764</b>

Sumber Data: SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebesar 35,12%. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 3,05%, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebesar 2,15%, yang berkecukupan pada bisnis perdagangan sebesar 1,11%, dan pedagang sebesar 0,66%. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian ini tidak lepas dari struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

### 1.2.2 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan



- administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
- 1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
    - a. Bagian Pemerintahan
    - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
    - c. Bagian Hukum
  - 2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
    - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
    - b. Bagian Pembangunan
    - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  - 3) Asisten Administrasi Umum
    - a. Bagian Organisasi
    - b. Bagian Umum
    - c. Bagian Protokol dan Rumah Tangga
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan



- ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;
- 4) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan, pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi, serta sub urusan penataan ruang;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - 6) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - 7) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 10) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;



- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 15) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;



- 19) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan;
  - 3) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
  - 4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan, yang terdiri dari 18 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain:
- 1) Kecamatan Sidoarjo dengan Tipe A;
  - 2) Kecamatan Candi dengan Tipe A;
  - 3) Kecamatan Buduran dengan Tipe A;
  - 4) Kecamatan Gedangan dengan Tipe A;
  - 5) Kecamatan Sedati dengan Tipe A;
  - 6) Kecamatan Waru dengan Tipe A;
  - 7) Kecamatan Taman dengan Tipe A;
  - 8) Kecamatan Krian dengan Tipe A;
  - 9) Kecamatan Wonoayu dengan Tipe A;
  - 10) Kecamatan Sukodono dengan Tipe A;



- 11) Kecamatan Balongbendo dengan Tipe A;
- 12) Kecamatan Tarik dengan Tipe A;
- 13) Kecamatan Tulangan dengan Tipe A;
- 14) Kecamatan Prambon dengan Tipe A;
- 15) Kecamatan Krembung dengan Tipe A;
- 16) Kecamatan Tanggulangin dengan Tipe A;
- 17) Kecamatan Jabon dengan Tipe A;
- 18) Kecamatan Porong dengan Tipe A.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidika Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.



Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli dimaksud antara lain:

- a) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
- b) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
- c) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM

### **1.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur**

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2021 sebanyak 10.312 orang berdasarkan golongan dan jenis kelamin yang terdiri dari, sebagai berikut:



**Tabel 1.12: Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur**

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy (1)	2021		Jumlah Total (7)
	Laki-laki Male (5)	Perempuan Female (6)	
1. I/A (Juru Muda)			
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	1	3
3. I/C (Juru)	15		15
4. I/D (Juru Tingkat I)	206	4	210
<b>Golongan I/Range I</b>	<b>223</b>	<b>5</b>	<b>228</b>
5. II/A (Pengatur Muda)	39	9	48
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	357	50	407
7. II/C (Pengatur)	281	352	633
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	686	399	1085
<b>Golongan II/Range II</b>	<b>1 363</b>	<b>810</b>	<b>2 173</b>
9. III/A (Penata Muda)	377	1 018	1395
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	614	1 374	1988
11. III/C (Penata)	350	774	1124
12. III/D (Penata Tingkat I)	419	760	1179
<b>Golongan III/Range III</b>	<b>1 760</b>	<b>3 926</b>	<b>5 686</b>
13. IV/A (Pembina)	405	670	1075
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	327	694	1021
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	51	61	112
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	7	6	13
17. IV/E (Pembina Utama)	2	2	4
<b>Golongan IV/Range IV</b>	<b>792</b>	<b>1 433</b>	<b>2 225</b>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4 138</b>	<b>6 174</b>	<b>10 312</b>

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara tersebut sudah cukup untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Peningkat kualitas SDM terus dilakukan peningkatan baik dari segi softskill maupun hardskill dari aparatur dengan harapan kedepan akan adanya peningkatan secara bertahap dari segi kualitas/kompetensi SDM.

#### 1.2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain itu instrumen penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana untuk setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut:

NO	OPD	BARANG (UNIT)			NILAI(Rp)		
		BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	3.987	1.348	5.335	125.909.035.909,00	8.644.774.627,85	134.553.810.536,85
2	SEKRETARIAT DPRD	4.093	442	4.535	55.415.111.667,00	2.745.397.067,00	58.160.508.734,00



NO	OPD	BARANG (UNIT)			NILAI(Rp)		
		BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	243.422	69.370	312.792	2.271.436.906.619,47	194.182.823.303,60	2.465.619.729.923,07
4	DINAS KESEHATAN	28.084	17.130	45.214	544.390.031.504,60	58.682.860.797,90	603.072.892.302,50
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	3.747	822	4.569	11.440.677.551.909,70	274.990.494.670,23	11.715.668.046.579,90
6	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.511	216	2.727	5.352.355.823.990,74	5.244.194.620,00	5.357.600.018.610,74
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	934	173	1.107	28.990.287.972,81	795.759.250,00	29.786.047.222,81
8	DINAS SOSIAL	1.206	218	1.424	42.559.629.228,91	952.274.845,00	43.511.904.073,91
9	DINAS TENAGA KERJA	602	49	651	8.056.182.197,00	695.561.530,00	8.751.743.727,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1.217	464	1.681	19.217.691.172,16	2.878.614.658,80	22.096.305.830,96
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2.447	16	2.463	104.317.146.538,22	976.630.875,00	105.293.777.413,22
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	6.480	1.197	7.677	756.728.060.835,10	19.790.009.863,34	776.518.070.698,44
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	751	242	993	18.944.566.002,28	3.494.000.980,44	22.438.566.982,72
14	DINAS PERHUBUNGAN	4.855	80	4.935	117.635.000.142,86	7.567.248.275,00	125.202.248.417,86
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.227	96	1.323	49.091.524.219,34	1.057.633.399,00	50.149.157.618,34
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	521	106	627	14.857.653.113,16	404.313.293,00	15.261.966.406,16
17	DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	1.469	316	1.785	204.268.499.837,98	1.163.785.863,00	205.432.285.700,98
18	DINAS KEPEMUDAAN,	1.012	296	1.308	255.552.159.677,03	25.668.375.769,00	281.220.535.446,03



NO	OPD	BARANG (UNIT)			NILAI(Rp)		
		BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
	OLAH RAGA, DAN PARIWISATA						
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	32.896	289	33.185	27.645.847.840,29	544.856.464,94	28.190.704.305,23
20	DINAS PERIKANAN	1.579	365	1.944	259.323.436.761,22	3.397.761.113,10	262.721.197.874,32
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.936	680	3.616	747.412.303.147,84	7.969.400.095,89	755.381.703.243,73
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.212	148	1.360	10.778.240.308,00	1.337.291.780,00	12.115.532.088,00
23	BPKAD (SELAKU PENGELOLA)	259	22	281	681.306.549.122,05	28.133.094.245,00	709.439.643.367,05
24	BPKAD (SELAKU PENGGUNA BARANG)	1.587	194	1.781	80.306.827.136,88	24.977.638.817,00	105.284.465.953,88
25	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	1.702	512	2.214	31.342.764.077,82	3.884.676.942,40	35.227.441.020,22
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.821	136	1.957	36.097.750.190,00	526.273.357,00	36.624.023.547,00
27	BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK	647	649	1.296	12.108.623.076,27	1.658.626.224,00	13.767.249.300,27
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	597	591	1.188	47.152.042.038,65	8.683.597.789,72	55.835.639.828,37
29	RSUD KAB SIDOARJO	31.342	8	31.350	1.225.672.237.717,77	16.993.266.479,57	1.242.665.504.197,34
30	KECAMATAN SIDOARJO	3.502	243	3.745	147.918.306.780,84	273.371.800,00	148.191.678.580,84
31	KECAMATAN CANDI	621	343	964	9.518.135.168,71	1.118.716.850,84	10.636.852.019,55
32	KECAMATAN BUDURAN	406	250	656	6.191.108.650,00	364.730.467,00	6.555.839.117,00
33	KECAMATAN GEDANGAN	384	163	547	7.372.820.396,00	478.261.771,84	7.851.082.167,84
34	KECAMATAN SEDATI	489	373	862	5.972.049.833,00	700.788.254,84	6.672.838.087,84
35	KECAMATAN WARU	587	222	809	12.182.342.282,75	437.487.445,84	12.619.829.728,59



NO	OPD	BARANG (UNIT)			NILAI(Rp)		
		BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
36	KECAMATAN TAMAN	2.442	562	3.004	121.924.299.178,00	2.897.638.091,84	124.821.937.269,84
37	KECAMATAN KRIAN	1.553	159	1.712	59.524.594.170,00	1.125.929.010,84	60.650.523.180,84
38	KECAMATAN WONOAYU	458	199	657	6.167.900.836,00	482.736.867,00	6.650.637.703,00
39	KECAMATAN SUKODONO	667	173	840	21.491.618.557,95	553.460.101,84	22.045.078.659,79
40	KECAMATAN BALONGBENDO	493	105	598	9.121.653.849,00	527.613.336,00	9.649.267.185,00
41	KECAMATAN TARIK	721	333	1.054	8.637.609.391,84	228.767.048,00	8.866.376.439,84
42	KECAMATAN TULANGAN	326	201	527	7.761.515.922,00	324.974.350,00	8.086.490.272,00
43	KECAMATAN PRAMBON	960	66	1.026	8.687.445.260,70	297.074.786,68	8.984.520.047,38
44	KECAMATAN KREMBUNG	574	127	701	7.775.387.908,84	337.709.850,00	8.113.097.758,84
45	KECAMATAN TANGGULANGIN	797	186	983	8.646.573.602,48	502.511.179,14	9.149.084.781,62
46	KECAMATAN JABON	245	120	365	8.116.806.424,00	540.055.386,84	8.656.861.810,84
47	KECAMATAN PORONG	963	53	1.016	33.043.292.175,37	2.258.821.575,00	35.302.113.750,37
48	INSPEKTORAT	717	94	811	18.718.494.477,26	1.188.849.172,00	19.907.343.649,26
49	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.232	94	1.326	9.706.106.837,00	490.568.000,00	10.196.674.837,00
	<b>TOTAL</b>	<b>403.280</b>	<b>100.241</b>	<b>503.521</b>	<b>25.088.027.545.655,90</b>	<b>723.171.302.342,32</b>	<b>25.811.198.847.998,20</b>

Sumber Data: BPKAD Kab. Sidoarjo tahun 2021

Dari data sarana dan prasarana yang ada pada Kabupaten Sidoarjo di atas dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja cukup mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.



### **1.3 Isu Strategis Daerah**

Dengan memperhatikan kelima kondisi Kabupaten Sidoarjo tersebut maka sudah terakomodir kedalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Sidoarjo berawal dari isu strategis sebagai berikut::

1. Mewujudkan good governance melalui pengelolaan pemerintahan yang Tangkas, Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
2. Penguatan komitmen ASN, penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis Information and Communication Technology (ICT).
3. Pengembangan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
4. Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi.
6. Meningkatkan kualitas tatakelola dan kemandirian Desa.



7. Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro,
8. Memperluas Lapangan Kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha.
9. Penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
10. Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas unggulan lokal yang halal dan mampu berdaya saing serta berkelanjutan.
11. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
12. Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis dan industry kreatif.
13. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
14. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro.
15. Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistim ketahanan pangan daerah.
16. Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan yang memiliki daya saing regional dan memiliki karakter budi pekerti yang baik.
17. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
18. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik di seluruh wilayah.



19. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata.
20. Pengelolaan potensi dan peningkatan peran pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
21. Cakupan layanan jaminan Pendidikan dan Kesehatan, kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
22. Prioritas implementasi pencapaian target SDGs pada indicator 1 sampai dengan nomor 9 dan dan nomor 11, yaitu menyangkut, kemiskinan, sanitasi lingkungan dan tatakota.
23. Meningkatkan kestaraan dan kehidupan yang inklusif bagi disabilitas dan seluruh elemen masyarakat.
24. Penyediaan sarana prasarana umum antara lain; RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, dan ruang publik lainnya.
25. Pengembangan transportasi massal bagi orang dan barang yang dapat mengatasi kemacetan.
26. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
27. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan 100% sanitasi sehat,
28. Sistim pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif dan efisien serta berkelanjutan.
29. Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.
30. Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa,



31. Optimalisasi kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo guna menguatkan konektivitas pembangunan antar wilayah,
32. Integrasi pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung pemantapan Sektor Utama yaitu Perdagangan dan Industri,
33. Integrasi pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan Sektor Strategis, yaitu pariwisata, pertanian modern, perikanan dan jasa.
34. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
35. Percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis pendukung sector pertanian dan perikanan.
36. Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
37. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll.
38. Penanganan terhadap dampak bencana geologi lumpur Sidoarjo, antara lain penurunan tanah, banjir dan dampak lain yang ditimbulkan.
39. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, perlindungan terhadap kaum disabilitas, antidiskrimasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
40. Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
41. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026**

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026. Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode sebelumnya yakni tahun 2016 - 2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021 – 2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021 – 2026, yakni:

**”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA,  
BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”**

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut:

- a) **Sidoarjo Sejahtera**; Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti



kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.

- b) **Sidoarjo Maju;** Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c) **Sidoarjo Berkarakter;** Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- d) **Pembangunan Berkelanjutan;** Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian



lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalkan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Keselarasan Visi dan Misi**

<b>VISI</b>	<b>POKOK- POKOK VISI</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</b>	<b>Sidoarjo Sejahtera</b>	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	<b>Sidoarjo Maju</b>	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
	<b>Sidoarjo Berkarakter</b>	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	<b>Pembangunan Berkelanjutan</b>	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 5 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

**a) Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha**

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten



Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

**b) Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.**

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

**c) Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.**

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur



yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

**d) Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.**

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas

**e) Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.**



Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib

Menindaklanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026, maka disusunlah konsep kerangka yang merupakan kerangka arsitektur kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026. Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, juga dipaparkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati yang antara lain, sebagai berikut:

1. 100.000 Lapangan kerja baru
2. BPJS kesehatan gratis seluruh warga
3. Gratis makanan tiap hari warga miskin
4. 10.000 beasiswa kuliah
5. Insentif plus guru ngaji dan guru agama
6. Rp. 5juta - 50juta modal usaha mikro perempuan
7. Rp. 6juta operasional bagi RT
8. 20.000 UMKM naik kelas
9. Penataan Kota dan transportasi terpadu urau kemacetan
10. Tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu
11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer
12. Youth center, bangunan pusat kreativitas anak muda
13. 2.000 warung rakyat direnovasi



14. Tingkatkan ADD untuk Desa sejahtera
15. 24 jam pengaduan rakyat respon cepat
16. Reformasi perijinan untuk bisnis yang kondusif
17. Perluasan RTH, revitalisasi sungai, revolusi manajemen sampah.

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

#### **a) Tujuan**

Adapun tujuan beserta indikator pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan. Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan dengan Indikator kinerja: a) Pertumbuhan Ekonomi; b) Indeks Gini; c) Tingkat pengangguran terbuka; d) Prosentase penduduk miskin.
- 3) Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan Indikator kinerja: a) Indeks infrastruktur; b) Indeks kualitas lingkungan hidup.
- 4) Terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya dengan Indikator kinerja Indeks pembangunan manusia (IPM).
- 5) Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan



ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat  
Indikator kinerja Indeks kesalehan social.

b) Sasaran

- 1) Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital dengan Indikator kinerja: a) Nilai SAKIP Kabupaten; b) Opini Atas Audit BPK; c) Survey eksternal persepsi korupsi; d) Status Kinerja LPPD; e) Nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); f) Indeks inovasi daerah; g) Tingkat Maturitas SPIP.
- 2) Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung kemudahan berusaha. dengan Indikator kinerja Indeks pelayanan publik
- 3) Berkembangnya perdagangan, industri, investasi, pertanian dan perikanan dengan Indikator kinerja: a) Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan; b) Persentase kontribusi PDRB sektor industri; c) Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas; d) Persentase pertumbuhan nilai investasi.
- 4) Berkembangnya koperasi, usaha mikro dan kemandirian desa dengan Indikator kinerja: a) Persentase usaha mikro mandiri; b) Persentase koperasi berkualitas; c) Persentase desa mandiri.
- 5) Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran dengan Indikator kinerja Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor.
- 6) Menurunnya penduduk miskin dengan Indikator kinerja Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (GK)
- 7) Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata dengan indikator Indikator kinerja: a) Indeks infrastruktur pekerjaan umum; b) Indeks infrastruktur pendidikan; c) Indeks infrastruktur kesehatan.



- 8) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana dengan Indikator kinerja: a) Indeks kualitas air; b) Indeks kualitas udara; c) Indeks kualitas tutupan lahan; d) Indeks resiko bencana.
- 9) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan Indikator kinerja: a) Harapan lama sekolah (HLS); b) Rata-rata lama sekolah (RLS).
- 10) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan Indikator kinerja Usia harapan hidup (UHH)
- 11) Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat dengan Indikator kinerja Indeks pembangunan gender (IPG).
- 12) Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam masyarakat dengan Indikator kinerja: a) Indeks toleransi; b) Indeks pelestarian budaya.
- 13) Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram dengan Indikator kinerja Indeks Rasa Aman.

Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator keberhasilannya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tabel:

**Tabel 2. 2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>MISI - 1:</b>			Terselenggara nya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN TANGKAS MELALUI DIGITALISASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN				Opini Atas
				Survey Eksternal Persepsi Korupsi
				Status Kinerja
				Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
PUBLIK DAN KEMUDAHAN BERUSAHA;	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Inovasi
				Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
<b>MISI - 2</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
MEMBANGKITKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN FOKUS PADA KEMANDIRIAN LOKAL BERBASIS USAHA MIKRO, KOPERASI, PERTANIAN, PERIKANAN, SEKTOR JASA DAN INDUSTRI UNTUK MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN DAN MENGURANGI KEMISKINAN;				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.
				Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
				Persentase Usaha Mikro Mandiri
				Persentase Koperasi Berkualitas
		Indeks Gini	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor
		Prosentase Penduduk Miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)
<b>MISI-3</b>	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG MODERN DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN;	Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	yang Berkualitas dan Merata.	Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrastruktur Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan
				Indeks Resiko Bencana
<b>MISI-4</b>	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.	Harapan Lama Sekolah (HLS)
MEMBANGUN SDM UNGGUL DAN BERKARAKTER MELALUI PENINGKATAN AKSES PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN SERTA KEBUTUHAN DASAR LAINNYA;			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)
<b>MISI-5</b>	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
MEWUJUDKAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERPEGANG TEGUH PADA NILAI-NILAI KEAGAMAAN SERTA MAMPU MENJAGA KERUKUNAN SOSIAL ANTAR WARGA			Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.	Indeks Pelestarian Budaya
				Indeks Rasa Aman

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021 - 2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.



## 1) Keselarasan Kinerja MISI – 1

Misi 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
Tujuan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.
Sasaran 1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.
Sasaran 2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

## 2) Keselarasan Kinerja MISI – 2

Misi 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
Tujuan 1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.
Sasaran 1	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.
Sasaran 2	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.
Tujuan 2	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.
Sasaran 3	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran.
Sasaran 4	Menurunnya Penduduk Miskin.



### 3) Keselarasan Kinerja MISI – 3

Misi 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
Tujuan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
Sasaran 1	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.

### 4) Keselarasan Kinerja MISI – 4

Misi 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
Tujuan	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.
Sasaran 3	Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam masyarakat

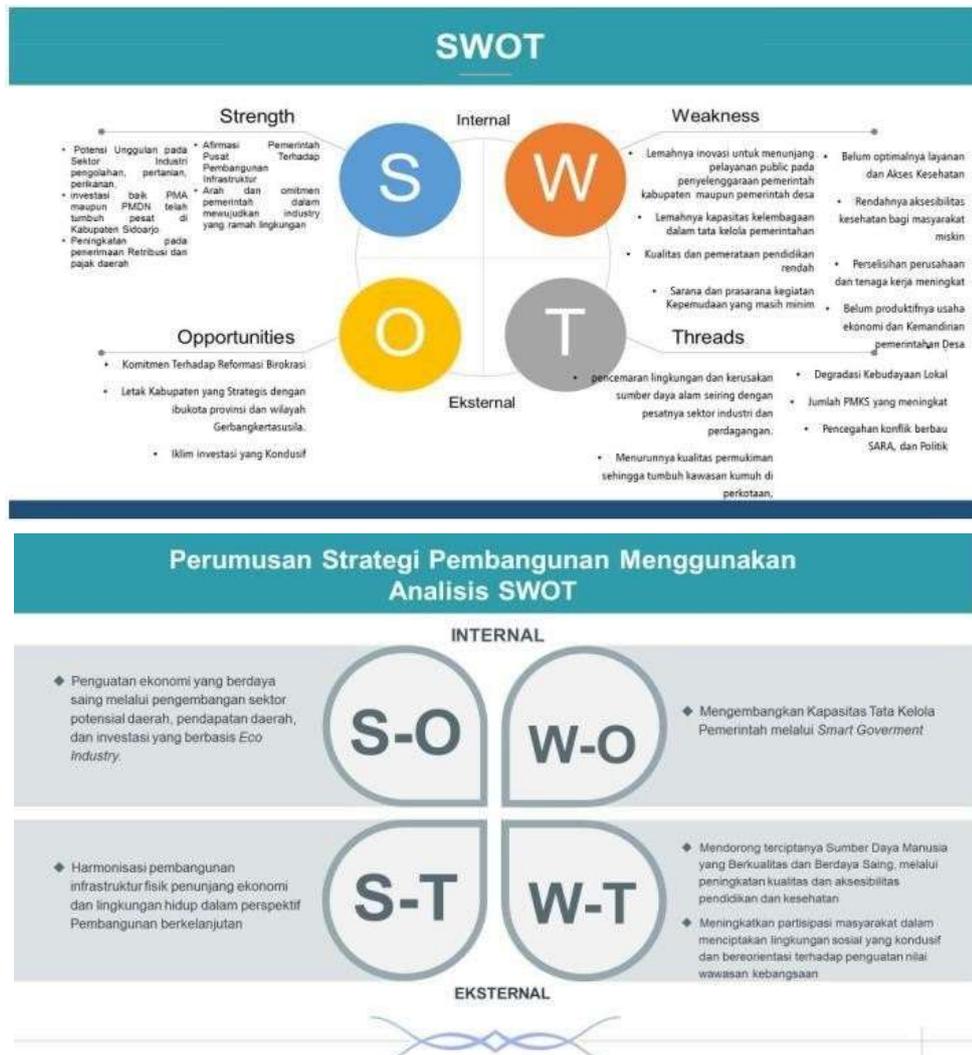
### 5) Keselarasan Kinerja MISI – 5

Misi 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
Tujuan	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.
Sasaran 1	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat.
Sasaran 2	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.



### 2.1.3 Strategi

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Berikut analisa SWOT dari isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1: SWOT



Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dirumuskan dalam strategi, sebagai berikut:

- a) Strategi S-O ; yang ditetapkan adalah Penguatan Ekonomi yang berdayasaing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis eco Industri. Dimaksudkan pada strategi ini yaitu Industri olahan, UMKM, Pertanian dan Perikanan kelautan merupakan sektor sektor potensial Kabupaten Sidoarjo yang perlu didorong oleh pemerintah. Sebab, sektor-sektor potensial tersebut menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor, industri olahan, UMKM, pertanian, Perikanan dan kelautan. Pajak daerah dan restribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah, hal ini tentunya perhatian dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Kabupaten Sidoarjo. investasi baik PMA maupun PMDN telah tumbuh positif.
- b) Strategi S-T ; yang ditetapkan adalah Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektifitas antar wilayah dan infrastruktur strategis penunjang perekonomian, serta pembangunan yang patuh akan rencanana tata ruang. Sesuai dengan Konsep Sustainable Development, maka pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu unsur yang perlu perhatian guna untuk generasi mendatang dan menjaga dari dampak perubahan iklim
- c) Strategi W-O ; yang ditetapkan adalah Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.



Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Smart governance prinsip dasar yaitu mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh masyarakat, mengembangkan operasional, meningkatkan manajemen organisasi, membuat system database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi yang up to date, menggunakan teknologi yang mutakhir, adanya koordinasi stakeholder.

- d) Strategi W-T (1) ; yang ditetapkan adalah Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Membangun generasi yang profesional menjadi prioritas utama dalam Kabupaten Sidoarjo mengingat daya saing dan kompetensi semakin meningkat. Kualitas pendidikan yang baik selaras dengan akses seluruh lapisan masyarakat



dapat menjangkau serta pemerataan pendidikan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah, merawat dan mengobati, pemulihan kesehatan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, upaya tersebut didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Masyarakat secara merata.

- e) Strategi W-T (2) ; yang ditetapkan adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan. pada strategi ini menciptakan adanya social sustainability, prinsip utamanya yaitu equity, individu mempunyai akses berpartisipasi secara penuh. kedua, social inclusion and interaction, adanya hak untuk kesempatan berpartisipasi baik meliputi partisipasi dalam pembangunan maupun dalam berpolitik. Ketiga, security jaminan untuk lingkungan yang aman dan mendukung. Terakhir yaitu adaptability ketahanan terhadap komunitas. Strategi ini juga menciptakan adanya penguatan pada demokrasi Pancasila.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan tatakelola Pemerintahan dan Inovasi pelayanan publik.
- 2) Penguatan ekonomi sektor strategis simultan dengan percepatan ekonomi kerakyatan.
- 3) Pemenuhan infrastruktur tata kota terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan sistem transportasi terpadu.



4) Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development).

5) Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai spirit pembangunan.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai :

**Tabel 2. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN</b>		
<b>Misi 1</b> : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.		
<b>Tujuan 1</b> : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang	<b>Sasaran 1.1</b> : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	<b>Strategi 1.1.1.</b> Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap.  <b>Strategi 1.1.2.</b> Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan.



Mendukung Kemudahan Berusaha.		<b>Strategi 1.1.3.</b> Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)
	<b>Sasaran 1.2</b> : Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka  Mendukung Kemudahan Berusaha.	<b>Strategi 1.2.1.</b> Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik)
		<b>Strategi 1.2.2.</b> Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital.
		<b>Strategi 1.2.3.</b> Percepatan Pelayanan melalui Pemangkasan birokrasi dan tahapan ijin usaha untuk kemudahan investasi.
<b>Misi 2</b> : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.		
<b>Tujuan 1</b> : Meningkatnya	<b>Sasaran 1.1</b> : Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	<b>Strategi 1.1.1.</b> Penyusunan Regulasi Daerah



Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan pertanian dan perikanan.		yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa. <b>Strategi 1.1.2.</b> Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna.
	<b>Sasaran 1.2:</b> Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	<b>Strategi 1.2.1.</b> Kebijakan Stimulus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan koperasi. <b>Strategi 1.2.2.</b> Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur Desa dan Kapasitas Kelembagaan secara berkelanjutan untuk mendorong pengelolaan potensi desa secara optimal.
	<b>Tujuan 2 :</b>	<b>Sasaran 2.1 :</b> Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran. <b>Strategi 2.1.1.</b>



<p>Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.</p>		<p>Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal.</p> <p><b>Strategi 2.1.2.</b></p> <p>Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.</p>
	<p><b>Sasaran 2.2:</b></p> <p>Menurunnya Penduduk Miskin</p>	<p><b>Strategi 2.2.1.</b></p> <p>Integrasi Program Lintas Urusan secara tepat sasaran melalui implementasi 17 Program Prioritas</p>
<p><b>Misi 3 :</b> Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.</p>		
<p><b>Tujuan 1 :</b></p> <p>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang</p>	<p><b>Sasaran 1.1 :</b> Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.</p>	<p><b>Strategi 1.1.1.</b></p> <p>Pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan pendukung percepatan kegiatan</p>



Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan berkelanjutan	<b>Sasaran 1.2</b> : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	ekonomi dan sosial,
		<b>Strategi 1.1.2.</b> Pengelolaan tata kota, perumahan dan permukiman sehat dan sitem transportasi terpadu
		<b>Strategi 1.1.3.</b> Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan merata.
		<b>Strategi 1.2.1.</b> Pembangunan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan utilitas ruang publik yang berkualitas.
		<b>Strategi 1.2.2.</b> Normalisasi Sungai-sungai  berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
		<b>Strategi 1.2.3.</b> Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan Kawasan vegetasi



		<p>untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH.</p> <p><b>Strategi 1.2.4.</b></p> <p>Sistim Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.</p>
<p><b>Misi 4 :</b> Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.</p>		
<p><b>Tujuan 1 :</b></p> <p>Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.</p>	<p><b>Sasaran 1.1 :</b> Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.</p>	<p><b>Strategi 1.1.1.</b></p> <p>Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kependidikan secara bertahap,</p>
		<p><b>Strategi 1.1.2.</b></p> <p>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan secara merata,</p>
		<p><b>Strategi 1.1.3.</b></p> <p>Inovasi penyelenggaraan Pendidikan berbasis teknologi.</p>
		<p><b>Strategi 1.2.1.</b></p>



		<p>Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kesehatan secara bertahap,</p>
	<p><b>Sasaran 1.2</b> : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.</p>	<p><b>Strategi 1.2.2.</b></p> <p>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan secara merata,</p>
		<p><b>Strategi 1.2.3.</b></p> <p>Inovasi penyelenggaraan layanan Kesehatan berbasis teknologi.</p>
	<p><b>Sasaran 1.3</b> : Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat</p>	<p><b>Strategi 1.3.1.</b></p> <p>Penguatan komitmen secara afirmatif berupa pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat daerah.</p>
		<p><b>Strategi 1.3.2.</b></p> <p>Penguatan pemahan dan kesadaran mengenai kesetaraan gender kepada masyarakat melalui KIE KG berbasis Masyarakat.</p>
<p><b>Misi 5</b> : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</p>		
<p><b>Tujuan 1</b> :</p> <p>Menguatnya Karakter</p>	<p><b>Sasaran 1.1</b> : Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat.</p>	<p><b>Strategi 1.1.1.</b></p> <p>Promosi nilai-nilai budaya dan</p>



Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.		agama serta toleransi melalui berbagai media strategis.
		<b>Strategi 1.1.2.</b> Penyelenggaraan event seni dan budaya secara berkala.
		<b>Strategi 1.1.3.</b> Sosialisasi nilai-nilai budaya, agama dan toleransi sejak dini melalui integrasi dengan kurikulum sekolah.
	<b>Sasaran 1.2</b> : Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.	<b>Strategi 1.2.1.</b> Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat.
		<b>Strategi 1.2.2.</b> Peningkatan kerjasama dan pola hubungan lintas agama , lintas etnis secara berkelanjutan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

#### 2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan



apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan dituangkan dalam tema pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :



Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai Milestone pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2022-2026. Milestone yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Pada tahap implementasinya, arah kebijakan di atas diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan



mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

### **2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam table berikut :

**Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
1.	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Pertumbuhan Ekonomi
3.	Indeks Gini
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5.	Persentase Penduduk Miskin
6.	Indeks Infrastruktur
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8.	Indeks Pembangunan Manusia
9.	Indeks Kesalehan Sosial

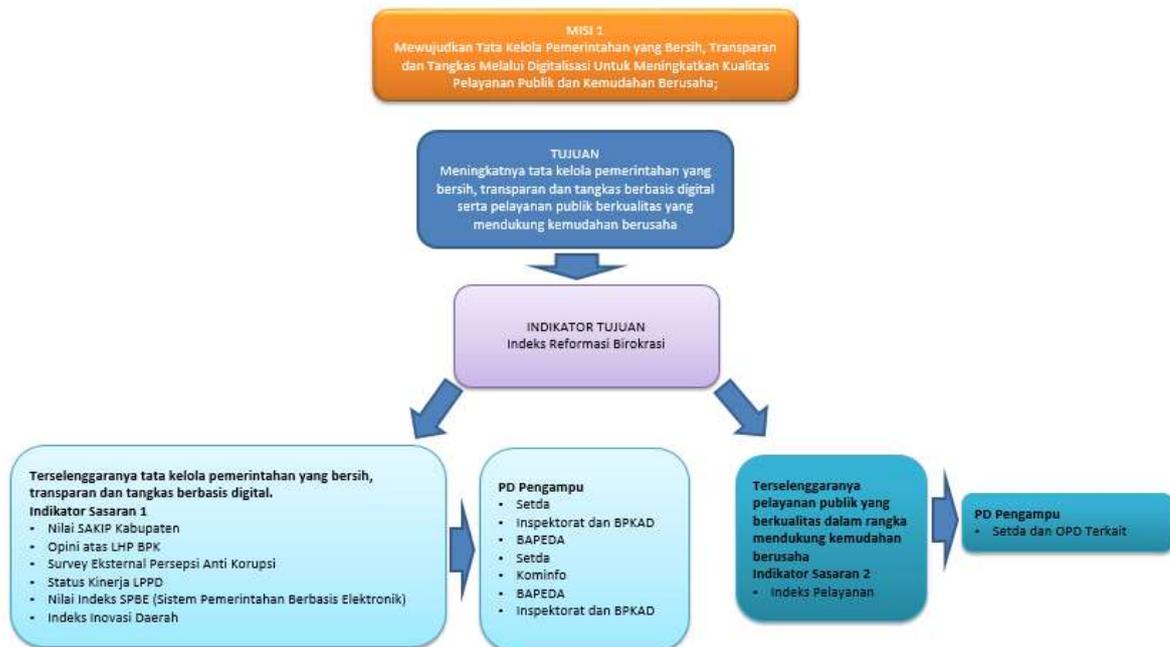
Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026



## 2.1.6 Cascading Kinerja

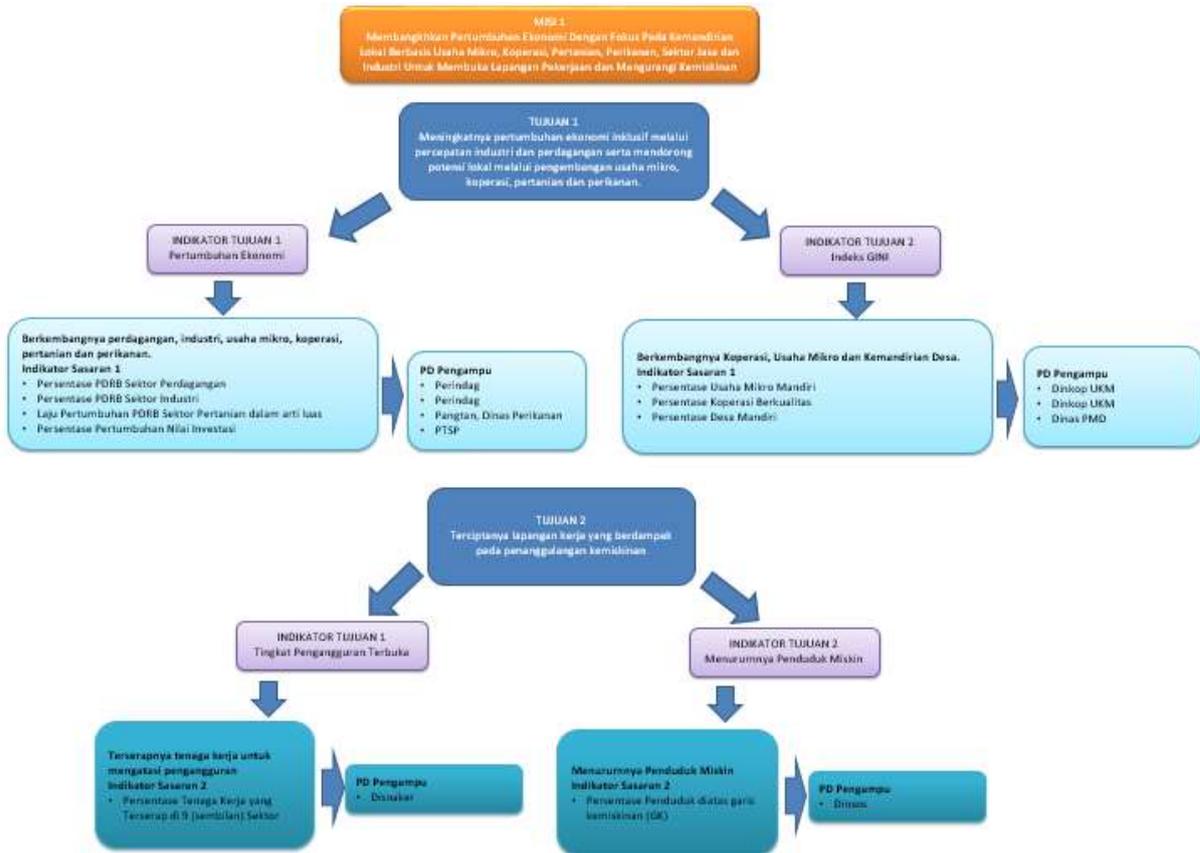
Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Sidoarjo menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

### a) Cascading Kinerja Misi 1

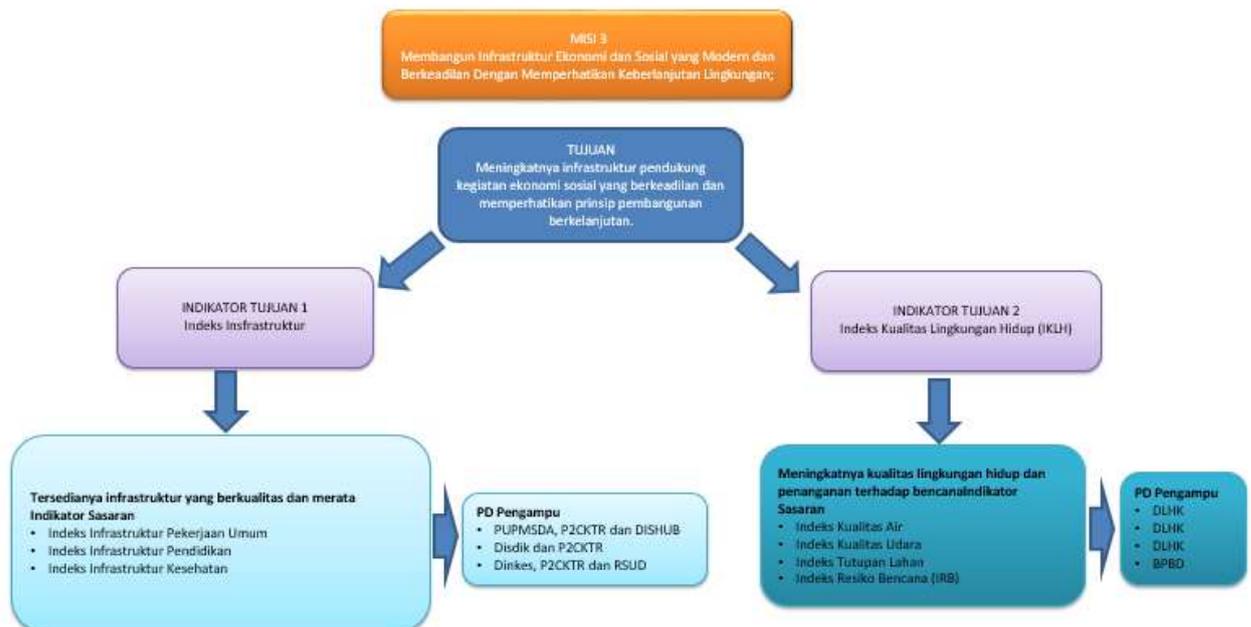




## b) Cascading Kinerja Misi 2

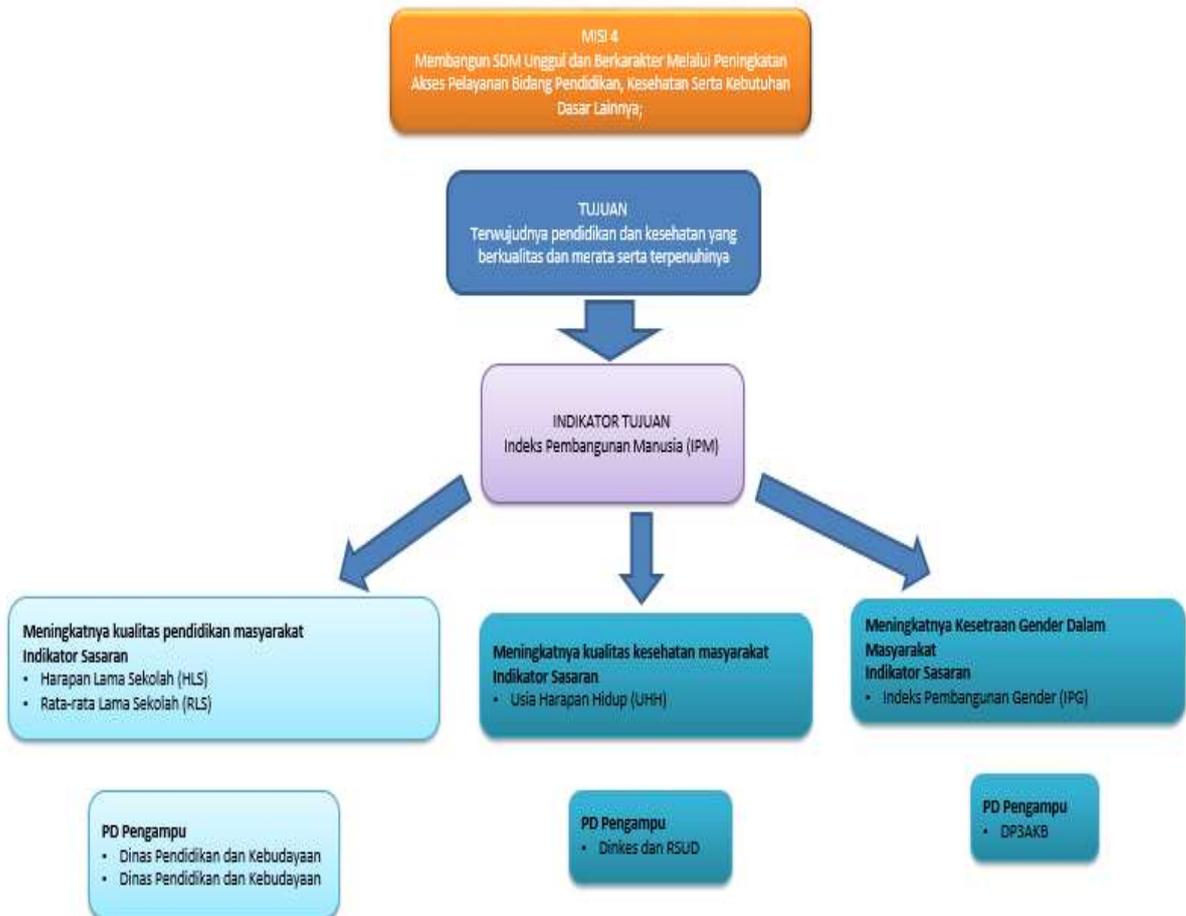


## c) Cascading Kinerja Misi 3



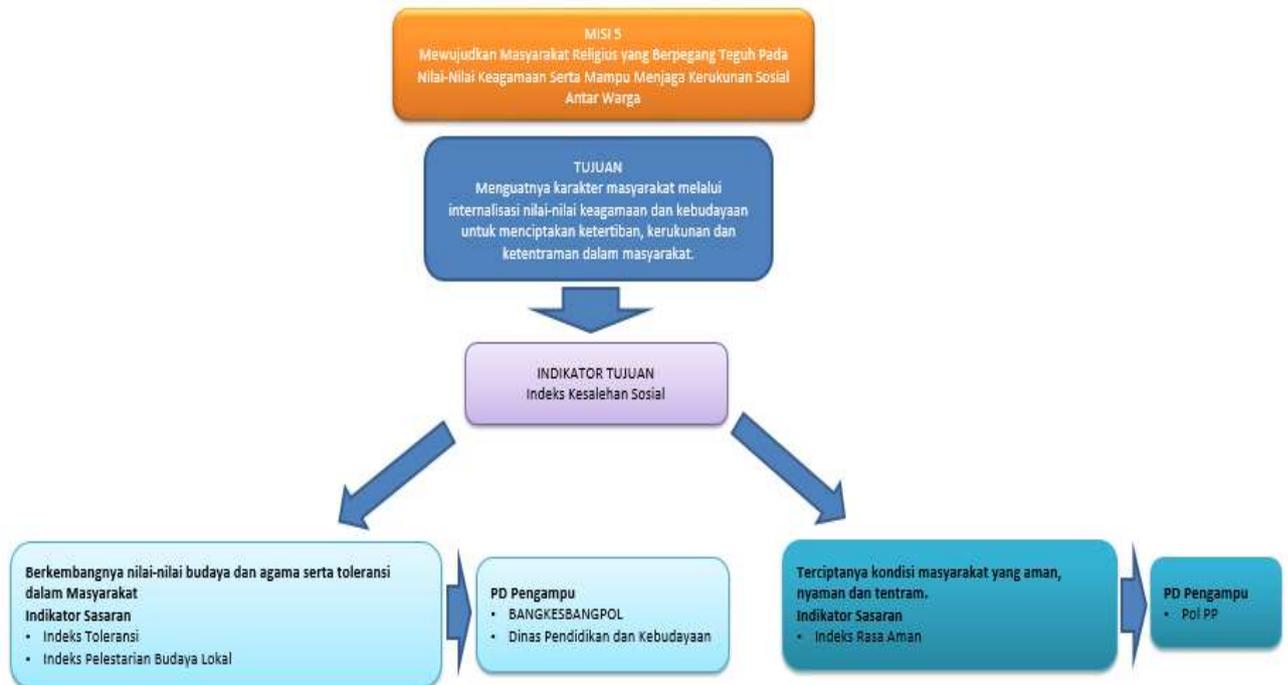


#### d) Cascading Kinerja Misi 4



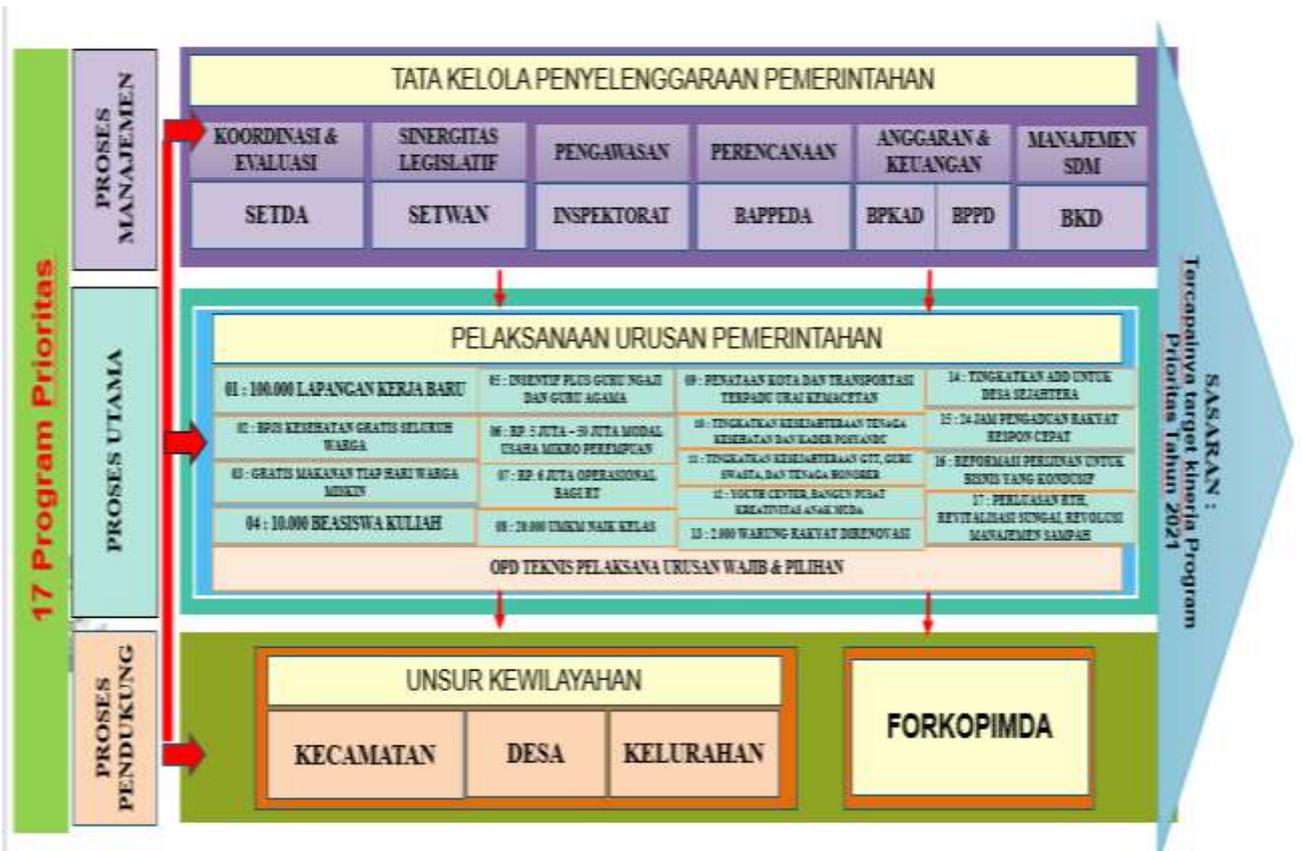


#### e) Cascading Kinerja Misi 5



#### 2.1.7 Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis maka akan mudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standart pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut diagram alur dari peta proses bisnis Kabupaten Sidoarjo baik BPMN (Bisnis Proses Model dan Notasi) maupun diagram level / tingkatannya. Bisnis Proses Model dan Notasi:



**Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis**

## 2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran



organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- c) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- d) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Sidoarjo di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Misi 1 :</b> <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas</b>		



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	<b>Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>		
	<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Opini Atas Laporan BPK	WTP
		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76
		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,35
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- Sangat Baik



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	<b>Misi 2 :</b> <b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>		
	<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	1,36
		Indeks Gini	0,359
3	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,17
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	52,29
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,77
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,92
4	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,93



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Koperasi Berkualitas	23,20
		Persentase Desa Mandiri	12,42
	<b>Tujuan 3 :</b> Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	10,39
		Persentase Penduduk Miskin	6,00
5	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,61
6	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,00
	<b>Misi 3 :</b> <b>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>		
	<b>Tujuan 4:</b> Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	0,762
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,80



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,754
		Indeks Infrastruktur Pendidikan	84,56
		Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Air	51,53
		Indeks Kualitas Udara	85,15
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,11
		Indeks Resiko Bencana	98,44
	<b>Misi 4 :</b> <b>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>		
	<b>Tujuan 5 :</b> Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,77
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,22



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,79
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,77
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,53
	<b>Misi 5 :</b> <b>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>		
	<b>Tujuan 6 :</b> Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	82,77
12	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi	78,68
		Indeks Pelestarian Budaya	60,55
13	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman	77,92



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kewajiban Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 menetapkan Visi : “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu hasil penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penyelenggaraan pembangunan yang dijabarkan dalam 23 urusan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 17 urusan wajib pelayanan non dasar), 6 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang telah dipetakan dalam Tujuan dan indikator Tujuan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2022. Dalam Laporan kinerja ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

##### **3.1.1 Skala Capaian Kinerja**

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan



kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>No</b>	<b>JUMLAH NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

### **3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan**



**Tabel 3. 2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2022**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA	
	<b>MISI 1</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>							
	<b>TUJUAN 1</b>	:	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha</b>						
	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Katagori</b>	<b>BB (70,1)</b>	<b>B (68,88)</b>	<b>98,26</b>	<b>Berhasil</b>	<b>MENPAN RB</b>	
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (80,1)	BB (78,96)	98,58	Berhasil	MENPAN RB
2.		Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil	BPK	
3.		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,76	85,63 (3,42)	90,96	Berhasil	KPK	
4.		Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi *)	100	Sangat Berhasil	BPKP	



		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,35	2,29	68,35	Cukup	MENPAN RB	
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	Sangat Berhasil	MENPAN RB	
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00	Sangat Berhasil	BPK	
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A- 4,5 Sangat Baik	A (4,57) Pelayanan Prima	101,5	Sangat Berhasil	MENPAN RB	
	<b>MISI 2</b>	<b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>								
	<b>TUJUAN 2</b>	:	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan</b>							
	<b>Indikator Tujuan :</b>	1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Angka</b>	<b>1,36</b>	<b>7,53</b>	<b>553,68</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	<b>BPS</b>	
		2.	<b>Indeks Gini</b>	<b>Indeks</b>	0,359	<b>0,373</b>	<b>96,25</b>	<b>Berhasil</b>	<b>BPS</b>	
3.	Berkembangnya Perdagangan,	1.	Persentase Kontribusi	%	16,17	16,41	101,48	Sangat Berhasil	BPS	



	Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan		PDRB Sektor Perdagangan						
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	52,29	50,02	95,66	Berhasil	BPS
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,77	2,27	81,95	Cukup	BPS
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,92	5,26	571,75	Sangat Berhasil	BKPM
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	1,93	1,93	100,00	Sangat Berhasil	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	23,20	23,33	100,56	Sangat Berhasil	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro
		3.	Persentase Desa Mandiri	%	12,42	22,67	182,53	Sangat Berhasil	KEMENDES
	<b>TUJUAN 3</b>	<b>:</b>	<b>Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan</b>						
	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>1.</b>	<b>Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)</b>	<b>%</b>	<b>10,39</b>	<b>8,8</b>	<b>115,30</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	<b>BPS</b>



		2.	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	%	6	<b>5,36</b>	<b>110,67</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	<b>BPS</b>
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	89,61	91,2	101,77	Sangat Berhasil	BPS
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	94,00	94,64	100,68	Sangat Berhasil	BPS
	<b>MISI 3</b>	<b>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>							
	<b>TUJUAN 4</b>	:	<b>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>						
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,762</b>	<b>0,792</b>	<b>103,94</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	<b>BPS</b>
		2.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Indeks</b>	<b>59,80</b>	<b>57,54</b>	<b>96,22</b>	<b>Berhasil</b>	<b>BPS</b>
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,754	0,783	103,85	Sangat Berhasil	BAPPEDA



		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	84,56	84,32	99,72	Berhasil	BAPPEDA
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	71,13	77,13	108,44	Sangat Berhasil	BAPPEDA
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,53	47,75	92,66	Berhasil	DLHK
		2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,15	84,96	99,78	Berhasil	DLHK
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,11	23,63	87,16	Cukup	DLHK
		4.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	98,44	98,73	100,29	Sangat Berhasil	BNPB
	<b>MISI 4</b>	<b>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>							
	<b>TUJUAN 5</b>	:	<b>Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya</b>						
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>80,77</b>	<b>81,02</b>	<b>100,3</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	<b>BPS</b>
9.	Meningkatnya Kualitas	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,22	14,95	98,23	Berhasil	BPS



	Pendidikan Masyarakat	2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,79	10,77	99,81	Berhasil	BPS
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,77	74,36	99,45	Berhasil	BPS
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,53	94,68	100,16	Sangat Berhasil	BPS
	<b>MISI 5</b>	<b>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>							
	<b>TUJUAN 6</b>	:	<b>Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</b>						
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	<b>Indeks</b>	<b>82,77</b>	<b>84,23</b>	<b>102</b>	Sangat Berhasil	<b>Bappeda</b>
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	Indeks	78,68	81,30	103,3	Sangat Berhasil	<b>Bappeda</b>
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	60,55	90,46	149	Sangat Berhasil	<b>Bappeda</b>
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang	1.	Indeks Rasa Aman	Indeks	77,92	80,77	103,7	Sangat Berhasil	<b>Bappeda</b>



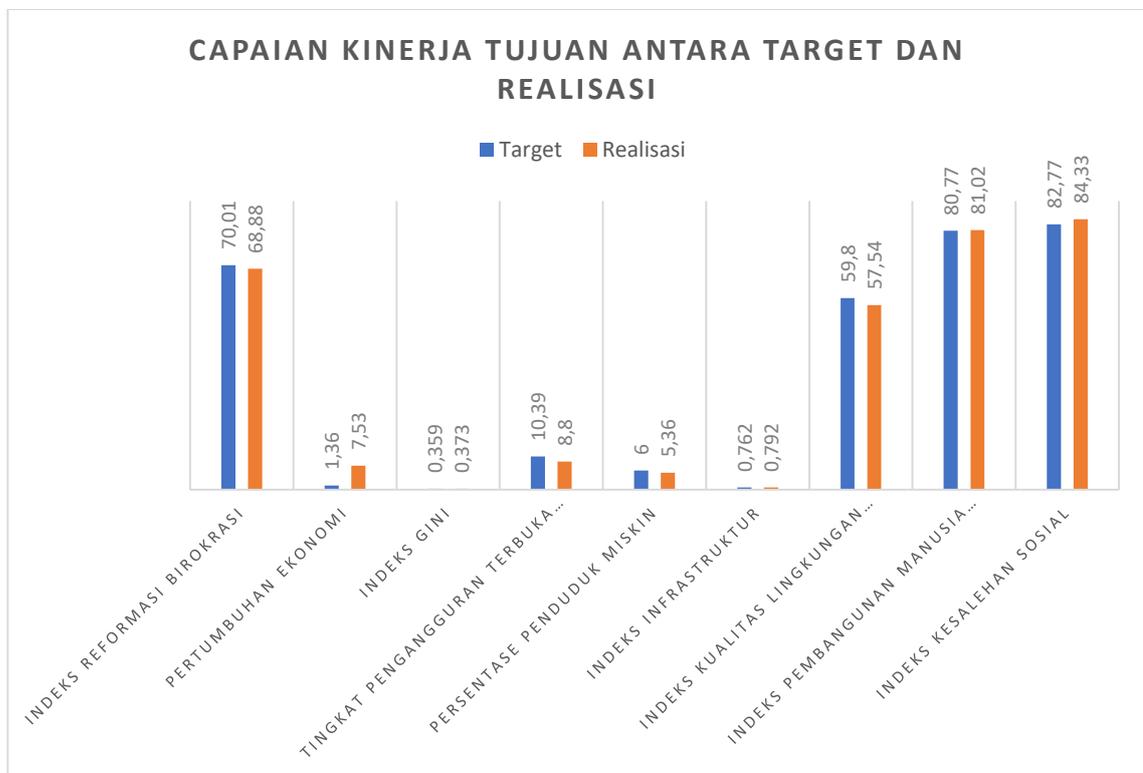
aman, nyaman dan tentram									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**KETERANGAN :**

\*) Data belum dirilis dan menggunakan data realisasi tahun sebelumnya



Pada table diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022, dari 6 tujuan dengan 9 Indikator Tujuan, 6 Sangat Berhasil dan 3 indikator dalam katagori Berhasil, Namun demikian jika dirata-rata capaian kinerja tujuan adalah 152,93% atau masih dalam katagori Sangat Berhasil. Sedangkan dari 13 sasaran dengan 31 indikator sasaran, ada 20 indikator sasaran Sangat Berhasil, 8 katagori Berhasil dan 3 indikator dalam katagori Cukup, kalau dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 117,53% atau masih dalam katagori Sangat Berhasil. Dengan demikian jika dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran dengan 9 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 125,49%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sudah Sangat Berhasil. Berikut grafik data capaian tujuan dan indicator tujuan sebagai berikut :





**Tabel 3. 3 Capaian dan Tingkat Keberhasilan Tujuan Tahun 2022**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB (70,1)	B (68,88)	98,26	Berhasil	MENPAN RB
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan	2. Pertumbuhan Ekonomi	Angka	1,36	7,53	553,68	Sangat Berhasil	BPS
		3. Indeks Gini	Indeks	0,359	0,373	96,25	Berhasil	BPS
3	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	4. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	10,39	8,8	115,30	Sangat Berhasil	BPS
		5. Persentase Penduduk Miskin	%	6	5,36	110,67	Sangat Berhasil	BPS
4	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	6. Indeks Infrastruktur	Indeks	0,762	0,792	103,94	Sangat Berhasil	BAPPEDA
		7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,80	57,54	96,22	Berhasil	K LHK
5	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,77	81,02	100,3	Sangat Berhasil	BPS



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
6	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	9. Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,77	84,23	102	Sangat Berhasil	BAPPEDA

Adapun penjelasan capain kinerja tahun 2022 dari setiap tujuan sebagai berikut:

**1. Tujuan Pertama, Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.**

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, target Tahun 2022 adalah BB (70,1) dan realisasinya B (68,88) dengan persentase capaian 98,26% artinya masih belum tercapai, walaupun sudah mengalami peningkatan sebesar 1,22 dari capaian tahun 2021 dengan nilai 67,66. Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

- a) Terus melakukan penerapan digitalisasi sebagai bentuk penguatan implementasi SPBE, diantaranya melalui aplikasi E-Buddy yaitu penggunaan tandatangan elektronik (BSRE) untuk persuratan sampai ke level seluruh desa dan sekolah negeri mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang dan terus mengembangkan untuk kemudahan pelaksanaan bekerja yang tak terbatas tempat



- dan waktu (FWA) dalam mempercepat layanan administrasi di Kabupaten Sidoarjo;
- b) Melakukan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan pembinaan pola pikir kepada seluruh ASN untuk perubahan pola kerja sesuai Core Values Ber-AKHLAK;
  - c) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi, SAKIP dan implementasi Core Values Ber-AKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”, dan ini sudah dilakukan pengukuran yang bekerjasama dengan Trainer ICT untuk mengoptimalkan sejauh mana seluruh pegawai telah memahami budaya kerja yang dimiliki;
  - d) Melakukan penguatan terhadap para Agen Perubahan dan mendorongnya untuk menyusun rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dampak hasil inovasi yang telah dibuatnya;
  - e) Melakukan evaluasi secara berkala atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menunjang Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
  - f) Melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan. Hasil evaluasi kelembagaan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti untuk perwujudan organisasi yang semakin baik, ramping dan memangkas jabatan yang tidak menunjang kinerja organisasi antara lain jabatan caraka, petugas keamanan, petugas kebersihan dan pengadministrasi guna menunjang pencapaian efisiensi 30% belanja pegawai sebagaimana amanah UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - g) Menyusun kebijakan sistem kerja, dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri PANRB No/:aor 7 Tahun 2022 tentang



Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- h) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peta proses bisnis hingga SOP yang dimiliki dengan memastikan bahwa peta proses bisnis yang ada telah mampu membantu menyelesaikan isu strategis dan meningkatkan kualitas kinerja utama organisasi;
- i) Melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai. Hasil assesment tersebut akan dijadikan sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga akan memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki untuk manajemen ASN di Kabupaten Sidoarjo;
- j) Mengimplementasikan kebijakan manajemen talenta dengan memanfaatkan hasil assesment pada setiap pegawai sebagai bagian dalam penyusunan rencana sukses dan rencana pengembangan kompetensi kedepan;
- k) Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan hasil assesment yang dilakukan kepada seluruh pegawai dan rencana pengembangan kompetensi tersebut akan dilaksanakan dan dilakukan pemantauan untuk melihat sejauh mana rencana pengembangan kompetensi ASN dapat terlaksana dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi;
- l) Menerapkan Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Negara untuk dilakukan di setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- m) Memperkuat penerapan implementasi SAKIP sebagai bagian dari area akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan reviu dan perbaikan penjabaran kinerja dari level pimpinan hingga individu dengan mengacu pada Peraturan



Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan kinerja;

- n) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh (APIP) sebagai quality assurance and consulting, utamanya dalam mendampingi dan monitoring penerapan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah;
- o) Melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengawasan internal yang telah ada kepada seluruh individu di setiap perangkat daerah.
- p) Mendorong unit kerja yang sudah memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM untuk melakukan sharing knowledge kepada unit kerja yang baru dibangun maupun akan diusulkan sehingga memiliki pemahaman dan kualitas yang sama. Selain itu, inspektorat selaku tim penilai internal akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada unit yang akan diusulkan guna melihat sudah sejauh mana kualitas pembangunan yang telah dilakukan sebelum diajukan untuk dinilai oleh tim penilai nasional;
- q) Mendorong keterlibatan stakeholder dan pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai alat reviu guna melihat bagaimana kualitas pelayanan publik yang sudah dilakukan agar mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;
- r) Terkait dengan kualitas hasil antara, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan pengawalan berupa koordinasi kepada setiap instansi leading sector yang mengawal hasil antara guna meningkatkan kualitas dari penilaian hasil antara yang sudah ada

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan pertama yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang



Mendukung Kemudahan Berusaha, yang didukung dengan dua sasaran, meliputi:

- a) Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.

**Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Pertama, Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA	
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (80,1)	BB (78,96)	98,58	Berhasil	MENPAN RB
		2	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil	BPK
		3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,76	85,63 (3,42)	90,96	Berhasil	KPK
		4	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi *)	100	Sangat Berhasil	BPKP
		5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,35	2,29	68,35	Cukup	MENPAN RB
		6	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	Sangat Berhasil	MENPAN RB
		7	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00	Sangat Berhasil	BPK

Sebagaimana table diatas, dapat diketahui bahwa dari 7 indikator didapat 4 indikator sudah memenuhi target dengan katagori Sangat Berhasil, dan 3 indicator belum menuhi target, yaitu pada indicator Nilai SAKIP Kabupaten, Survey Eksternal Persepsi



Korupsi dan Nilai Indeks SPBE. Adapun penjelasan capaian pada setiap indikator dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Nilai SAKIP Kabupaten

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB, Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah 78,96 atau kategori “BB”, sedangkan target Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah “A” atau 80,1. Artinya Belum Tercapai. Namun demikian, untuk bisa mencapai nilai “A” masih membutuhkan 1,04 poin. Belum tercapainya Nilai SAKIP Kabupaten tersebut disebabkan adanya perubahan bobot dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Jadi dalam hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level PD. Namun demikian dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Sidoarjo kedepan, maka beberapa hal yang akan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu baik pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan untuk memastikan bahwa sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut telah selaras dari perencanaan jangka menengah hingga perencanaan tahunannya, berorientasi hasil, dan memiliki indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan



- memenuhi unsur cukup untuk mengukur capaian kinerja strategis;
- b. Melakukan reviu atas cascading kinerja yang sudah disusun sebelumnya dengan memperhatikan isu strategis, kerangka logis, potensi crosscutting baik antar PD maupun antar bidang, maupun CSF yang telah dipetakan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian kondisi akhir yang diinginkan. Proses reviu dan perbaikan atas cascading kinerja tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Memastikan bahwa data kinerja yang akan digunakan dapat tergambar lebih spesifik, jelas definisi operasionalnya, jelas formulasi penghitungan, dan jelas asal sumber datanya. Sehingga Ketika akan mengukur capaian kinerja atas sasaran maupun tujuan yang dikawal oleh indikator kinerja tersebut dapat semakin andal dan menggambarkan kesuksesan atas pencapaian tujuan maupun sasaran strategis baik di level pemerintah daerah maupun PD;
  - d. Mengintegrasikan aplikasi e-Monev, e-Kenda, e-Kinerja yang sudah ada sebelumnya dengan sistem perencanaan dan sistem keuangan yang dimiliki sehingga monitoring dan evaluasi atas seluruh proses kinerja baik dari level kinerja organisasi sampai kinerja individu dapat mudah dan lebih baik;
  - e. Memaksimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi kinerja kedepan, penentuan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja, maupun sebagai alat pertimbangan dalam melakukan mutasi rotasi pada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;



- f. Laporan kinerja pemerintah daerah maupun PD akan menginformasikan secara lengkap terkait hasil analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja dan upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala untuk mencapai kinerja;
- g. Menjadikan capaian indikator kinerja baik yang belum berada di kategori berhasil maupun yang sudah berada di atas kategori tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
- h. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan temuan dan rekomendasi akan semakin konkrit, menysasar langsung pada akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap PD;
- j. Memastikan bahwa semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti oleh seluruh PD sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja, khususnya pada tingkat penganggaran terbuka.

## 2. Opini Atas Laporan BPK

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tercatat sudah sembilan kali berturut-turut menerima opini



WTP. Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, melakukan upaya yaitu:

- a. Pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIKSDA menjadi terintegrasi dengan RDS (Regional Development Sistem).
- b. Penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- c. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya:

- a. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo), dalam rangka



- proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
  - d. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
  - e. Optimalisasi tatakelola barang persediaan atau barang pakai habis berbasis akrual.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan. Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik, transparan dan akuntabel, menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga opini WTP dari hasil audit BPK dapat dipertahankan.

### 3. Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Tujuan survei persepsi korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka



peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

**Tabel 3. 5 Nilai Persepsi Korupsi**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 -1,75	25 - 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

Hasil Survey Eksternal Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 mendapatkan nilai 85,63 atau (dikoversi 3,42) dari yang ditetapkan sebesar 3,76, sehingga tercapai 90,96 persen, artinya nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 masih belum tercapai sebagaimana target yang ditetapkan. Namun demikian, nilai capaian tersebut sudah masuk pada katagori mutu pelayanan type “A” atau mendekati BERSIH DARI KORUPSI, ini akan dipertahankan dengan terus membina seluruh unit penyelenggara pelayanan publik untuk mengoptimalkan menuju zona integritas WBK dan WBBM, yang saat ini memperoleh dua Perangkat Daerah memperoleh WBBM, dan lima Perangkat Daerah memperoleh WBK.

#### 4. Status Kinerja LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah



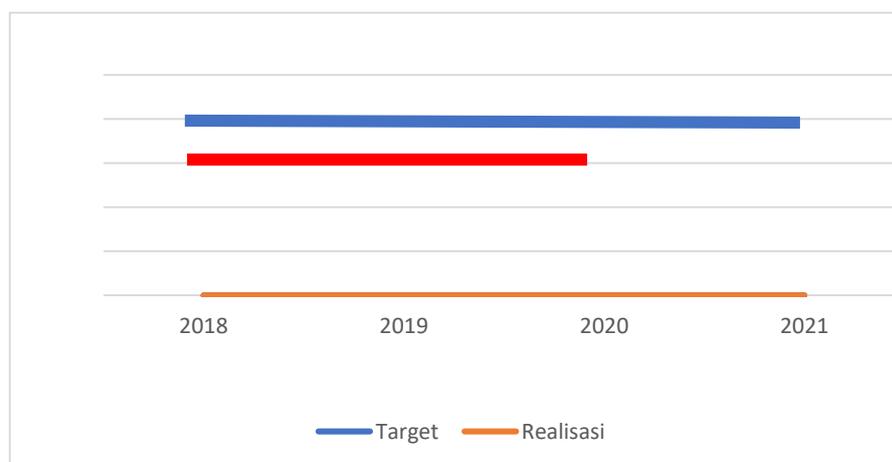
berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Target Kinerja Sasaran dengan Indikator Nilai Kinerja EKPPD Kabupaten Sidoarjo dengan realisasi capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Tabel Trend Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator Kinerja Sasaran	Nilai Kinerja EKPPD	
	Target	Realisasi
Tahun 2018	ST	ST
Tahun 2019	ST	ST
Tahun 2020	ST	*)
Tahun 2021	ST	*)
<b>Tahun 2022</b>	<b>ST</b>	<b>*)</b>

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 belum dirilis oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik:

**Grafik 3.1 Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo**





Untuk menjaga tren positif atas Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan beberapa program prioritas pendukung sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan serta Program Perekonomian dan Pembangunan. Program ini diampu oleh Sekretariat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:
  1. Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) sebenarnya telah berjalan baik, namun dengan terbitnya Permengadri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permengadri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian didetailkan pada Permendari Nomor 77 Tahun 2020, seluruh Pemda wajib menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) milik Kemendagri. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kabupaten Sidoarjo telah 100% menerapkan SIPD dalam proses pembangunan daerah, namun demikian dalam implementasinya secara penuh menunggu hasil penyempurnaan SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri
  2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan target mencapai 90 % dari total. Nilai diupayakan akan dipertahankan dan pencapaian ini masih dapat ditingkatkan lagi melalui pendampingan dan pemahaman proses penganggaran



dan perencanaan target kerja di masing-masing perangkat daerah.

b. Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian program ini pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD dilakukan secara lebih optimal, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mendasarkan perencanaannya pada analisis kebutuhan atau urgensi. Dengan demikian hasil pembangunan diharapkan dapat secara langsung dirasakan masyarakat.
2. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah di masing-masing perangkat daerah yang berjumlah 48, mengalami peningkatan, dan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan terus dilakukan serta dioptimalkan

c. Program Penyelenggaraan Pengawasan. Program ini diampu oleh Inspektorat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti mencapai 100% untuk tahun 2022 ini.
2. Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat yang ditindaklanjuti oleh OPD meningkat menjadi 88,76%.

Tingkat kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi menunjukkan bahwa pemahaman pelaksanaan administrasi keuangan berjalan baik dan menjadi budaya berkinerja secara lebih baik.

##### 5. Nilai Indeks SPBE



Nilai Indeks SPBE merupakan nilai yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan indikator ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis e government serta memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Sebagaimana tabel tersebut diatas, bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 memperoleh nilai 2,29 dari target 3,35. atau tercapai 68,35% dengan katagori Cukup. Apabila dibandingkan dengan capain tahun 2021 sebesar 2,37 maka terjadi penurunan sebesar 0,08. Sebagai tindaklanjut dan upaya Kabupaten Sidoarjo dalam penguatan penerapan SPBE adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun draft Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sidoarjo direncanakan pada program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- b) Melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun data dukung seluruh indikator sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.



Sosialisasi dan penguatan implementasi SPBE dengan deputi Ketatalaksanaan KemenpanRB yang rencanakan pada tribulan I tahun 2023 ini

#### 6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 tercapai Sangat Inovatif sesuai dengan yang ditargetkan. Keberhasilan ini karena upaya keras Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam usahanya meningkatkan kualitas pelayanan public. Masing-masing perangkat daerah melalui para agen perubahan didorong terus untuk selalu berinovasi. Sudah banyak penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Sidoarjo baik ditingkat Provinsi maupun Nasional. Total inovasi yang sudah dilaksanakan pendampingan ke Inovative Government Award yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri di lingkungan Kabupaten Sidoarjo terdapat 106 Inovasi dan yang sudah memperoleh nilai diatas 90 ada 64 inovasi, dan total nilai indeks inovasi Kabupaten Sidoarjo adalah 60,25 dengan kategori sangat inovatif. Berikut beberapa penghargaan terkait inovasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Penghargaan dari MNC Portal Indonesia sebagai Best Leadership Based on Potential Area dalam ajang Indonesia Visionary Leader 2022 (IVL), Senin 05 September 2022, di Jakarta;
- b. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Nasional dari Kemenpan RB, di Jakarta;
- c. Penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jatim Tahun 2022 melalui Peduli Dilan (Peduli Disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Lanjut Usia) oleh Kemenpan RB, di Madiun;
- d. Penghargaan Innovative Government Awards (IGA) kategori Kabupaten Sangat Inovatif dalam Acara Penghargaan



Innovative Government (IGA), di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri.

#### 7. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 tercapai Level 3 Terdefinisi dan sesuai target yang ditetapkan yaitu Level 3 Terdefinisi. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan dan sudah memenuhi target sebagaimana diamanatkan pada RPJMN.

b) Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

**Tabel 3.8 Capaian Sasaran Kedua, Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A- (4,5)  Sangat Baik	A (4,57)  Pelayanan Prima	101,5	Sangat Berhasil	MENPAN RB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian



pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 mendapatkan nilai 4,57 atau dengan katagori “A” Pelayanan Prima, dari target “A-“ atau Sangat Baik sehingga persentase capaiannya 101,5% atau Sangat Berhasil. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 4,27 atau “A-“, maka mengalami peningkatan 0,30. Hal ini karena upaya yang serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih baik dengan berbagai inovasi dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Kabupaten Sidoarjo saat ini memiliki 2 Mal Pelayanan Publik, satu didalam Kota Sidoarjo dan satu di Kecamatan Sukodono. Inovasi-inovasi terus dikembangkan dan saat ini juga telah dikembangkan Mal Online dengan aplikasi yang diberi nama Si-PRAJA.

## **2. Tujuan Kedua, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.**

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan, dengan 2 indikator tujuan yaitu 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Indeks Gini.

### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

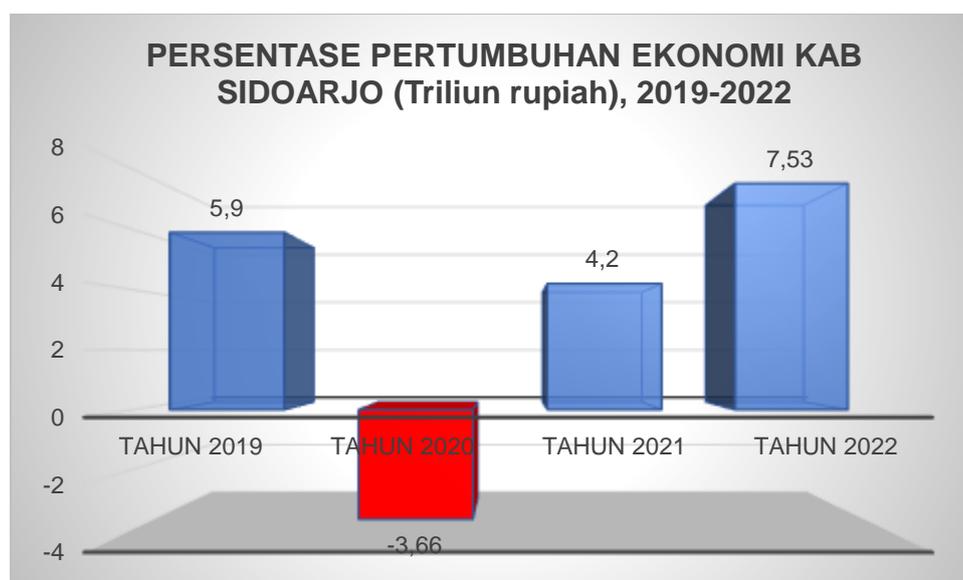
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 terealisasi sebesar 7,53 dari target 1,36. artinya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 telah mencapai target dengan capaian 553,68% atau katagori Sangat Berhasil dan tertinggi nomor dua di Jawa Timur.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami percepatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,21 persen. Menilik



dari masing-masing kategori lapangan usaha, percepatan ini terjadi terutama di kategori transportasi dan pergudangan, dari 3,14 persen di 2021 menjadi 45,32 persen di 2022. Begitu pula dengan kategori pada jasa lainnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,13 persen. Berdasarkan pengeluaran, pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo pada 2022 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yaitu berturut-turut sebesar 58,20 persen dan 30,58 persen. Berikut grafik perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 – 2022 :

**Grafik 3.2: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo 2019 - 2022**



Sumber data Sidoarjo dalam angka 2023 (BPS)

Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam percepatan pertumbuhan ekonomi melalui project strategis Bupati dan Wakil Bupati antara lain dengan penguatan UMKM melalui pemberian kredit usaha rakyat (KURMA) RP. 5 JUTA-50 JUTA MODAL USAHA MIKRO PEREMPUAN, Program BUMD BPR Delta Arta melalui KURDA Bungan ringan, pembukaan 100.000 lapangan kerja yang besar-besaran, program 20.000 UMKM NAIK KELAS, dan pertumbuhan nilai investasi melalui pemberian kemudahan-



kemudahan pada para investor untuk berinvestasi baik PMA maupun PMDN.

b. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 menargetkan Indeks Gini sebesar 0,359 dan terealisasi sebesar 0,373 artinya belum berhasil karena angka tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan, atau mencapai 96,25 persen. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini diataranya dengan penguatan koperasi, UMKM, penyediaan lapangan kerja yang luas dan termasuk penguatan peran BUMDES dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat desa, dengan mengoptimalkan pada program koperasi dan usaha mikro mandiri, serta penguatan pada program pemberdayaan masyarakat desa salah satunya penguatan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan BUMDES Mandiri melalui koordinasi serta monitoring dan evaluasi yang intensif, khususnya dengan Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD), terus ditingkatkan untuk mendorong pencapaian indeks gini. Demikian pula dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, khususnya kepada lembaga ekonomi masyarakat pedesaan, juga membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk pencapaian tujuan kedua, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan, telah didukung 2 sasaran yaitu Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan serta Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa yang dijelaskan sebagai berikut:



- a) Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan

**Tabel 3.9: Capaian Sasaran Ketiga, Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA	
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,17	16,41	101,48	Sangat Berhasil	BPS
		2	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	52,29	50,02	95,66	Berhasil	BPS
		3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,77	2,27	81,95	Cukup	BPS
		4	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,92	5,26	571,75	Sangat Berhasil	BKPM

1. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Pada tahun 2022 kontribusi PDRB Sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo adalah 16,41%. Apabila dibandingkan dengan target 16,17.% maka tercapai 101,48%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 16,83% maka terdapat penurunan sebesar 0,42 atau sekitar 2,5%.

2. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri

Pada tahun 2022 kontribusi PDRB Sektor Industri di Kabupaten Sidoarjo adalah 50,02%. Apabila dibandingkan dengan target 51,97% maka tercapai 95,66%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 52,29% maka terjadi penurunan angka 1,95 atau sekitar 3%.



3. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.  
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 terealisasi 2,27 dari target 2,77 sehingga capaiannya didapat sebesar 81,95% artinya belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Kalau dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas tahun 2021 sebesar -0,08 telah mengalami peningkatan sebesar 2,35. Walaupun kontribusi sector ini kecil, namun keberadaannya tidak bisa dielakkan karena pertanian merupakan mata pencaharian yang paling banyak pada masyarakat Sidoarjo.

#### 4. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

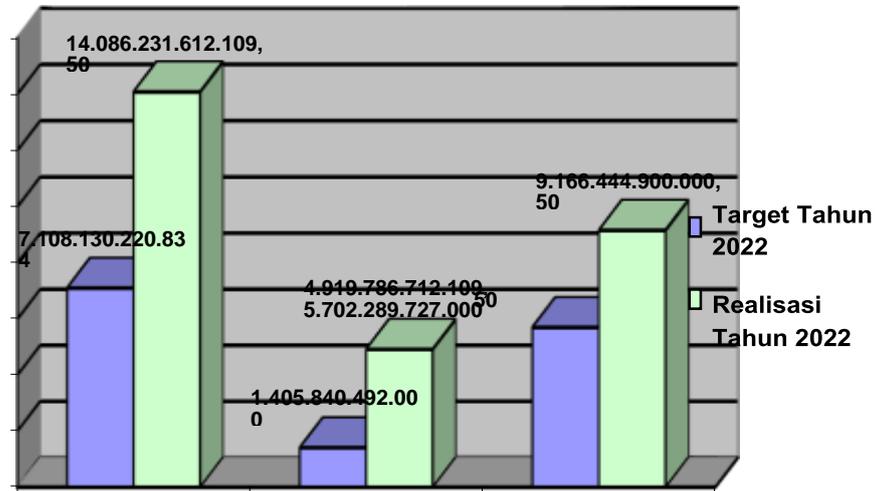
Pertumbuhan Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,26 dari target yang ditetapkan 0,92 sehingga capaian pertumbuhannya sebesar 571,74%. Hal tersebut berdasarkan data Nilai Investasi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 senilai Rp. 14.086.231.612.109,5 dari target Rp. 7.108.130.220.834 maka tercapai 198,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu senilai Rp. 9.773.158.275.830 maka terdapat peningkatan senilai Rp. 4.313.073.336.279,5 atau sekitar 44,13%. Sedangkan nilai investasi pada tahun 2021 bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 7.037.752.693.895 maka terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.735.405.581.935.038,87 atau 38,87 sehingga Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 didapat 5,26%.

Nilai Investasi senilai Rp. 14.086.231.612.109,5 terdiri dari PMA terealisasi sebesar Rp. 4.919.786.712.109,5 dari target sebesar Rp. 1.405.840.492.000 atau 349,95% dan Investasi PMDN terealisasi sebesar Rp. 9.166.444.900.000,5



dari target sebesar Rp. 5.702.289.727. 000 atau 160,75 %. Berikut dalam grafik dapat digambarkan sebagai berikut :

**Grafik 3.3: Realisasi Nilai Investasi Daerah Tahun 2022**



Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

- Mengoptimalkan keberadaan MPP untuk memberikan fasilitas kepada pelaku usaha prioritas menunjang penanaman modal melalui “Prime Service” yang bertempat MPP;
- Mengoptimalkan SIPADU dalam memberikan layanan melalui system pelayanan perijinan terpadu yang belum dijangkau oleh system OSS pusat;
- Mengoptimalkan program penanaman modal salah satunya pelaksanaan temu usaha;
- Mengoptimalkan FGD;
- Mengoptimalkan sosialisasi dilakukan melalui pendampingan pelaku usaha;
- Mengoptimalkan jemput bola ke kecamatan;
- Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan temu usaha, FGD, sosialisasi dan jemput bola.



b) Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.

**Tabel 3.10: Capaian Sasaran Keempat Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1. Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	1,93	1,93	100,00	Sangat Berhasil	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2. Persentase Koperasi Berkualitas	%	23,20	23,33	100,56	Sangat Berhasil	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		3. Persentase Desa Mandiri	%	12,42	22,67	182,53	Sangat Berhasil	KEMENDES

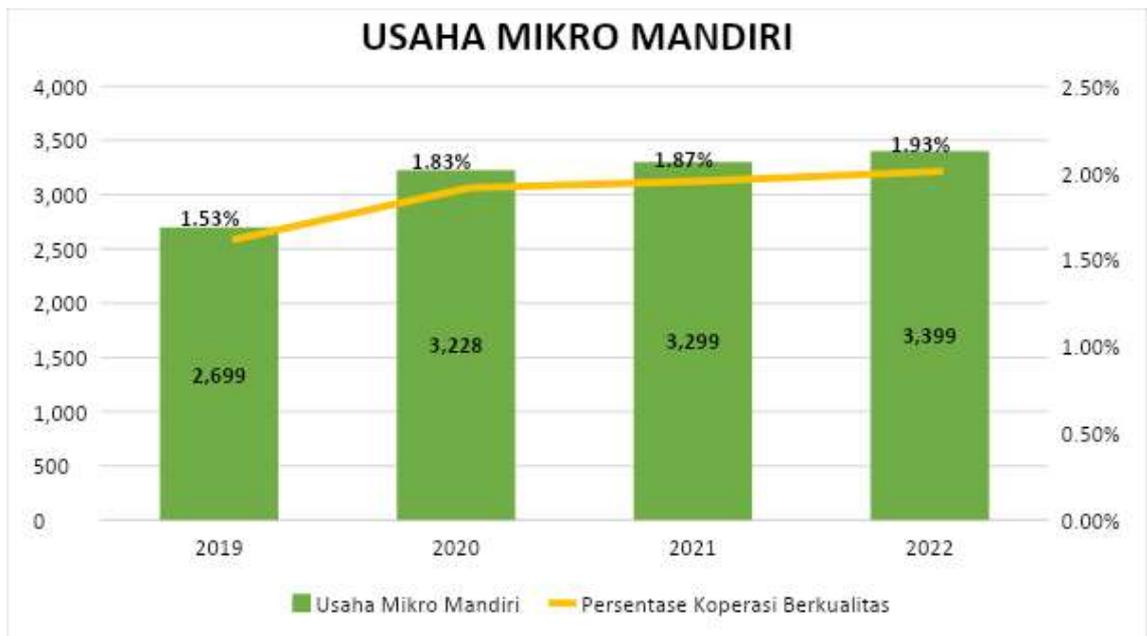
#### 1. Persentase Usaha Mikro Mandiri

Pada tahun 2022 jumlah usaha mikro yang mandiri di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.399 usaha mikro setara dengan 1,93% dari total keseluruhan 176.425 usaha mikro sehingga tercapai 100% dari target 1,93%. Perbandingan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 1,87% atau sebanyak 3.299 usaha mikro sehingga terdapat peningkatan sebanyak 0,056% atau setara 100 usaha mikro. Meskipun target tahun 2022 sudah tercapai, namun keterbatasan SDM dan sarana prasarana sehingga antara usaha mikro yang dengan fasilitas



peningkatan usaha mikro tidak seimbang. Namun demikian hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pelayanan dan pendampingan usaha mikro contohnya melalui fasilitasi NIB gratis, pendampingan, pelatihan secara online maupun offline dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu. Adapun perkembangan jumlah usaha mikro yang mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 3.4 Usaha Mikro Mandiri**



Usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2022, terbanyak adalah dari kelompok usaha mikro, sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Klasifikasi Usaha Mikro**

NO	KLASIFIKASI USAHA MIKRO	PRESENTASE
1.	PERDAGANGAN	48,18%
2.	KULINER	30,03%
3.	JASA	9,05%
4.	LAIN-LAIN	6,93%
5.	FASHION	4,19%
6.	AGRIBISNIS	1,27%



Upaya yang dilakukan agar semakin banyak usaha mikro yang masuk kategori usaha mikro yang mandiri, yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, perizinan, dan pengelolaan usaha.
- b. Menyediakan pendampingan usaha mikro melalui klinik usaha mikro dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.
- c. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sosialisasi bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan.
- d. Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk pameran, fasilitasi kemitraan dan jaringan usaha.
- e. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS) dan lembaga lainnya.

## 2. Persentase Koperasi Berkualitas

Pada tahun 2022 jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 343 koperasi setara dengan 23,20% dari total keseluruhan 1.470 koperasi sehingga tercapai 100% dari target 23,20%. Perbandingan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 21,84% atau sebanyak 321 koperasi sehingga terdapat peningkatan sebanyak 1,36% atau setara 22 koperasi. Untuk tahun 2023 diperkirakan jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo akan bertambah. Hal ini seiring dengan dinamika perekonomian regional dan adanya regulasi kemudahan pembentukan koperasi. Meskipun target tahun 2022 sudah tercapai, namun sebagian besar koperasi belum mampu mengembangkan usahanya karena keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut ke depan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan peningkatan usaha koperasi.



Adapun perkembangan jumlah koperasi yang berkualitas dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 3.5: Koperasi Berkualitas**



Upaya yang dilakukan agar semakin koperasi yang masuk kategori koperasi berkualitas, yaitu:

- Memberikan fasilitas izin usaha koperasi melalui sosialisasi dan pendampingan usaha
- Meningkatkan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi
- Memberikan fasilitas pemasaran produk koperasi
- Menyediakan klinik konsultasi koperasi
- Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi

### 3. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta



penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Pengukuran status desa diformulasikan melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu sebuah indeks komposit (kombinasi) yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. Desa di Kabupaten Sidoarjo yang berstatus Desa Mandiri di Tahun 2022 sebanyak 73 Desa dari 322 Desa yang ada atau tercapai 22,67% dari target 12,42% atau 40 desa, sehingga capaian 182,91%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 10,25% atau 33 desa, maka terdapat peningkatan angka 40 desa atau sekitar 12,42%. Desa yang berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun 2022, antara lain :

- a. Kecamatan Tarik Terdapat 0 Desa
- b. Kecamatan Prambon Terdapat 0 Desa
- c. Kecamatan Krembung Terdapat 11 Desa
- d. Kecamatan Porong Terdapat 1 Desa
- e. Kecamatan Jabon Terdapat 0 Desa
- f. Kecamatan Tanggulangin Terdapat 2 Desa
- g. Kecamatan Candi Terdapat 10 Desa
- h. Kecamatan Sidoarjo Terdapat 0 Desa
- i. Kecamatan Tulangan Terdapat 2 Desa
- j. Kecamatan Wonoayu Terdapat 2 Desa
- k. Kecamatan Krian Terdapat 3 Desa
- l. Kecamatan Balongbendo Terdapat 1 Desa
- m. Kecamatan Taman Terdapat 3 Desa
- n. Kecamatan Sukodono Terdapat 12 Desa
- o. Kecamatan Buduran Terdapat 2 Desa
- p. Kecamatan Gedangan Terdapat 4 Desa
- q. Kecamatan Sedati Terdapat 3 Desa
- r. Kecamatan Waru Terdapat 17 Desa

Perkembangan status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tabel berikut:



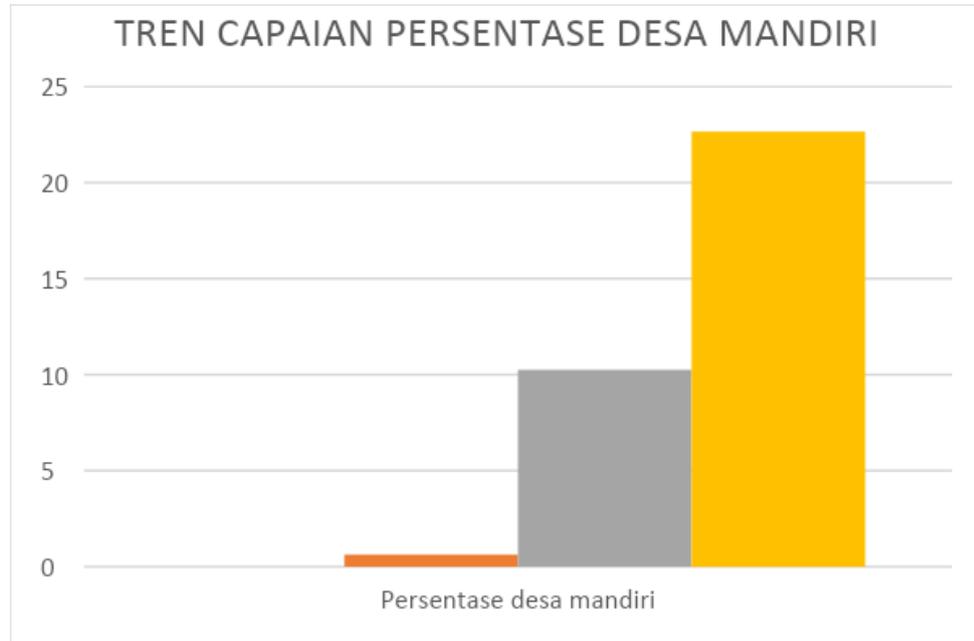
**Tabel 3.12 CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN  
2021 KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	IDM 2021				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	TARIK	20	0	1	19	0	0
2	PRAMBON	20	0	7	13	0	0
3	KREMBUNG	19	4	10	5	0	0
4	PORONG	13	1	11	0	1	0
5	JABON	15	0	3	12	0	0
6	TANGGULANGIN	19	1	6	11	0	1
7	CANDI	24	1	19	4	0	0
8	SIDOARJO	10	0	8	2	0	0
9	TULANGAN	22	0	11	11	0	0
10	WONOAYU	23	1	19	3	0	0
11	KRIAN	19	3	12	4	0	0
12	BALONGBENDO	20	0	5	15	0	0
13	TAMAN	16	3	6	7	0	0
14	SUKODONO	19	9	4	6	0	0
15	BUDURAN	15	0	13	2	0	0
16	GEDANGAN	15	1	8	6	0	0
17	SEDATI	16	0	7	9	0	0
18	WARU	17	9	7	1	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>322</b>	<b>33</b>	<b>157</b>	<b>130</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Adapun tren capaian persentase desa mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:



**Grafik 3. 6: Trend Capain Desa Mandiri**



Upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak Desa yang berstatus menjadi Desa Mandiri, yaitu:

- Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDesa / BUMDesa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa.
- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa Bersama.
- Pengembangan Desa Wisata yang dikelola BUMDesa / BUMDesa Bersama.
- Pengembangan usaha ekonomi produktif Desa melalui pemanfaatan TTG yang ramah lingkungan.
- Peningkatan kapasitas RT/RW bertujuan untuk pemahaman tugas dan fungsi dari RT/RW.

### **3. Tujuan Ketiga, Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan**



Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan, diukur dengan 2 indikator yaitu Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin.

a. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo turun sebesar 2,07 persen. TPT di Sidoarjo menurun dari 10,87 persen per Agustus 2021 menjadi 8,80 persen per Agustus 2022, sehingga capaian ini menunjukkan persentase penurunan tertinggi di Jawa Timur. Ini sekaligus menunjukkan progresivitas kinerja penanganan pengangguran di Sidoarjo yang cukup baik. Upaya dalam mempercepat pemulihan dari imbas pandemi Covid-19. Pertama, optimalisasi APBD yang dialokasikan ke berbagai penggerak ekonomi lokal, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA). Program ini turut membuka lapangan kerja dengan memberikan modal usaha untuk ribuan kelompok. Selain itu, APBD juga dialokasikan ke anak muda di setiap kecamatan agar dapat memulai usaha dengan pelatihan keterampilan teknis dunia bisnis. Secara keseluruhan, Belanja APBD Sidoarjo sebagian besar dialokasikan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

b. Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Sidoarjo pada 2022 mengalami penurunan sebesar 11,46 persen dibanding tahun 2021 lalu. "Posisi kemiskinan penduduk di Sidoarjo pada tahun 2022, terendah ke-5 di Provinsi Jawa Timur. Prosentase penduduk miskin di Sidoarjo tahun 2022 sebesar 5,36 persen. Mengalami penurunan dibanding tahun 2021 lalu sebesar 5,93 persen. Empat daerah, persentase penduduk miskinnya lebih kecil di atas Sidoarjo, secara berurut adalah Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Madiun.



Untuk mendukung tercapainya tujuan ketiga, Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan, maka disuport oleh 2 sasaran antara lain:

- a. Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran

**Tabel 3.13: Sasaran Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	1 Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	89,61	91,2	101,77	Sangat Berhasil	BPS

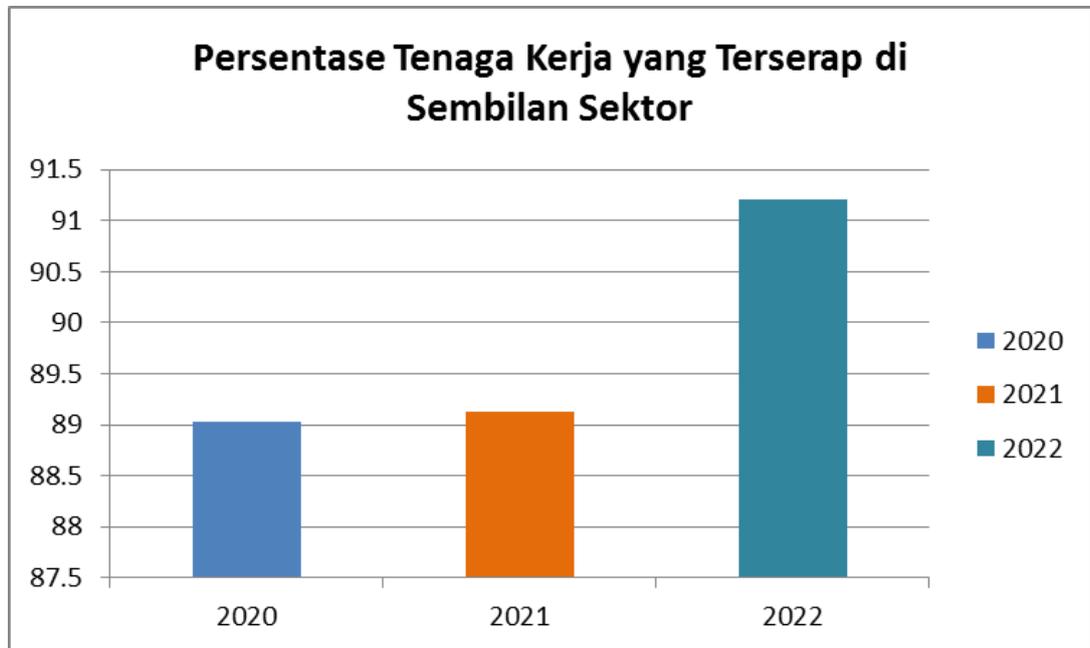
Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor di tahun 2022 tercapai 91,2 % dari target 89,61 % atau capaian 101,77 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 89,13% maka terdapat peningkatan angka 2,07 atau sekitar 2,32 %. Sembilan sektor yang menyerap tenaga kerja dimaksud, yaitu:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik, Gas dan Air
5. Sektor Bangunan
6. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
7. Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa Kemasyarakatan



Adapun perkembangan persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 3. 7: Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Sembilan Sektor**



**Tabel 3.14: Capain Kinerja Tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor	93,70	89,03	89,17	89,13	89,61	91,2

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap di 9 sektor, yaitu:



1. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mempermudah pencari kerja untuk terserap di dunia kerja.
2. Penguatan Bursa Kerja Khusus dalam penempatan tenaga kerja lulusan SMK.
3. Link and match kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.
4. Penguatan hubungan industrial dalam upaya menjaga kondusifitas hubungan kerja untuk mengurangi perselisihan yang berdampak PHK.

b. Menurunnya Penduduk Miskin

**Tabel 3.14: Menurunnya Penduduk Miskin**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
6.	Menurunnya Penduduk Miskin	1 Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	94,00	94,64	100,68	Sangat Berhasil	BPS

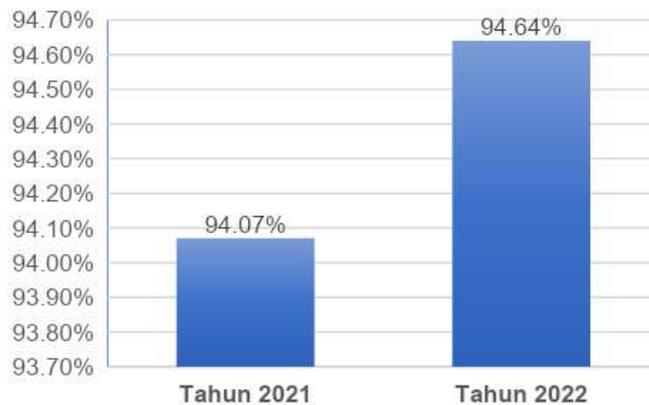
Yang dimaksud dengan "Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebanyak 1.989.167 jiwa atau sekitar 94,64% dari jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021: 93,78% maka penduduk yang berada diatas garis kemiskinan tercapai 94,64%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 94,07% maka terdapat peningkatan angka 11.980 jiwa atau sekitar 0,57%.



Perkembangan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 3. 8: Persentase Penduduk di Atsa Garis Kemiskinan**

**PERSENTASE PENDUDUK DIATAS GARIS KEMISKINAN**



#### **4. Tujuan Keempat, Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan diukur dengan 2 indikator tujuan antara lain Indeks Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

##### **a) Indeks Infrastruktur**

Indeks Infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase, prasarana dasar permukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, perhubungan dan lain sebagainya. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Perhitungan Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan mengagregasi dari capaian setiap



komposit yang mendukungnya sesuai dengan bobot, masing – masing, yang sekaligus juga merupakan indikator sasaran yaitu:

1. 25 % dari persentase kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang)
2. 15 % dari rata-rata persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik
3. 15 % dari persentase prasarana dasar permukiman
4. 5 % dari persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik
5. 20 % dari persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik
6. 20 % dari persentase fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik

Adapun realisasi capaian Indeks Infrastruktur Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15: Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	0,762	0,792	103,94

Sumber data :Perjanjian Kerja Bupati 2022 (Perubahan) - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

Dari tabel di atas nampak bahwa meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 yang diukur berdasarkan capaian Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 0,792 atau 103,94 dari target



yang diharapkan sebesar 0,762. Rincian capaian indeks Infrastruktur tersebut sebagaimana data dalam tabel berikut:

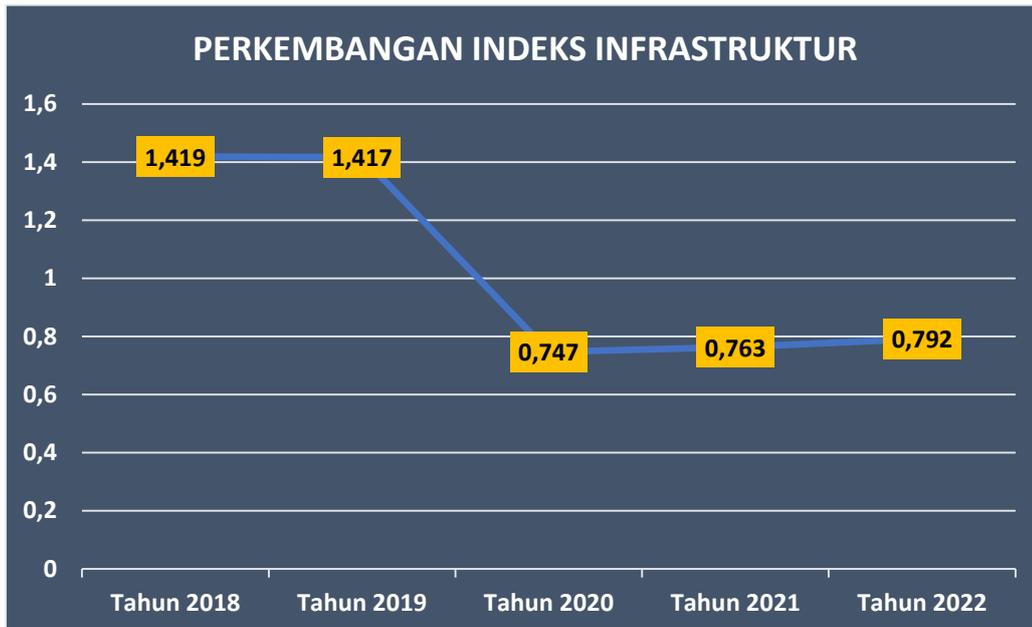
**Tabel 3.16: Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022**

No	Komposit	Bobot	Target		Realisasi		Capaian %
			%	Indeks	%	Indeks	
1	Persentase jalan mantap	0,25	90,2	22,55	95,05	23,76	105,38
2	Persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	0,15	58	8,70	59,2	8,88	102,07
3	Persentase sarana dasar permukiman	0,15	72	10,80	73,57	11,04	102,18
4	Persentase sarpras perhubungan dalam kondisi baik	0,05	61	3,05	64,14	3,21	105,15
5	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	0,2	84,56	16,91	84,32	16,86	99,72
6	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	0,2	71,13	14,23	77,21	15,44	108,55
	Jumlah			76,24		79,19	
	<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>1</b>		<b>0,762</b>		<b>0,792</b>	<b>103,94</b>

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati 2022 (Perubahan) - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

Adapun perkembangan capaian Indeks Infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir nampak dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.9: Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo**



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2022 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana capaian untuk tahun 2022 sebesar 0,792 naik naik 0,029 poin atau 3,8 % dari realisasi tahun 2021 sebesar 0.763. Capaian tahun 2020 nampak menurun dari tahun - tahun sebelumnya karena terjadi perubahan perhitungan dimana perhitungan capaian Indeks Infrastruktur tahun 2018 dan 2019 hanya mencakup perhitungan infrastruktur jalan, sedangkan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 perhitungan Indeks Infrastruktur sudah meliputi infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan

b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas



akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi Instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup. Realisasi capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 17: Capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,80	57,54	96,22

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2022 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

Tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau area dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Indeks 90 – 100 = Sangat Baik
2. Indeks 70 – 89,9 = Baik
3. Indeks 50 – 69,9 = Sedang
4. Indeks 25 – 49,9 = Buruk
5. Indeks 0 – 24,9 = Sangat Buruk

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mencapai 57,54 termasuk kategori “Sedang” (indeks antara 50 s.d 69,9). Capaian tersebut tidak memenuhi target IKLH yang ditetapkan dalam tahun 2022 sebesar 59,80. Adapun perkembangan capaian Indeks Infrastruktur pada beberapa tahun terakhir nampak dalam grafik sebagai berikut:



**Grafik 3.10: IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022**



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati 2022 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

Dari data dalam grafik tersebut di atas menunjukkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 sebesar 57,54 menurun sebesar .2,27 poin atau 96,22% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yang mencapai sebesar 59,81. Hal tersebut disebabkan karena sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
  - a. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif;
  - b. Kondisi kualitas air badan air rata-rata menunjukkan nilai yang rendah sejak dari hilir;
  - c. Adanya kemudahan berusaha melalui sistem OSS RBA sehingga terjadi peningkatan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidoarjo namun tidak dilengkapi dengan Pengelolaan



Lingkungan yang baik (termasuk penyediaan sistem pengolahan air limbah yang memadai).

## 2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

- a. Terjadi peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor;
- b. Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kurang memperhatikan pengelolaan terhadap pemenuhan baku mutu udara emisi dan udara ambien sesuai standar teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. Alih fungsi lahan yang tidak diiringi dengan proporsi RTH yang memadai dan sesuai ketentuan (terutama tanaman yang berfungsi dalam menyerap polutan);
- d. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Udara, pengelolaan sampah dan penghijauan;
- e. Lemahnya penegakan hukum dalam pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor.

## 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- a. Metode inventarisasi tutupan lahan tahun 2022 ini sama dengan tahun 2021 namun karena website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh> belum secara otomatis mengakomodir inputan tutupan lahan pada tahun 2021 maka dilakukan penginputan ulang yang telah dilakukan pada tahun 2021 serta penambahan tutupan lahan yang dilakukan pada tahun 2022;
- b. Proses verifikasi tutupan lahan di website dilakukan secara bertahap oleh DLH Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan oleh KLHK dimana hasil verifikasi menunjukkan bahwa agar dilakukan pengurangan luas hutan mangrove di daerah pesisir yang dideliniasi karena telah dihitung menjadi luas hutan yang diplotting oleh KLHK serta dilakukan perhitungan ulang untuk



RTH tugu/ monumen dan pertigaan karena pepohonan terlalu minim. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo;

- c. Perubahan fungsi lahan di area pesisir yang kurang terkendali/pengawasan, dimana sesuai peta citra satelit tahun 2022 banyak hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi area budidaya perikanan atau tambak;
- d. Legalitas lahan dari proses fasum perumahan yang masih belum diserahkan;
- c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menyediakan RTH sesuai ketentuan di lokasi kegiatan (terutama penghijauan berupa tanaman pelindung yang bertajuk);
- d. Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo yang belum memperhatikan aspek penghijauan atau belum mempertahankan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

Untuk mendukung pencapaian tujuan keempat, Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, telah disupport 2 sasaran yaitu Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata, serta Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.

- 1) Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

**Tabel 3. 18: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA	
.7	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,754	0,783	103,85	Sangat Berhasil	BAPPEDA
		2	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	84,56	84,32	99,72	Berhasil	BAPPEDA



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
		3 Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	71,13	77,13	108,44	Sangat Berhasil	BAPPEDA

#### ❖ Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indeks Infrastruktur merupakan agregasi dari kondisi jalan mantap, saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik, tersedianya sarana dasar permukiman, serta sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik. Capaian masing masing komposit tersebut dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

##### 1) Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kabupaten serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle-neck* di Kabupaten Sidoarjo yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.



Salah satu upaya Pemerintah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal atas pembangunan fisik penunjang perekonomian adalah melakukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi jalan dalam kondisi mantap.

Adapun Jalan Mantap itu sendiri adalah jalan dengan kondisi konstruksi yang mana untuk penanganannya hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap konstruksi ditetapkan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dengan besar IRI < 6 m/km (*Parameter kerataan jalan atau International Roughness Index*). Sedangkan Jalan Tak Mantap Konstruksi adalah jalan dengan kondisi di luar koridor mantap yang mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi.

Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.19 Persentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Presentase Jalan Kondisi Mantap	95	95,05	100,05

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2022 - BAPPEDA

Kab, Sidoarjo 2022



Dari tabel tersebut nampak bahwa meningkatnya Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 terealisasi sebesar 95,05% atau tercapai 100,05% dari target yang diharapkan yaitu 95%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 91,93% maka terdapat peningkatan sekitar 3,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan berupa konstruksi beton maupun aspal, dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mampu menambah panjang jalan dalam kondisi mantap.

Sampai dengan tahun 2022, panjang ruas jalan Kabupaten Sidoarjo adalah 1.021,373 km dengan kondisi jalan sebagai berikut :

**Tabel 3.20**

**Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo Pada Akhir Tahun  
2022**

No	Kondisi	Panjang Jalan	%
1	Jalan Kondisi Mantap :		
	Kondisi Baik	622,747 km	60,97
	Kondisi Sedang	348,046 km	34,08
	Sub jumlah	<b>970,793 km</b>	<b>95,05</b>
2	Jalan Kondisi Tidak Mantap :		
	Kondisi Rusak	36,112 km	3,536
	Kondisi Rusak Berat	14,468 km	1,417



No	Kondisi	Panjang Jalan	%
	Sub jumlah	<b>50,580 km</b>	4,95
	<b>Total Panjang Jalan</b>	<b>1.021,373 km</b>	<b>100</b>

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi jalan mantap tersebut, pada tahun 2022 selain dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi, juga dilakukan peningkatan jalan dengan konstruksi beton pada 28 ruas jalan sepanjang 26.820,91 meter.

Disamping itu juga dilakukan kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan *frontage road* ruas Waru – Buduran guna mendukung program prioritas Bupati dalam penataan kota dan transportasi untuk mengurai kemacetan. Perkembangan pembangunan *frontage road* ruas Waru – Buduran sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

➤ **Pembebasan lahan**

Sampai dengan tahun 2022 telah dibebaskan lahan untuk pembangunan *frontage road* seluas 49.918 meter persegi atau sekitar 67,52% dari jumlah kebutuhan lahan seluas 73.930 meter persegi. Sisa lahan yang masih harus dilakukan pembebasan sebanyak 9 bidang, yang terdiri dari 7 bidang lahan milik warga Desa Gedangan dan 2 bidang yang merupakan lahan musholla akan diupayakan maksimal terselesaikan di tahun 2022, sehingga pembangunan *frontage road* dapat dilanjutkan. Kendala dalam pembangunan *frontage road* ruas Waru – Buduran, antara lain ;

- a) Warga merasa harga nilai appraisal belum sesuai harapan



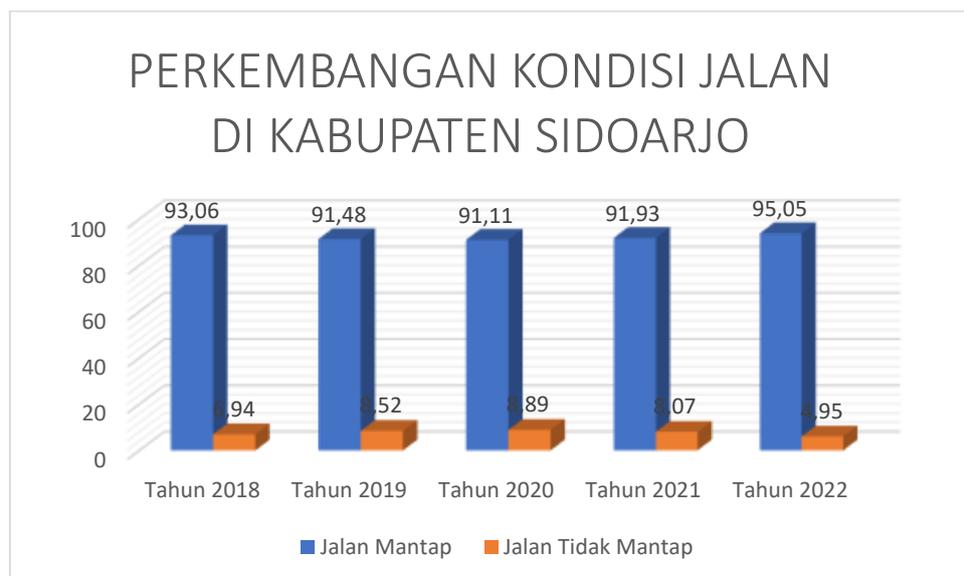
- b) Karena adanya permasalahan waris
- c) Adanya lahan musholla yang harus dicarikan lahan pengganti terlebih dahulu.

➤ **Pembangunan fisik jalan dan jembatan *frontage road*.**

Pada tahun 2022 telah selesai dilaksanakan pembangunan fisik jalan dan jembatan *frontage road* untuk Segmen-2 dengan realisasi pembangunan sepanjang 3.003,90 meter, sehingga total sampai dengan tahun 2022 telah terbangun 4.293,9 meter dari total yang harus dibangun sepanjang 9.450 meter atau 45,44%. sedangkan untuk Segmen-3 akan dilanjutkan pengerjaannya pada tahun 2023.

Perkembangan persentase kondisi jalan kabupaten Sidoarjo pada beberapa tahun terakhir nampak dalam grafik sebagai berikut :

**Grafik 3.2.1.12**  
**Perkembangan Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo**



Dari grafik tersebut di atas nampak bahwa perkembangan



persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap di wilayah Sidoarjo sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun yaitu 93,06% (2018), 91,48% (2019), dan 91,11% (2020), namun untuk tahun 2021 (91,93%) dan tahun 2022 terus meningkat, capaian kondisi jalan mantap tersebut meningkat 3,12% dari capaian tahun 2021 menjadi 95,05%.

## 2) Saluran Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik

Capaian Persentase Saluaran Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.21**

### **Persentase Saluaran Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%	91,92%	105,66%
	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	80,51%	82,00%	101,85%
<u>Rata - rata</u>				<b>103,75%</b>

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2022 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

Dari tabel tersebut nampak bahwa target persentase yang ditetapkan dalam tahun 2022 baik untuk Saluran Irigasi maupun Drainase dalam kondisi baik, telah tercapai 103,75 %. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan melalui Program Pengelolaan



Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

❖ Indeks Infrastruktur Pendidikan

Indeks Infrastruktur Pendidikan diukur berdasarkan persentase fasilitas pendidikan berupa ruang kelas belajar yang dalam kondisi baik dan rusak ringan terhadap seluruh ruang kelas belajar yang ada. Capaian Persentase Indeks Infrastruktur Pendidikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.22: Capaian Indeks Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur Pendidikan	84,56	84,32	99,72

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2022 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

Dari tabel tersebut nampak bahwa realisasi Indeks Infrastruktur Pendidikan dalam tahun 2022 tercapai 99,72%, artinya belum tercapai. Hal ini karena rasionalisasi anggaran. Namun demikian pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan melalui kegiatan pembangunan unit sekolah baru (USB), penambahan ruang kelas baru (RKB), serta rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah/ruang kelas tetap terlaksana.

Adapun perkembangan Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 bila dibandingkan



dengan capaian tahun sebelumnya nampak dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.2.1.13**

**Perkembangan Indeks Infrastruktur Pendidikan  
Kabupaten Sidoarjo**



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2022 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

❖ Indeks Infrastruktur Kesehatan

Indeks Infrastruktur kesehatan merupakan indeks yang mengukur kualitas sarana prasarana kesehatan, dalam hal ini adalah RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu. Tujuan indeks ini adalah untuk mendorong penguatan pelayanan kesehatan dari segi infrastruktur. Dalam perkembangannya, Indeks infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 mencapai **77,13** persen dalam kondisi baik, dan mengalami peningkatan sebesar **9,22** persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar **67,91** persen.



Berikut data infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 adalah terdiri dari 2 RSUD yang secara keseluruhan kondisinya 100 persen baik, kemudian 31 Puskesmas yang terdiri 25 unit atau 80,65 persen kondisinya baik dan 6 unit atau 19,35 persen kondisinya rusak sedang, serta 52 Puskesmas Pembantu 26 unit atau 50,98 persen dalam kondisi baik, 22 unit atau 42,30 persen rusak sedang dan 4 unit atau 7,69 persen kondisinya rusak berat.

2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana

**Tabel 3. 19: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA	
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,53	47,75	92,66	Berhasil	DLHK
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,15	84,96	99,78	Berhasil	DLHK
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,11	23,63	87,16	Cukup	DLHK
		4	Indeks Resiko Bencana	Indeks	98,44	98,73	100,29	Sangat Berhasil	BNPB

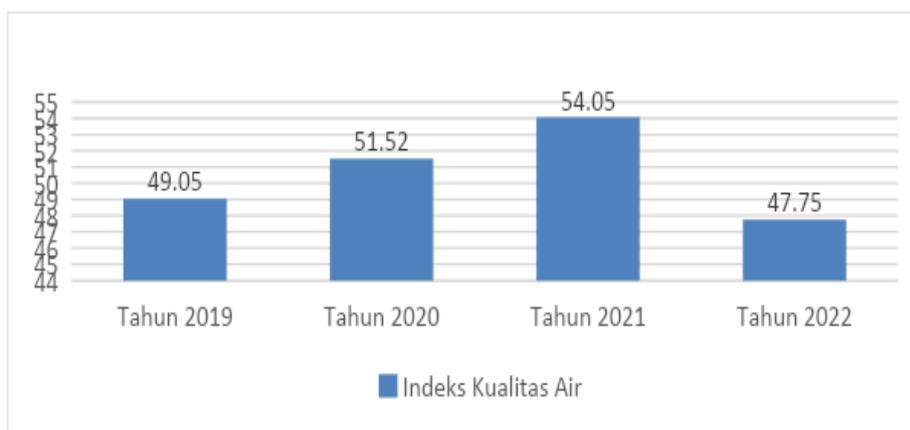
a. Indeks Kualitas Air

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan. Nilai IKA tidak dapat diprediksi terkait peningkatan maupun penurunan



nilai. Hal ini dikarenakan Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama dari aktivitas domestik masyarakat) dan rata-rata kualitas air badan air menunjukkan nilai yang rendah sejak dari hulu. Terkait penurunan nilai IKA tahun 2022 yang cukup drastis dapat diperkirakan selain karena posisi diatas juga karena keterbatasan sumber daya yang menyebabkan intervensi DLHK terhadap limbah rumah tangga belum optimal. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Air dari Tahun 2019-2022 yaitu:

**Grafik 3.11 Perkembangan Indeks Kualitas Air**



Penjelasan kualitatif per kategori indeks dapat dijelaskan untuk nilai indeks mulai Tahun 2021 saja sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, karena penjelasan kualitatif indeks dibawah Tahun 2020 hanya pada nilai akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai Pedoman IKLH Tahun 2013. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2022 diatas (sebesar 47,75) masuk dalam kategori kurang (yakni dalam rentang  $25 \leq x < 50$ ). Hal tersebut karena disebabkan Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas



sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama dari aktivitas domestik masyarakat) dan rata-rata kualitas air badan air menunjukkan nilai yang rendah sejak dari hulu, serta keterbatasan sumber daya yang menyebabkan intervensi DLHK terhadap limbah rumah tangga belum optimal. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas air di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan air badan air secara periodik;
2. Melakukan penerbitan Persetujuan Teknis dan SLO Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta memperketat pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran air, termasuk pembinaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil;
4. Menindaklanjuti pengaduan lingkungan terkait pencemaran air;
5. Melakukan pengelolaan sampah secara terpadu utamanya tumpukan sampah di sungai;
6. Mengoptimalkan fungsi TPST atau TPS 3R di setiap wilayah untuk mengurangi pembuangan sampah ke badan air;
7. Melakukan kerjasama pengendalian pencemaran air (penyediaan dan operasional ONLIMO (alat pemantau kualitas air) di intake IPA Kedunguling);
8. Menambah jumlah SDM Pengendalian Pencemaran Air

b. Indeks Kualitas Udara

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target tahun 2022 namun mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Selain itu, rata-rata nilai parameter NO<sub>2</sub> di Kawasan Transportasi, Kawasan Industri, dan



Kawasan Permukiman mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Permasalahan tidak tercapainya target Indeks Kualitas Udara dan peningkatan rata-rata nilai parameter NO<sub>2</sub> diatas adalah (1) Terjadi peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor; (2) Aktivitas industri dan rumah tangga yang tidak memperhatikan kualitas lingkungan serta (3) Alih fungsi lahan yang tidak diiringi dengan proporsi RTH yang memadai. Sebagaimana perlu diketahui bahwa sumber pencemar utama NO<sub>2</sub> adalah dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah, pembakaran batubara dan industri. Adapun nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 diatas (sebesar 84,96) masuk dalam kategori baik (yakni dalam rentang  $70 \leq x < 90$ ). Upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas udara di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala pada saat Car Free Day;
2. Melakukan kegiatan pengawasan dan memperketat pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara baik udara emisi maupun udara ambien;
3. Melakukan penghijauan pada median dan pinggir jalan;
4. Monitoring kualitas udara ambien secara berkala pada Kawasan Industri, Kawasan Perumahan/ Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Transportasi;
5. Menggalakkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas lahan utamanya penyediaan tanaman penyerap polutan termasuk kebisingan dan dituangkan dalam Dokumen Lingkungan;



6. Pengadaan Alat Ozone Generator (Air Cooling Generator) dalam rangka peningkatan kualitas udara

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan tidak mencapai target tahun 2022 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dikarenakan (1) Hasil verifikasi tutupan lahan oleh KLHK bahwa terdapat pengurangan luas hutan mangrove; (2) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat dalam menyediakan RTH. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya luas tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo. Adapun nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2022 diatas (sebesar 23,63) masuk dalam kategori sangat kurang (yakni dalam rentang  $0 \leq x < 25$ ). Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya luasan hutan mangrove serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat dalam menyediakan RTH sesuai ketentuan. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas lahan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melakukan deliniasi RTH dengan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK;
2. Turut serta aktif mengikuti bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemetaan atau deliniasi RTH dan Indeks Kualitas Lahan untuk meningkatkan kemampuan SDM yang ada dalam melakukan inventarisasi tutupan lahan secara menyeluruh yang ada di Kabupaten Sidoarjo;
3. Melakukan pemeliharaan RTH maupun tutupan hutan mangrove yang ada;



4. Melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH secara terpadu melalui deliniasi RTH pada peta google / citra satelit;
5. Mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH atau vegetasi pepohonan;
6. Bekerjasama dengan instansi lain bersama-sama melakukan penghijauan, termasuk penghijauan mangrove;
7. Mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk namun jika luas lahan tidak memungkinkan dapat menggunakan tanaman dalam pot atau tanaman vertikal

d. Indeks Resiko Bencana

Dalam Arahan dan Strategi Penanggulangan Bencana RPJMN Nasional 2020 –2024 kabupaten Sidoarjo termasuk dalam 136 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam kategori daerah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau aglomerasi yang rawan bencana yang menjadi prioritas nasional dan atau termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu, Sidoarjo juga dikenal luas di seluruh pelosok negeri bahkan dunia dengan peristiwa atau kejadian bencana yang populer dengan sebutan ‘Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi)’ yang menunjukkan bahwa ancaman bencana di Sidoarjo tidak dapat dipandang dengan sebelah mata dan penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3. 18: Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	98,44	98,73	100,29

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian atau nilai Indeks Risiko Bencana pada tahun 2022 masih belum mencapai target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD, dalam arti bahwa masih harus diupayakan untuk menurunkan risiko bencana tersebut pada tahun – tahun mendatang.

Upaya upaya untuk mengurangi indeks risiko bencana akan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. pengembangan diklat dan logistik
4. penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. perkuatan kesiapsiagaan dan penanganandarurat bencana
7. pengembangan sistem pemulihan bencana.



## **5. Tujuan Kelima, Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya**

Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya diukur dengan satu indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### ➤ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat / penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata lama sekolah adalah rata - rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang



layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan melalui standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berikut merupakan capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 :

**Tabel 3.19 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022**

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Indeks Pembangunan Manusia	80,77	81,02	100,30%



Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Lainnya				

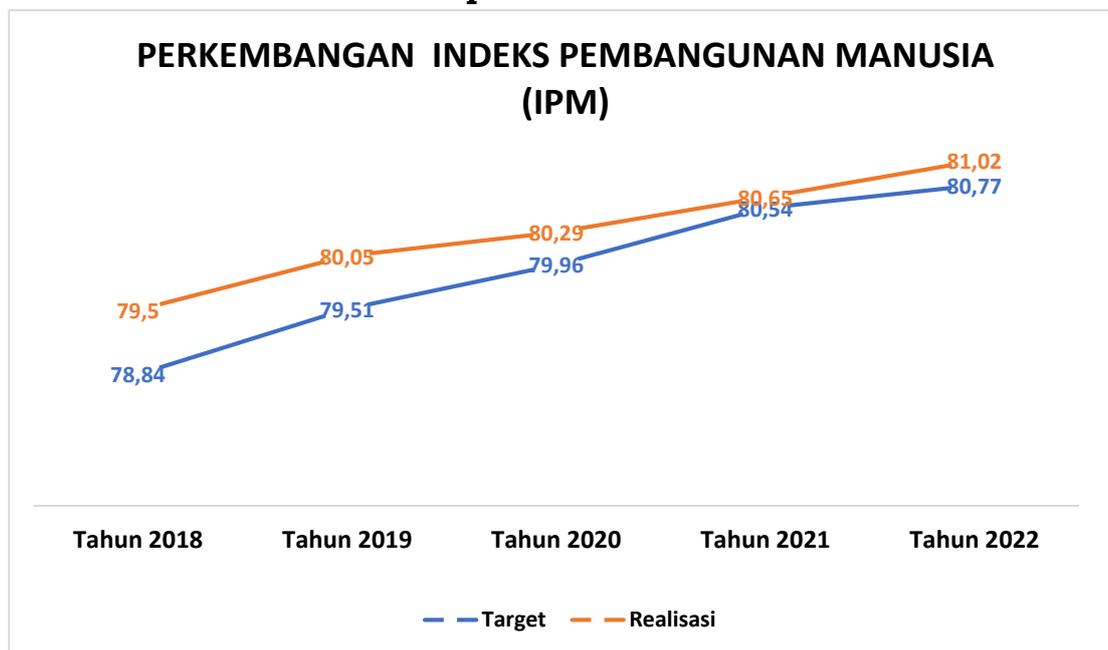
Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mencapai 81,02 atau tercapai 100,30 % dari target yang ditetapkan.

Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok untuk mengukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu satu dasa warsa ini, telah tertata dengan baik. Misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Hasilnya telah menunjukkan IPM Kab Sidoarjo mulai tahun 2018 hingga 2022, terus melaju naik. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :



**Grafik 3.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoa**



*Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo*

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, realisasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo, selain selalu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, juga perkembangannya selalu meningkat dari tahun ke tahun,

Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya, yang dalam hal ini capaian setiap komponen tersebut tercermin dari capaian setiap indikator sasaran. Dengan melihat capaian masing - masing komponen, diharapkan Pemerintah Daerah mendapatkan input untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing. Meningkatnya pembangunan manusia di Jawa Timur setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya angka harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Untuk mendukung tujuan kelima, Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya, disuport 3 sasaran antara lain Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, serta Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat.

a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;

Tabel 3.2.1.26

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>TINGKAT KEBERHASILAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,22	14,95	98,23	Berhasil	BPS
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,79	10,77	99,81	Berhasil	BPS

❖ Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 tercapai 14,95 tahun dari target 15,41 tahun sehingga tercapai 97%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 14,94 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,01 Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 14,95 tahun ini menunjukkan bahwa



lamanya sekolah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mencapai jenjang Diploma 2.

Adapun tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 3.13: Perkembangan Angka Harapan Sekolah**



Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat Sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan Memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo



❖ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada indikator ini yang di ukur adalah Rata – rata lama sekolah penduduk Sidoarjo pada tahun berkenaan. Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa pada tahun 2022 tercapai 10,77 atau setara SMA kelas 11 dari target 11,23 atau setara SMA kelas 12. Jika di bandingkan dengan tahun 2021 tercapai 10, 72 dari target 10, 80 , maka dapat di katakan pada tahun 2022 terdapat kenaikan realisasi capaian sebesar 0,05. Adapun kendala yang di hadapi adalah dikarenakan kewenangan Pemerintah Daerah adalah pada ketercapaian pendidikan peserta didik pada pendidikan dasar sedangkan usia diatas pendidikan dasar adalah merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi maka diperlukan koordinasi yang insentif dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Propinsi . Upaya yang dilakukan adalah dengan memantau dan memberikan pemahaman terhadap pentingnya pendidikan dasar bagi siswa.

b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat:

**Tabel 3.20: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 . Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,77	74,36	99,45	Berhasil	BPS

❖ Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia atau Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan



kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

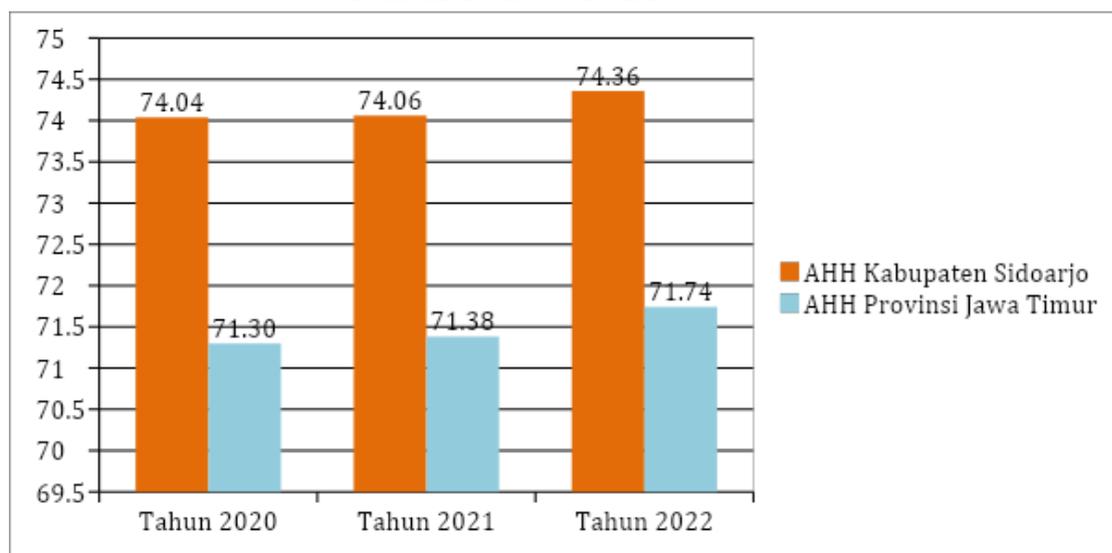
Angka Harapan Hidup Tahun 2022 terealisasi 74,36 tahun dari target 74,77 tahun, sehingga tercapai 99,45%. Capaian AHH Tahun 2022 belum bisa 100% karena skrining kesehatan pada usia produktif belum tercapai maksimal. Dimana skrining tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan remaja putri dan wanita usia subur, siap untuk melahirkan bayi dalam keadaan sehat. Diharapkan dengan skrining tersebut, jumlah kematian ibu dan bayi dapat ditekan serendah mungkin. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan tidak tercapainya AHH, antara lain faktor kualitas lingkungan tempat tinggal, kemiskinan, pola asuh, budaya, dan ketersediaan sumber pangan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 74,06 tahun maka terdapat peningkatan angka 0,27 point atau sekitar 0,4%. Dengan realisasi Angka Harapan Hidup 74,36 tahun ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik.

Adapun tren capaian Angka Harapan Hidup yang dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur**



### Tahun 2020 - 2022



Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Hidup dapat tercapai optimal, yaitu :

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB);
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman pangan lokal;
- Revitalisasi posyandu lansia;
- Optimalisasi posbindu PTM.

c. Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat

**Tabel 3.21: Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,53	94,68	100,16	Sangat Berhasil	BPS



❖ Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki.

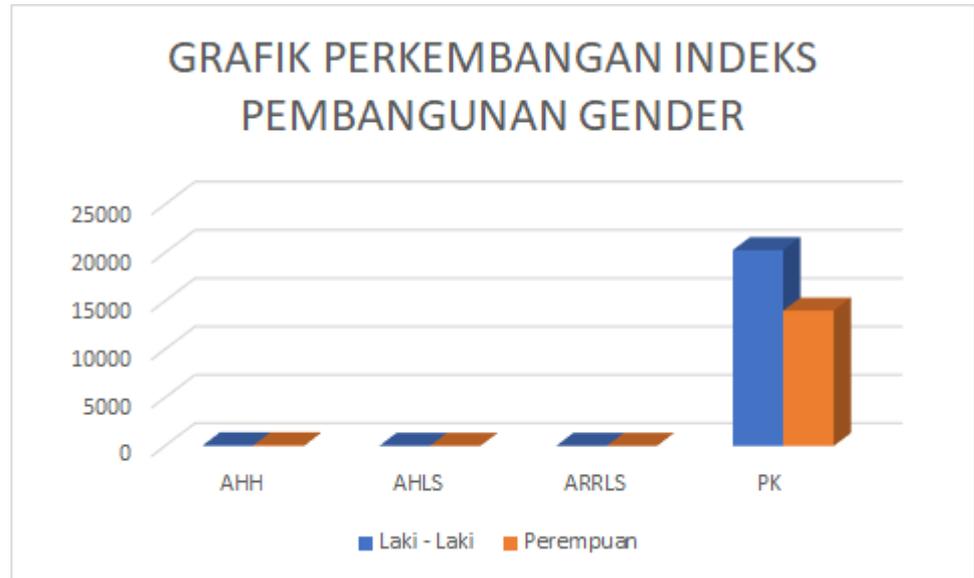
Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo adalah 94,68 dan bila dibandingkan dengan target 94,53 maka didapat capaian sebesar 100,16%. Sedangkan kalau dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 94,26 maka terdapat kenaikan sebesar 0,42 %. Adapun perhitungan masing-masing komponen Indeks Pembangunan Gender, adalah sebagai berikut:

Indikator	Laki-Laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,15	75,83
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,84	15,07
Angka Rata Rata Lama Sekolah	10,95	10,27
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan	20.278	14.005

Apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.15



Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah
- Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi

#### **6. Tujuan Keenam, Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat**

Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban,



Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat, dengan indicator Indeks Kesalehan Sosial.

➤ Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian social dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam yang terdiri dari indeks toleransi, indeks rasa aman dan indeks pelestarian budaya.

Indeks kesalehan social Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebesar 84,23 dari target 82,77 sehingga persentase capaiannya adalah 102%, sehingga Indeks kesalehan social Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dinilai Sangat Berhasil. Indeks kesalehan social Kabupaten Sidoarjo ini indicator baru yang baru tahun 2022 ini dilakukan pengukuran.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut yaitu Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat, telah didukung oleh 2 sasaran meliputi Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat, serta Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.

- a. Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi

**Tabel 3.22: Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
1 2.	Berkembangnya nilai-nilai	1. Indeks Toleransi	Indeks	78,68	81,30	103,3	Sangat Berhasil	<b>Bappeda</b>



N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
	budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	2. Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	60,55	90,46	149	Sangat Berhasil	<b>Bappeda</b>

#### ❖ Indeks Toleransi

Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo 2022 merupakan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Bappeda Kabupaten Sidoarjo di Bulan November 2022. Dalam pengukuran Indeks Toleransi ini berbasis survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Responden penelitian ini meliputi tiga unsur yaitu birokrasi, masyarakat, dan tokoh agama.

Pengukuran Indeks Toleransi dalam penelitian ini menggunakan lima dimensi, yaitu :

- persepsi terhadap toleransi,
- sikap terhadap toleransi,
- kerjasama antar suku agama berbeda,
- sikap pemerintah dalam dukungan antar umat beragama
- harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam terciptanya toleransi di masyarakat.

Hasil pengukuran Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo 2022 hasilnya adalah sebagai berikut:

- Capaian indeks dimensi persepsi terhadap toleransi sebesar 86,02
- Capaian indeks dimensi sikap terhadap toleransi sebesar 81,45



- Capaian indeks dimensi kerjasama antar suku dan agama yang berbeda sebesar 77,14
- Capaian indeks dimensi sikap pemerintah daerah terhadap hubungan antar suku agama yang berbeda sebesar 79,38
- Capaian indeks dimensi harapan terhadap pemerintah sebesar 82,53

Berdasarkan capaian kelima dimensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian Indeks Toleransi Kabupaten Sidoarjo 2022 adalah sebesar 81,30. Hal tersebut jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang 80,18 maka terdapat kenaikan 1.12 poin, dan capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yakni sebesar 77,92 dengan selisih 3.38 poin.

#### ❖ Indeks Pelestarian Budaya

Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo 2022 merupakan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Bappeda Kabupaten Sidoarjo di Bulan April 2022. Pengukuran Indeks Pelestarian Budaya ini berbasis dua model pengukuran yaitu pengukuran data sekunder yang bersumber dari Laporan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sidoarjo dan pengukuran melalui survei. Pengukuran data sekunder menggunakan rumus prosentase (%) sedangkan survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dan pengukurannya menggunakan indeks. Responden penelitian ini meliputi tiga unsur yaitu birokrasi, masyarakat, dan pelaku seni dan budaya.

Pengukuran Indeks Pelestarian Budaya sebagai berikut :

- Jumlah seni budaya yang dilestarikan dengan Bobot 35%
- Rumus = Jumlah SB yang dilestarikan/jumlah SB yang dicatat X 100%



- Jumlah cagar budaya yang tercatat dengan Bobot 35%
- Rumus = Jumlah CB yang dicatat/jumlah CB yang diketahui X 100%
- Sikap masyarakat terhadap pelestarian seni budaya dan lingkungan, dengan bobot 30% yang mencakup tiga dimensi yaitu :
  - Persepsi dan sikap masyarakat terhadap pelestarian seni
  - Persepsi dan sikap masyarakat terhadap cagar budaya
  - Persepsi dan sikap masyarakat terhadap pelestarian budaya dan lingkungan
  - Persepsi dan sikap masyarakat terhadap aspek lainnya yang terkait dengan seni dan budaya

Hasil pengukuran Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo 2022 hasilnya adalah sebagai berikut :

- Capaian indeks Pengukuran Seni Budaya yang Dilestarikan sebesar 82,13
- Capaian indeks Pengukuran Cagar Budaya yang Dicatat sebesar 96,52
- Capaian indeks Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Pelestarian Budaya dan Lingkungan sebesar 93,12

Setelah mengetahui capaian per pengukuran langkah selanjutnya adalah mengalikan capaian per pengukuran tersebut dengan bobot masing masing hasilnya adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.23: Perhitungan Indeks Pelestarian Budaya**

Pengukuran	Nilai Indeks	Bobot	Bobot Skor
Pelestarian seni budaya	82,13	35%	28,75
Pencatatan cagar budaya	96,52	35%	33,78
Sikap masyarakat terhadap seni budaya dan lingkungan	93,12	30%	27,93
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>90,46</b>

Data diolah, 2022

Berdasarkan capaian ketiga pengukuran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo 2022 adalah sebesar 90,46. Hal tersebut jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 89,94 maka terdapat kenaikan 0.52 poin, dan capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yakni sebesar 60,55 dengan selisih 29.91 poin

- a. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram

**Table 3.24: Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN	SUMBER DATA
1 3.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1 . Indeks Rasa Aman	Indeks	77,92	80,77	103,7	Sangat Berhasil	<b>Bappeda</b>

❖ Indeks Rasa Aman



Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan suatu masyarakat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, aspek ekonomi, dan aspek peristiwa politik. Pengukuran Indeks Rasa Aman ini berbasis survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Responden penelitian ini meliputi tiga unsur yaitu birokrasi, masyarakat, dan tokoh NGO. Kategori indeks rasa aman dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
$0 \leq IRA \leq 20$	Rasa Aman Sangat Rendah
$20 < IRA \leq 40$	Rasa Aman Rendah
$40 < IRA \leq 60$	Rasa Aman Sedang
$60 < IRA \leq 80$	Rasa Aman Tinggi
$80 < IRA \leq 100$	Rasa Aman Sangat Tinggi

Pengukuran Indeks Rasa Aman menggunakan empat dimensi, yaitu keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan pemanfaatan atas kebhinekaan dan keamanan dari kekerasan fisik. Adapun capaian masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut :

Dimensi	Capaian
Indeks Keamanan dari Bencana	80,16
Indeks Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	84,20
Indeks Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan	86,37
Indeks Keamanan dan Kekerasan Fisik	70,27
<b>Indeks Rasa Aman</b>	<b>80,77</b>



Berdasarkan capaian keempat dimensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa Indeks rasa aman Tahun 2022 tercapai 80,77 dari target 77,92 sehingga tercapai 103%, artinya Sangat Berhasil atau termasuk katagori **Rasa Aman Sangat Tinggi**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 76,60 maka terdapat peningkatan angka 4,17 atau sekitar 5% Dengan realisasi Indeks Rasa Aman sebesar 80.77 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Aman Sangat Tinggi, da capaian ini telah melampaui target yang di tetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yakni sebesar 77,92 dengan seisih 2.85 poin. Untuk tren capaian Indeks Rasa Aman dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.2.1.22

#### PERKEMBANGAN INDEKS RASA AMAN



Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Rasa Aman dapat tercapai optimal, yaitu :

- Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang tentram dan aman



- Menertibkan berbagai kasus pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang merusak sistem tata kelola kota/kabupaten

### 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun sebelumnya

**Tabel 3.25: Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PENINGKATAN (+) / PENURUNAN (-)	
	<b>MISI 1</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>				
	<b>TUJUAN 1</b>	:	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha</b>			
	<b>Indikator Tujuan</b>		<b>B (67,66)</b>	<b>B (68,88)</b>	<b>1,22</b>	
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	BB (78,97)	BB (78,96)	-0,01
		2.	Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	0
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	81,4 (3,26)	85,63 (3,42)	0,16
		4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,37	2,29	-0,08
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif	
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	0
2		1.		A-	A-	0



	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sangat Baik	Sangat Baik	
	<b>MISI 2</b>	<b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>				
	<b>TUJUAN 2</b>	:	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan</b>			
	<b>Indikator Tujuan :</b>	1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>4,21</b>	<b>7,53</b>	<b>3,32</b>
		2.	<b>Indeks Gini</b>	<b>0,347</b>	<b>0,373</b>	<b>-0,026</b>
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,83	16,41	-0,42
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	51,97	50,02	-1,95
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	-0,08	2,27	2,35
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85	5,26	4,41
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87	1,93	0,06
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	21,84	23,33	1,49
		3.	Persentase Desa Mandiri	10,25	22,67	12,42
	<b>TUJUAN 3</b>	:	<b>Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan</b>			
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)</b>	<b>10,87</b>	<b>8,8</b>	<b>2,07</b>
		2.	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>5,93</b>	<b>5,36</b>	<b>0,57</b>
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,13	91,2	2,07
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas	94,07	94,64	0,57



			Garis Kemiskinan (GK)			
	<b>MISI 3</b>	<b>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>				
	<b>TUJUAN 4</b>	:	<b>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>			
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>0,763</b>	<b>0,792</b>	<b>0,03</b>
		2.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>59,81</b>	<b>57,54</b>	<b>-2,27</b>
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,759	0,783	0,02
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	92,8	84,32	-8,48
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	67,91	77,13	9,22
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	54,05	47,75	-6,30
		2.	Indeks Kualitas Udara	84,67	84,96	0,29
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	23,72	23,63	-0,09
		4.	Indeks Resiko Bencana	99,12	98,73	-0,39
	<b>MISI 4</b>	<b>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>				
	<b>TUJUAN 5</b>	:	<b>Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya</b>			
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>80,65</b>	<b>81,02</b>	<b>0,37</b>
9.		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,94	14,95
	2.		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,72	10,77	0,05
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,06	74,36	0,30



11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,26	94,68	0,42
	<b>MISI 5</b>	<b>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>				
	<b>TUJUAN 6</b>	:	<b>Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</b>			
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	-	<b>84,23</b>	-
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	80,18	82,14	1,96
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	-	90,46	-
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	76,6	80,77	4,17

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2021, telah mengalami tren positif dan bahkan ada beberapa mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara lain pada indikator Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, Persentase Desa Mandiri dan Indeks Infrastruktur Kesehatan.

Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 tumbuh sebesar 7,53 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,21 persen, tertinggi nomor dua di Jawa Timur. Hal ini karena didukung nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 mencapai nilai sebesar Rp. 14.086.231.612.109,50 dan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 9.773.158.275.830,00, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.313.073.336.279,50 atau 44,13 persen. Sedangkan untuk tahun 2021 nilai investasi Kabupaten Sidoarjo meningkat sebesar Rp. 2.735.405.581935.038,87 atau 38,87 persen. Berkenaan hal tersebut, maka persentase pertumbuhan nilai investasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen.



Persentase Desa Mandiri, Desa di Kabupaten Sidoarjo yang berstatus Desa Mandiri Tahun 2022 sebanyak 73 Desa dari 322 Desa yang ada atau tercapai 22,67 persen dari target 12,42 persen atau 40 desa, sehingga capaian 182,91 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 10,25 persen atau 33 desa, maka terdapat peningkatan angka 40 desa atau sekitar 12,42 persen. Desa yang berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun 2022, antara lain:

1. Kecamatan Tarik Terdapat 0 Desa
2. Kecamatan Prambon Terdapat 0 Desa
3. Kecamatan Krembung Terdapat 11 Desa
4. Kecamatan Porong Terdapat 1 Desa
5. Kecamatan Jabon Terdapat 0 Desa
6. Kecamatan Tanggulangin Terdapat 2 Desa
7. Kecamatan Candi Terdapat 10 Desa
8. Kecamatan Sidoarjo Terdapat 0 Desa
9. Kecamatan Tulangan Terdapat 2 Desa
10. Kecamatan Wonoayu Terdapat 2 Desa
11. Kecamatan Krian Terdapat 3 Desa
12. Kecamatan Balongbendo Terdapat 1 Desa
13. Kecamatan Taman Terdapat 3 Desa
14. Kecamatan Sukodono Terdapat 12 Desa
15. Kecamatan Buduran Terdapat 2 Desa
16. Kecamatan Gedangan Terdapat 4 Desa
17. Kecamatan Sedati Terdapat 3 Desa
18. Kecamatan Waru Terdapat 17 Desa

Indeks Infrastruktur kesehatan merupakan indeks yang mengukur kualitas sarana prasarana kesehatan, dalam hal ini adalah RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu. Tujuan indeks ini adalah untuk mendorong penguatan pelayanan kesehatan dari segi infrastruktur. Dalam perkembangannya, Indeks infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 mencapai 77,13 persen dalam kondisi



baik, dan mengalami peningkatan sebesar 9,22 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 67,91 persen.

infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 dalam kondisi baik tersebut terdiri dari 2 RSUD yang secara keseluruhan kondisinya 100 persen baik, kemudian 31 Puskesmas yang terdiri 25 unit atau 80,65 persen kondisinya baik dan 6 unit atau 19,35 persen kondisinya rusak sedang, selanjutnya untuk 52 Puskesmas Pembantu 26 unit atau 50,98 persen dalam kondisi baik, 22 unit atau 42,30 persen rusak sedang dan 4 unit atau 7,69 persen kondisinya rusak berat.

Meskipun sebagian besar capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 mengalami tren positif, namun ada beberapa capaian yang mengalami penurunan terhadap capaian tahun 2021, diantaranya adalah Nilai SAKIP, Nilai SPBE, Indeks GINI, Persentase PDRB Sektor Perdagangan, PDRB sector Industri, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Infrastruktur Pendidikan, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Resiko Bencana.

Untuk hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level PD.

Namun demikian dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Sidoarjo kedepan, maka beberapa hal yang akan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Melakukan reviu baik pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan untuk memastikan bahwa sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut telah selaras dari perencanaan jangka menengah hingga perencanaan tahunannya, berorientasi hasil, dan memiliki



- indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup untuk mengukur capaian kinerja strategis;
2. Melakukan reviu atas cascading kinerja yang sudah disusun sebelumnya dengan memperhatikan isu strategis, kerangka logis, potensi crosscutting baik antar PD maupun antar bidang, maupun CSF yang telah dipetakan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian kondisi akhir yang diinginkan. Proses reviu dan perbaikan atas cascading kinerja tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Memastikan bahwa data kinerja yang akan digunakan dapat tergambar lebih spesifik, jelas definisi operasionalnya, jelas formulasi penghitungan, dan jelas asal sumber datanya. Sehingga Ketika akan mengukur capaian kinerja atas sasaran maupun tujuan yang dikawal oleh indikator kinerja tersebut dapat semakin andal dan menggambarkan kesuksesan atas pencapaian tujuan maupun sasaran strategis baik di level pemerintah daerah maupun PD;
  4. Mengintegrasikan aplikasi e-Monev, e-Kenda, e-Kinerja yang sudah ada sebelumnya dengan sistem perencanaan dan sistem keuangan yang dimiliki sehingga monitoring dan evaluasi atas seluruh proses kinerja baik dari level kinerja organisasi sampai kinerja individu dapat mudah dan lebih baik;
  5. Memaksimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi kinerja kedepan, penentuan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja, maupun sebagai alat pertimbangan dalam melakukan mutasi rotasi pada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  6. Laporan kinerja pemerintah daerah maupun PD akan menginformasikan secara lengkap terkait hasil analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja dan



upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala untuk mencapai kinerja;

7. Menjadikan capaian indikator kinerja baik yang belum berada di kategori berhasil maupun yang sudah berada di atas kategori tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
8. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan temuan dan rekomendasi akan semakin konkrit, menysasar langsung pada akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap PD;
10. Memastikan bahwa semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti oleh seluruh PD sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja, khususnya pada tingkat pengangguran terbuka.

### **3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis**

**Tabel 3.26: Membandingkan antara Realisasi Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD**

**Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET 2026	CAPAIAN %	TINGKAT KEMAJUAN
	<b>MISI 1</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>				
	<b>TUJUAN 1</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha</b>			



	<b>Indikator Tujuan</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>85,99</b>	
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	BB	AA	87,64	
		2.	Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100	Tercapai
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,42	3,95	86,58	
		4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Tercapai
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,29	4,25	53,88	
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	Tercapai
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00	Tercapai
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A Pelayanan Prima	A- Sangat Baik	113	Melampaui Target Akhir RPJMD
	<b>MISI 2</b>	<b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>					
	<b>TUJUAN 2</b>	:	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan</b>				
	<b>Indikator Tujuan :</b>	1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>7,53</b>	<b>5,53</b>	<b>136,17</b>	<b>Melampaui Target Akhir RPJMD</b>
		2.	<b>Indeks Gini</b>	<b>0,373</b>	0,34	<b>90,29</b>	
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi,	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,41	16,75	97,97	



	Pertanian dan Perikanan	2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	50,02	54,21	92,27	
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,27	3,25	69,85	
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	5,26	1,52	346,05	Melampaui Target Akhir RPJMD
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,93	2,15	89,77	
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	23,33	30,34	76,90	
		3.	Persentase Desa Mandiri	22,67	18,63	121,69	Melampaui Target Akhir RPJMD
	<b>TUJUAN 3</b>	:	<b>Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)</b>	<b>8,8</b>	<b>9,14</b>	<b>103,72</b>	<b>Melampaui Target Akhir RPJMD</b>
		2.	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>5,36</b>	<b>5</b>	<b>92,80</b>	
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	91,2	90,86	100,37	Melampaui Target Akhir RPJMD
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,64	95,00	99,62	
	<b>MISI 3</b>	<b>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>					
	<b>TUJUAN 4</b>	:	<b>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>0,792</b>	<b>0,796</b>	<b>99,50</b>	



		2.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>57,54</b>	<b>59,84</b>	<b>96,16</b>	
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,783	0,777	100,77	Melampaui Target Akhir RPJMD
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	84,32	92,71	90,95	
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	77,13	72,59	106,25	Melampaui Target Akhir RPJMD
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	47,75	51,57	92,59	
		2.	Indeks Kualitas Udara	84,96	85,19	99,73	
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	23,63	27,15	87,03	
		4.	Indeks Resiko Bencana	98,73	76,86	71,55	
	<b>MISI 4</b>	<b>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>					
	<b>TUJUAN 5</b>	:	<b>Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>81,02</b>	<b>81,62</b>	<b>99,26</b>	
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,95	16,44	90,94	
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,77	13,11	82,15	
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,36	76,81	96,81	
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,26	96,25	97,93	
	<b>MISI 5</b>	<b>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>					



	<b>TUJUAN 6</b>	:	<b>Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	<b>84,23</b>	<b>92,08</b>	<b>91,47</b>	
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	82,14	84,84	97	
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	90,46	73,6	123	Melampaui Target Akhir RPJMD
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	80,77	82,12	98	

Sebagaimana table diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD pada tahun 2026, beberapa indicator telah mencapai diatas 90% dan bahkan beberapa sudah melampaui target akhir RPJMD. Oleh karenanya akan dilakukan reviu RPJMD

### 3.1.5 Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 dengan Capaian Nasional

**Tabel 3.27: Membandingkan antara Realisasi Tahun 2022 dengan Capaian Nasional**

**Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN %	KET	
	<b>MISI 1</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>					
	<b>TUJUAN 1</b>	:	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>B (68,88)</b>	<b>B (65)</b>	<b>105,97</b>	<b>Melampaui Capaian Nasional</b>



1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	BB (78,96)	BB *) (61,6)	128,18	
		2.	Opini Atas Laporan BPK	WTP	-		
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,42	3,93	87,02	
		4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	-	-	
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,29	2,34	97,86	
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	-	-	
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	-	-	
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A Pelayanan Prima (4,52)	B Baik (3,87)	116,80	Melampaui Capaian Nasional
<b>MISI 2</b>		<b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>					
<b>TUJUAN 2</b>		<b>: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan</b>					
<b>Indikator Tujuan :</b>		1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>7,53</b>	<b>5,31</b>	<b>141,81</b>	<b>Melampaui Capaian Nasional</b>
		2.	<b>Indeks Gini</b>	<b>0,373</b>	<b>0,381</b>	<b>102,10</b>	<b>Melampaui Capaian Nasional</b>
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,41	-	-	
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	50,02	-	-	
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,27	-	-	



		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	5,26	24,96		
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,93	-	-	
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	23,33	-	-	
		3.	Persentase Desa Mandiri	22,67	8,43	268,76	Melampaui Capaian Nasional
	<b>TUJUAN 3</b>	:	<b>Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)</b>	<b>8,8</b>	<b>5,86</b>	<b>49,83</b>	
		2.	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>5,36</b>	<b>9,57</b>	<b>143,99</b>	Melampaui Capaian Nasional
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	91,2	-	-	
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,64	90,43	104,66	Melampaui Capaian Nasional
	<b>MISI 3</b>	<b>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>					
	<b>TUJUAN 4</b>	:	<b>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>0,792</b>	-	-	
		2.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>57,54</b>	<b>72,42</b>	<b>79,45</b>	
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,783	-	-	
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	84,32	-	-	
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	77,13	-	-	
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan	1.	Indeks Kualitas Air	47,75	53,88	88,62	
		2.	Indeks Kualitas Udara	84,96	88,06	96,48	



	Penanganan Terhadap Bencana	3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	23,63	60,72	38,92	
		4.	Indeks Resiko Bencana	98,73	134,16	126,41	Melampaui Capaian Nasional
	<b>MISI 4</b>	<b>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>					
	<b>TUJUAN 5</b>	:	<b>Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>81,02</b>	<b>72,91</b>	<b>111,12</b>	<b>Melampaui Capaian Nasional</b>
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,95	13,1	114,12	Melampaui Capaian Nasional
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,77	8,69	123,94	Melampaui Capaian Nasional
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,36	71,85	103,49	Melampaui Capaian Nasional
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	91,63	103,33	Melampaui Capaian Nasional
	<b>MISI 5</b>	<b>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>					
	<b>TUJUAN 6</b>	:	<b>Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	<b>84,23</b>	-	-	
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	82,14	-	-	
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	90,46	-	-	
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	80,77	-	-	

Berdasarkan data table diatas, perbandingan antara capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dengan capaian Nasional telah diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo telah banyak yang melampaui capaian nasional dan ada beberapa dibawahnya. Artinya



Kabupaten Sidoarjo masih perlu terus memacu meningkatkan kinerjanya dengan banyak melakukan inovas-inovasi.

### 3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**Tabel 3.28: Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

**Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	<b>MISI 1</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>					
	<b>TUJUAN 1</b>	:	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha</b>				
	<b>Indikator Tujuan</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>	<b>98,26</b>	<p>Belum maksimalnya capaian kinerja tujuan pertama sesuai target, dikarenakan belum maksimalnya kualitas manajemen tata kelola pemerintahan, utamanya belum maksimalnya pengelolaan SPBE.</p> <p>Terus berbenah menata organisasi dalam berkinerja dalam berkinerja meningkatkan kualitas pelayanan public dengan banyak melakukan inovasi-inovasi termasuk meningkatkan kualitas tata kelola SPBE.</p>
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	98,58	
		2.	Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100	
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76	3,42	90,96	
		4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,35	2,29	68,35	
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00	
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00	



2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	100		
<b>MISI 2</b>		<b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>						
<b>TUJUAN 2</b>		:	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan</b>					
<b>Indikator Tujuan :</b>		1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>1,36</b>	<b>7,53</b>	<b>553,68</b>	<p><b>Angka pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo sudah mengalami percepatan yang sangat baik terbukti pertumbuhan ekonomi sidoarjo tahun ini tertinggi nomor dua di jawa timur.</b></p> <p><b>Indeks GINI di Sidoarjo masih tinggi karena Sidoarjo merupakan daerah penyangga ibukota provinsi Jawa Timur yang Berbatasan langsung dengan kota Surabaya yang mana banyak masyarakat urban ke Sidoarjo.</b></p>	<p><b>Upaya yang dilakukan untuk menekan ketimpangan tersebut dengan penguatan Koprasi, UMKM, penyediaan lapangan kerja yang luas melalui pemberian pelatihan-pelatihan dan pemberian kredit melalui program KURMA termasuk penguatan peran BUMDES dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa</b></p>
		2.	<b>Indeks Gini</b>	0,359	<b>0,373</b>	<b>96,25</b>		
		3.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,17	16,41	101,48		
		4.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	52,29	50,02	95,66		
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,77	2,27	81,95		
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,92	5,26	571,74		
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,93	1,93	100,00		
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	23,20	23,33	100,56		
		3.	Persentase Desa Mandiri	12,42	22,67	182,53		



	<b>TUJUAN 3</b>	:	<b>Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)</b>	10,39	8,8	115,30	<p>Untuk tujuan ke 3 terkait TPT dan penduduk miskin secara capaian sudah melampaui target dan sangat berhasil, namun angka tersebut masih tergolong tinggi walaupun TPT Kabupaten Sidoarjo sudah mengalami perbaikan yang sangat progresif tercepat di Jawa Timur. Termasuk pada presentase penduduk miskin, sudah sangat berhasil menekannya.</p>	<p>Upaya yang terus dilakukan Kabupaten Sidoarjo adalah dengan penyediaan lapangan kerja yang luas melalui pelatihan-pelatihan serta penguatan ekonomi masyarakat dengan berbagai setrategi diantaranya penguatan kopras, UMKM, penguatan peran BUMDES dan pemberian bantuan social.</p>
		2.	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	6	5,36	110,67		
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,61	91,2	101,77		
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,00	94,64	100,68		
	<b>MISI 3</b>	<b>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>						
	<b>TUJUAN 4</b>	:	<b>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Infrastruktur</b>	0,762	0,792	103,94	<p>Pemenuhan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah tercapai sesuai target. utamanya infrastruktur pekerjaan umum, pendidikan dan kesehatan. pada tahun 2022 telah dilakukan pembangunan infrastruktur jalan sangat masip dengan betonisasi. Termasuk infrastruk pendidikan dengan renovasi gedung-gedung sekolah dan infrastruktur kesehatan dengan dibangunnya RSUD Sidoarjo Barat. Berkenaan dengan masalah kualitas lingkungan hidup diataranya karena sidoarjo berada diposisi hilir shg mendapatkan banyak kiriman sampah dari hulu. Kemudian Jumlah industry dan kendaraan bermotor yang begitu banyak juga karena banyaknya alih fungsi</p>	
		2.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	59,80	57,54	96,22		
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,754	0,783	103,85		
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	84,56	84,32	99,72		
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13	77,13	108,44		
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	51,53	47,75	92,66		
		2.	Indeks Kualitas Udara	85,15	84,96	99,78		
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,11	23,63	87,16		



		4.	Indeks Resiko Bencana				lahan dengan pemotongan hutan mangruf masyarakat	
				98,44	98,73	100,29		- Upaya yang dilakukan yaitu diantaranya dengan sering melakukan penyuluhan kemasyarakat, melakukan aksi pembersihan dan selalu berkoordinasi dengan pemprov, pemkab/ pemkota sekitar.
	<b>MISI 4</b>	<b>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>						
	<b>TUJUAN 5</b>	:	<b>Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>1.</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>80,77</b>	<b>81,02</b>	<b>100,3</b>	IPM Kabupaten Sidoarjo sudah tercapai dengan katagori sangat baik dan ini berlangsung dari tahun k eke tahun	
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,22	14,95	98,23		
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,79	10,77	99,81		
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,77	74,36	99,45		
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,53	94,68	100,16		
	<b>MISI 5</b>	<b>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>						
	<b>TUJUAN 6</b>	:	<b>Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>1.</b>	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	<b>82,77</b>	<b>84,23</b>	<b>102</b>	- Berdasarkan capaian indeks kesalehan social yang merupakan ukuran keberhasilan atas menguatnya karakter masyarakat bahwa sidoarjo masuk katagori sangat berhasil	
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	78,68	82,14	104,40		
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	60,55	90,46	149,40		
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	77,92	80,77	103,66		



### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumberdaya yang efisien merupakan salah satu tujuan dari diterapkannya SAKIP, sehingga pemerintah daerah terus melakukan upaya efisiensi sumberdaya. Salah satu sumberdaya yang perlu diperhatikan dalam upaya efisiensinya adalah penggunaan anggaran. Referensi yang dapat digunakan salah satunya dalam menghitung efisiensi keuangan yaitu metode pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja di tingkat kementerian lembaga yang

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

diatur dalam PMK nomor 22/PMK 02/ 2021. Metode perhitungan efisiensi yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran berbasis capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan. Secara umum digambarkan pada rumus berikut:

Oleh karena itu penggunaan anggaran berbasis capain kinerja harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu dengan mengkalikan capain atau rata-rata capaian kinerja dengan pagu anggaran. Selain itu juga terdapat catatan bahwa Nilai tertinggi efisiensi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Adapaun perhitungan efisien berdasarkan kinerja sasaran setiap tujuan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disajikan sebagai berikut:



**Tabel 3.29: Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Perkalian target Anggaran dengan Rata-rata capaian Kinerja	Pengurangan Hasil perkalian target dengan Rata-rata capaian Kinerja dengan realisasi	EFISIENSI	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)				
	<b>MISI 1</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>										
	<b>TUJUAN 1</b>	:	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha</b>									
	<b>Indikator Tujuan</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>	<b>98,26</b>						
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	A	BB	98,58	936.681.083.985	902.858.778.577	96,39	Rp902.858.778.577	Rp902.866.896.853	<b>0,00089%</b>
		2.	Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100						
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76	3,42	90,96						
		4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100						
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan)	3,35	2,29	68,35						



			Berbasis Elektronik)									
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00						
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00						
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-1</b>				<b>94,29</b>			<b>96,39</b>			
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	100	324.957.058.569	293.254.798.850	90,24	Rp324.957.058.569	Rp31.702.259.719	<b>10.8%</b>
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-2</b>				<b>100</b>			<b>90,24</b>			
	<b>MISI 2</b>	<b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>										
	<b>TUJUAN 2</b>	:	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan</b>									
	<b>Indikator Tujuan :</b>	1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	1,36	7,53	553,68						
		2.	<b>Indeks Gini</b>	0,359	0,373	96,25						
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,17	16,41	101,48	182.444.027.855	176.022.142.082	96,48	Rp368.536.936.267	Rp192.514.794.185	Nilai real 109%, namun maksimum efisiensi <b>20%</b>
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	52,29	50,02	95,66						



		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,77	2,27	81,95						
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,92	5,26	571,74						
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-3</b>				<b>212,71</b>			<b>96,48</b>			
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,93	1,93	100,00	55.860.111.045	50.037.454.255	89,58	Rp71.333.361.804	Rp21.295.907.549	Nilai real 42%, namun maksimum efisiensi adalah <b>20%</b>
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	23,20	23,33	100,56						
		3.	Persentase Desa Mandiri	12,42	22,67	182,53						
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-4</b>				<b>127,70</b>						
	<b>TUJUAN 3</b>	:	<b>Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan</b>									
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)</b>	<b>10,39</b>	<b>8,8</b>	<b>115,30</b>						
		2.	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>6</b>	<b>5,36</b>	<b>110,67</b>						
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,61	91,2	101,77	21.552.229.803	17.439.163.648	80,92	Rp21.918.617.710	Rp4.479.454.062	Nilai real 25% namun maksimum efisiensi



												adalah <b>20%</b>
			<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-5</b>			<b>101,77</b>				<b>80,92</b>		
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,00	94,64	100,68	34.710.768.477	31.704.180.207	91,34	Rp34.919.033.088	Rp3.214.852.881	Nilai efesiensi <b>10,1%</b>
			<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-6</b>			<b>100,68</b>				<b>91,34</b>		
	<b>MISI 3</b>	<b>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>										
	<b>TUJUAN 4</b>	:	<b>Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>									
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>0,762</b>	<b>0,792</b>	<b>103,94</b>						
		2.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>59,80</b>	<b>57,54</b>	<b>96,22</b>						
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,754	0,783	103,85	2.467.482.210.743	2.191.008.333.431	88,80	Rp2.566.181.499.173	Rp375.173.165.742	Nilai Efesiensi 17,1%
	2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	84,56	84,32	99,72							
	3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13	77,13	108,44							
			<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-7</b>			<b>104,00</b>				<b>88,80</b>		



8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	51,53	47,75	92,66	132.883.339.611	122.459.590.021	92,16	Rp126.199.307.629	Rp3.739.717.608	Nilai Efisiensi 3%
		2.	Indeks Kualitas Udara	85,15	84,96	99,78						
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,11	23,63	87,16						
		4.	Indeks Resiko Bencana	98,44	98,73	100,29						
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-8</b>			<b>94,97</b>							
<b>MISI 4</b>		<b>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>										
<b>TUJUAN 5</b>		:	<b>Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya</b>									
<b>Indikator Tujuan</b>		1.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>80,77</b>	<b>81,02</b>	<b>100,3</b>						
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,22	14,95	98,23	724.181.027.581	694.681.113.322	95,93	Rp717.084.053.511	Rp22.402.940.189	Nilai Efisiensi 3,2%
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,79	10,77	99,81						
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-9</b>			<b>99,02</b>							
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,77	74,36	99,45	275.704.615.902	265.585.832.668	96,33	Rp274.188.240.515	Rp8.602.407.847	Nilai Efisiensi 3,2%
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-10</b>			<b>99,45</b>							



11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,53	94,68	100,16	32.551.743.329	25.321.218.927	77,79	Rp33.072.571.222	Rp7.751.352.295	Nilai real 30,6% namun maksimum efisiensi <b>20%</b>
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-11</b>			<b>100,16</b>					<b>77,79</b>	<b>22,21</b>	
	<b>MISI 5</b>	<b>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>										
	<b>TUJUAN 6</b>	:	<b>Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</b>									
	<b>Indikator Tujuan</b>	1.	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	<b>82,77</b>	<b>84,23</b>	<b>102</b>						
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	78,68	82,14	104,40	72.808.213.612	71.953.417.404	98,83	Rp92.393.623.074	Rp20.440.205.670	Nilai Real 28,4%, namun nilai maksimum sebesar <b>20%</b>
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	60,55	90,46	149,40						
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-12</b>			<b>126,90</b>							
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	77,92	80,77	103,66	29.718.416.818	28.581.936.915	96,18	Rp30.788.279.823	Rp2.206.342.908	Nilai Efisiensi <b>7,7%</b>
		<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-13</b>			<b>103,66</b>					<b>96,18</b>		



### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai visi misi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022, telah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.291.534.847.330,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.29: Realisasi Anggaran Tahun 2022**

NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.404.870.472.542,00</b>	<b>1.348.248.869.194,00</b>	<b>95,97</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	724.165.758.281,00	694.677.469.822,00	95,93
	Program Pengelolaan Pendidikan	679.815.343.071,00	652.702.334.722,00	96,01
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	15.269.300,00	3.643.500,00	23,86
	Program Pengembangan Kebudayaan	204.758.490,00	204.020.650,00	99,64
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	669.343.400,00	661.400.500,00	98,81
<b>2</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>570.820.796.250,00</b>	<b>530.120.816.276,26</b>	<b>92,87</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	250.446.080.682,00	244.323.590.277,26	97,56
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	295.116.180.348,00	264.534.983.608,00	89,64
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	19.452.616.500,00	16.589.120.409,00	85,28
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	467.596.495,00	421.093.242,00	90,05
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.338.322.225,00	4.252.028.740,00	79,65
<b>3</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	<b>644.800.797.308,00</b>	<b>525.699.873.677,00</b>	<b>81,53</b>
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	644.800.797.308,00	525.699.873.677,00	81,53



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
<b>4</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>551.813.751.272,00</b>	<b>472.791.147.736,00</b>	<b>85,68</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.671.869.841,00	22.288.450.788,00	90,34
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	20.240.569.610,00	17.258.500.622,00	85,27
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	60.704.873.897,00	50.911.873.210,00	83,87
	Program Penyelenggaraan Jalan	446.196.437.924,00	382.332.323.116,00	85,69
<b>5</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, Cipta Karya dan Tata Ruang</b>	<b>150.107.826.717,00</b>	<b>137.072.727.754,80</b>	<b>91,32</b>
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	89.191.646.865,00	82.704.621.812,80	92,73
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.446.601.960,00	6.323.681.604,00	98,09
	Program Pengembangan Permukiman	27.592.465.749,00	24.294.094.257,00	88,05
	Program Penataan Bangunan Gedung	4.941.366.088,00	4.444.853.428,00	89,95
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.333.776.830,00	1.267.142.800,00	95,00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	505.375.000,00	351.173.000,00	69,49
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.618.485.734,00	1.522.705.835,00	94,08
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.339.919.811,00	11.459.693.608,00	85,91
	Program Pengembangan Perumahan	3.460.292.080,00	3.107.713.474,00	89,81
	Program Kawasan Permukiman	1.438.750.000,00	1.434.316.000,00	99,69
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	99.465.000,00	83.929.000,00	84,38
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	139.681.600,00	78.802.936,00	56,42



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
<b>6</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>27.715.469.323,00</b>	<b>39.164.831.224,00</b>	<b>141,31</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.909.740.662,00	11.938.310.794,00	70,60
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10.805.728.661,00	27.226.520.430,00	251,96
<b>7</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>25.090.058.379,00</b>	<b>24.133.993.335,00</b>	96,19
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.538.274.604,00	11.938.310.794,00	95,21
	Program Penanggulangan Bencana	2.780.081.178,00	2.705.985.354,00	97,33
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	9.771.702.597,00	9.489.697.187,00	97,11
<b>8</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>34.710.768.477,00</b>	<b>31.704.180.207,00</b>	91,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.642.410.705,00	6.979.940.339,00	91,33
	Program Pemberdayaan Sosial	2.534.086.740,00	2.496.348.625,00	98,51
	Program Rehabilitasi Sosial	7.614.514.362,00	7.520.040.356,00	98,76
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	15.946.621.514,00	13.754.816.045,00	86,26
	Program Penanganan Bencana	750.475.590,00	731.966.750,00	97,53
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	222.659.566,00	221.068.092,00	99,29
<b>9</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>21.552.229.803,00</b>	<b>17.439.163.648,00</b>	80,92
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.469.084.311,00	8.966.196.658,00	94,69
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	10.700.000,00	9.215.000,00	86,12
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.467.466.767,00	5.983.106.540,00	63,20



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.477.022.353,00	1.389.772.400,00	94,09
	Program Hubungan Industrial	1.098.204.972,00	1.076.273.050,00	98,00
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	29.751.400,00	14.600.000,00	49,07
<b>10</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>32.551.743.329,00</b>	<b>25.321.218.927,00</b>	<b>77,79</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.696.950.774,00	7.187.807.344,00	93,39
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	775.797.980,00	725.522.170,00	93,52
	Program Perlindungan Perempuan	1.223.055.058,00	1.058.154.748,00	86,52
	Program Pemenuhan Hak Anak	483.777.500,00	478.274.500,00	98,86
	Program Perlindungan Khusus Anak	242.456.000,00	202.565.935,00	83,55
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.742.160.238,00	9.995.249.267,00	85,12
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	9.509.670.000,00	4.813.733.192,00	50,62
	Program Pengendalian Kependudukan	877.875.779,00	859.911.771,00	97,95
<b>11</b>	<b>DINAS PANGAN DAN PERTANIAN</b>	<b>41.566.231.782,00</b>	<b>39.522.127.713,00</b>	<b>95,08</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.835.994.391,00	28.487.544.388,00	95,48
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.199.980.000,00	1.196.196.750,00	99,68
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	889.406.057,00	883.344.139,00	99,32
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	106.400.000,00	105.637.120,00	99,28
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.669.922.730,00	3.474.893.826,00	94,69



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.080.346.296,00	2.743.019.226,00	89,05
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.489.113.847,00	1.480.069.696,00	99,39
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	381.154.245,00	351.327.148,00	92,17
	Program Penyuluhan Pertanian	913.914.216,00	800.095.420,00	87,55
<b>12</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>	<b>107.793.281.232,00</b>	<b>98.325.596.686,00</b>	<b>91,22</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.196.799.724,00	34.001.717.261,00	96,60
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.185.133.091,00	3.616.775.628,00	86,42
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	28.596.753.605,00	26.972.417.761,00	94,32
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	162.944.366,00	80.623.260,00	49,48
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	229.175.200,00	218.551.136,00	95,36
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	404.791.000,00	398.997.954,00	98,57
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	307.864.295,00	294.130.468,00	95,54
	Program Pengelolaan Persampahan	38.709.819.951,00	32.742.383.218,00	84,58
<b>13</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>15.405.287.332,00</b>	<b>14.836.243.975,00</b>	<b>96,31</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.987.268.401,00	11.538.986.557,00	96,26
	Program Pendaftaran Penduduk	1.005.150.158,00	953.675.118,00	94,88



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Pencatatan Sipil	854.411.400,00	850.368.728,00	99,53
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.558.457.373,00	1.493.213.572,00	95,81
<b>14</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>21.023.889.503,00</b>	<b>10.020.979.024,00</b>	47,66
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.411.578.661,00	9.777.611.323,00	71,92
	Program Penataan Desa	33.775.700,00	20.400.700,00	60,40
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	85.113.880,00	84.951.150,00	99,81
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.582.777.698,00	2.427.788.175,00	94,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.910.643.564,00	7.487.838.999,00	94,66
<b>15</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>145.828.312.027,00</b>	<b>138.207.265.933,00</b>	94,77
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.289.705.560	16.829.453.608,00	97,34
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	124.920.571.107	117.932.626.341,00	94,41
	Program Pengelolaan Pelayaran	24.059.780	22.450.000,00	93,31
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.593.975.580	3.422.735.984,00	95,24
<b>16</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>39.027.088.133,00</b>	<b>37.112.006.081,00</b>	95,09
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.375.403.642,00	10.358.272.930,00	91,06
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.363.618.912,00	5.750.873.340,00	90,37
	Program Aplikasi Informatika	19.282.403.420,00	19.031.195.761,00	98,70
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	663.302.159,00	661.456.600,00	99,72



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.342.360.000,00	1.310.207.450,00	97,60
<b>17</b>	<b>DINAS KOPRASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>34.836.221.542,00</b>	<b>30.238.863.908,00</b>	86,80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.446.622.467,00	8.087.220.963,00	95,75
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	226.553.054,00	218.603.180,00	96,49
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	277.372.876,00	271.612.236,00	97,92
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	684.232.475,00	668.964.730,00	97,77
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	54.402.500,00	49.247.500,00	90,52
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	396.927.495,00	379.955.380,00	95,72
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	21.095.507.125,00	17.356.775.155,00	82,28
	Program Pengembangan UMKM	3.654.603.550,00	3.206.484.764,00	87,74
<b>18</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>13.690.072.700,00</b>	<b>13.009.864.862,00</b>	<b>95,03</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.997.646.701,00	11.413.526.374,00	95,13
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.011.803.500,00	960.860.000,00	94,97
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	223.248.800,00	215.573.300,00	96,56
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	185.748.699,00	179.496.000,00	96,63
	Program Promosi Penanaman Modal	271.625.000,00	240.409.188,00	88,51
<b>19</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>	<b>50.002.303.452,00</b>	<b>48.093.071.485,00</b>	96,18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.974.728.495,00	10.390.415.145,00	94,68



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.291.904.717,00	7.178.592.846,00	98,45
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	28.557.175.184,00	27.427.166.643,00	96,04
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.297.342.430,00	1.265.701.830,00	97,56
	Program Pemasaran Pariwisata	120.750.000,00	118.182.700,00	97,87
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	560.402.626,00	513.012.321,00	91,54
<b>20</b>	<b>DINAS PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>11.064.385.890,00</b>	<b>10.776.428.168,00</b>	97,40
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.222.860.510,00	7.950.471.879,00	96,69
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.062.460.217,00	2.049.543.156,00	99,37
	Program Pengelolaan Arsip	779.065.163,00	776.413.133,00	99,66
<b>21</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>30.549.348.047,00</b>	<b>30.058.602.818,00</b>	98,39
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.092.787.132,00	7.877.841.873,00	97,34
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	464.792.334,00	462.381.300,00	99,48
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	19.965.828.411,00	19.734.409.441,00	98,84
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	158.595.371,00	158.577.268,00	99,99
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.867.344.799,00	1.825.392.936,00	97,75
<b>22</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN</b>	<b>46.636.071.874,00</b>	<b>45.338.475.204,00</b>	<b>97,22</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.433.830.501,00	25.702.596.227,00	97,23
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	12.500.489.263,00	12.394.359.216,00	99,15



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	812.300.000,00	806.790.500,00	99,32
	Program Pengembangan Ekspor	2.578.874.230,00	2.498.886.566,00	96,90
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	603.521.575,00	569.975.540,00	94,44
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.570.656.305,00	3.233.717.155,00	90,56
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	86.400.000,00	82.200.000,00	95,14
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90
<b>23</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>102.868.535.744,00</b>	<b>96.650.837.142,00</b>	93,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69.523.040.122,00	66.229.056.539,00	95,26
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.732.132.008,00	17.236.160.593,00	87,35
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	13.613.363.614,00	13.185.620.010,00	96,86
<b>24</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>89.587.891.373,00</b>	<b>72.767.516.619,00</b>	81,22
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.350.900.210,00	50.990.715.180,00	93,82
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	35.236.991.163,00	21.776.801.439,00	61,80
<b>25</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>17.083.587.915,00</b>	<b>16.674.285.766,00</b>	97,60
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.707.987.134,00	11.384.998.331,00	97,24
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.438.665.538,00	1.396.906.870,00	97,10
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.954.653.418,00	2.939.934.053,00	99,50
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	982.281.825,00	952.446.512,00	96,96
<b>26</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>739.605.652.632,00</b>	<b>717.542.488.056,00</b>	<b>97,02</b>



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.547.884.868,00	14.082.953.753,00	96,80
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	716.683.909.446,00	697.376.712.328,00	97,31
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.373.858.318,00	6.082.821.975,00	72,64
<b>27</b>	<b>BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH</b>	<b>47.987.203.378,00</b>	<b>46.891.054.512,00</b>	<b>97,72</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.332.794.598,00	39.720.872.668,00	98,48
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.654.408.780,00	7.170.181.844,00	93,67
<b>28</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>19.598.619.663,00</b>	<b>17.299.352.999,00</b>	<b>88,27</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.247.953.561,00	11.667.043.262,00	95,26
	Program Kepegawaian Daerah	4.105.954.030,00	2.492.807.492,00	60,71
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.244.712.072,00	3.139.502.245,00	96,76
<b>29</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>18.497.599.898,00</b>	<b>17.579.808.533,00</b>	<b>95,04</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.033.314.398,00	16.226.260.033,00	95,26
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.352.985.500,00	1.244.348.500,00	91,97
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	111.300.000,00	109.200.000,00	98,11
<b>30</b>	<b>KECAMATAN SIDOARJO</b>	<b>33.563.604.443,00</b>	<b>31.664.288.163,00</b>	<b>94,34</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.549.200.634,00	25.300.238.941,00	95,30
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.127.815.000,00	725.022.500,00	64,29
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.724.954.794,00	5.483.284.747,00	95,78



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	32.625.000,00	31.725.000,00	97,24
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.509.015,00	88.366.975,00	98,72
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.500.000,00	35.650.000,00	90,25
<b>31</b>	<b>KECAMATAN CANDI</b>	<b>6.146.375.527,00</b>	<b>5.446.805.255,00</b>	<b>88,62</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.170.790.247,00	4.777.406.505,00	92,39
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	600.228.580,00	428.661.250,00	71,42
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.581.500,00	13.687.500,00	87,84
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	187.905.000,00	122.537.500,00	65,21
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.052.000,00	32.700.000,00	98,94
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	138.818.200,00	71.812.500,00	51,73
<b>32</b>	<b>KECAMATAN BUDURAN</b>	<b>5.452.009.941,00</b>	<b>4.903.509.247,00</b>	<b>89,94</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.114.689.632,00	4.572.461.999,00	89,40
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	232.432.929,00	228.561.498,00	98,33
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	37.571.375,00	35.895.500,00	95,54
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.419.660,00	29.269.500,00	99,49
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.896.345,00	37.320.750,00	98,48
<b>33</b>	<b>KECAMATAN WONOAYU</b>	<b>5.905.211.424,00</b>	<b>5.392.542.187,00</b>	<b>91,32</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.026.430.454,00	4.810.102.437,00	95,70



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	499.418.470,00	346.377.250,00	69,36
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	182.510.000,00	119.010.000,00	65,21
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.150.000,00	42.150.000,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	154.702.500,00	74.902.500,00	48,42
<b>34</b>	<b>KECAMATAN KRIAN</b>	<b>11.390.924.968,00</b>	<b>10.609.329.869,00</b>	<b>93,14</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.768.915.400,00	9.325.504.942,00	95,46
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	516.680.587,00	350.388.466,00	67,82
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	857.323.658,00	849.639.971,00	99,10
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	196.557.990,00	50.420.490,00	25,65
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.083.333,00	6.074.500,00	99,85
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.364.000,00	27.301.500,00	60,18
<b>35</b>	<b>KECAMATAN PORONG</b>	<b>10.672.031.142,00</b>	<b>9.616.919.700,00</b>	<b>90,11</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.377.957.334,00	8.633.966.200,00	92,07
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	598.669.864,00	370.190.200,00	61,84
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	552.303.000,00	523.730.900,00	94,83
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	105.950.000,00	52.187.500,00	49,26
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.495.300,00	30.495.000,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.655.644,00	6.349.900,00	95,41
<b>36</b>	<b>KECAMATAN KREMBUNG</b>	<b>6.176.147.080,00</b>	<b>5.735.200.656,00</b>	<b>92,86</b>



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.001.010.293,00	4.729.217.856,00	94,57
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.069.080.325,00	906.402.300,00	84,78
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	80.648.962,00	75.820.000,00	94,01
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.385.000,00	14.338.000,00	99,67
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.022.500,00	9.422.500,00	85,48
<b>37</b>	<b>KECAMATAN JABON</b>	<b>5.180.074.970,00</b>	<b>4.353.551.187,00</b>	84,04
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.317.522.546,00	3.919.897.428,00	90,79
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	767.392.100,00	367.224.759,00	47,85
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	36.190.000,00	28.225.000,00	77,99
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.394.224,00	30.690.000,00	63,42
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.576.100,00	7.514.000,00	71,05
<b>38</b>	<b>KECAMATAN BALONGBENDO</b>	<b>6.283.789.304,00</b>	<b>5.575.398.639,00</b>	88,73
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.053.730.690,00	4.791.921.273,00	94,82
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.176.052.450,00	733.905.766,00	62,40
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	34.332.000,00	33.426.600,00	97,36
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.499.164,00	11.980.000,00	77,29
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.175.000,00	4.165.000,00	99,76
<b>39</b>	<b>KECAMATAN TARIK</b>	<b>6.346.768.657,00</b>	<b>5.779.295.825,00</b>	91,06
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.266.333.016,00	5.025.623.421,00	95,43



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	949.468.180,00	688.798.404,00	72,55
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	77.519.570,00	31.440.000,00	40,56
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.873.791,00	6.720.000,00	45,18
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.574.100,00	26.714.000,00	69,25
<b>40</b>	<b>KECAMATAN TAMAN</b>	<b>20.357.292.633,00</b>	<b>19.199.695.146,00</b>	94,31
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.795.429.320,00	14.136.084.626,00	95,54
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	941.993.750,00	755.281.000,00	80,18
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.335.582.909,00	4.091.554.520,00	94,37
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	166.666.484,00	106.782.500,00	64,07
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	52.398.950,00	51.340.000,00	97,98
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65.221.220,00	58.652.500,00	89,93
<b>41</b>	<b>KECAMATAN WARU</b>	<b>7.029.345.566,00</b>	<b>6.067.159.177,00</b>	86,31
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.109.927.665,00	5.534.246.944,00	90,58
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	612.168.016,00	310.317.966,00	50,69
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	145.290.754,00	100.985.155,00	69,51
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.377.540,00	70.377.540,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.581.591,00	51.231.572,00	55,94
<b>42</b>	<b>KECAMATAN GEDANGAN</b>	<b>6.490.148.295,00</b>	<b>6.064.760.037,00</b>	93,45
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.216.537.969,00	5.027.812.397,00	96,38



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	845.504.326,00	615.940.300,00	72,85
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	327.379.000,00	321.690.340,00	98,26
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	59.077.000,00	59.057.000,00	99,97
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.650.000,00	40.260.000,00	96,66
<b>43</b>	<b>KECAMATAN SEDATI</b>	<b>6.500.459.368,00</b>	<b>5.727.462.162,00</b>	<b>88,11</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.592.597.953,00	5.170.656.022,00	92,46
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	721.431.980,00	407.433.440,00	56,48
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	67.324.500,00	51.775.200,00	76,90
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87.561.155,00	71.325.000,00	81,46
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.543.780,00	26.272.500,00	83,29
<b>44</b>	<b>KECAMATAN TANGGULANGIN</b>	<b>6.352.174.792,00</b>	<b>5.682.592.740,00</b>	<b>89,46</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.341.302.184,00	4.897.761.032,00	91,70
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	733.017.150,00	542.673.750,00	74,03
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	48.847.500,00	31.247.500,00	63,97
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	220.345.458,00	205.335.458,00	93,19
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.662.500,00	5.575.000,00	64,36
<b>45</b>	<b>KECAMATAN TULANGAN</b>	<b>6.290.506.732,00</b>	<b>5.846.296.232,00</b>	<b>92,94</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.497.830.404,00	5.216.973.982,00	94,89
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	670.587.500,00	507.781.750,00	75,72



NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50.827.500,00	50.827.500,00	100,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	47.811.328,00	47.263.000,00	98,85
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.450.000,00	23.450.000,00	100,00
<b>46</b>	<b>KECAMATAN PRAMBON</b>	<b>6.267.959.326,00</b>	<b>5.545.983.663,00</b>	<b>88,48</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.017.941.826,00	4.588.310.163,00	91,44
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.110.392.500,00	854.632.800,00	76,97
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	98.400.000,00	66.508.500,00	67,59
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.650.000,00	22.169.000,00	93,74
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.575.000,00	14.363.200,00	81,73
<b>47</b>	<b>KECAMATAN SUKODONO</b>	<b>6.510.413.923,00</b>	<b>6.128.182.176,00</b>	<b>94,13</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.276.601.173,00	5.142.267.676,00	97,45
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.036.283.173,00	874.079.800,00	84,35
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	126.401.860,00	44.912.200,00	35,53
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.547.717,00	54.572.500,00	98,24
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.580.000,00	12.350.000,00	79,27
<b>48</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>71.934.111.722,00</b>	<b>71.087.996.254,00</b>	<b>98,82</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.158.202.037,00	6.658.834.043,00	93,02
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.274.237.776,00	1.187.130.768,00	93,16
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	10.114.877.326,00	10.114.684.800,00	100,00



<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>CAPAIAN %</b>
	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49.334.938.043,00	49.334.938.043,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.316.465.500,00	2.267.973.000,00	97,91
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.735.391.040,00	1.524.435.600,00	87,84
		<b>5.291.534.847.330,00</b>	<b>4.873.068.659.778,06</b>	<b>92,09</b>

Realisasi anggaran tahun 2022 pada 120 program/kegiatan tersebut diatas rata-rata realisasi capaian nya adalah 92,09% atau katagori Berhasil, artinya hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pencapaian target dari tujuan dan sasaran, dari 6 tujuan dengan 9 Indikator Tujuan, 6 Sangat Berhasil dan 3 indikator dalam katagori Berhasil, Namun demikian jika dirata-rata capaian kinerja tujuan adalah 152,93% atau masih dalam katagori Sangat Berhasil. Sedangkan dari 13 sasaran dengan 31 indikator sasaran, ada 20 indikator sasaran Sangat Berhasil, 8 katagori Berhasil dan 3 indikator dalam katagori Cukup, kalau dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 117,53% atau masih dalam katagori Sangat Berhasil. Dengan demikian jika dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran dengan 9 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 125,49%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sudah Sangat Berhasil. Keberhasilan yang sudah dicapai Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022, diantaranya mendapatkan predikat WBK 5 (lima) Perangkat Daerah yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pelayanan Pajak Daerah dan Kecamatan Taman. Selanjutnya 2 (dua) Perangkat Daerah mendapatkan predikat WBBM yakni Kecamatan Sukodono dan RSUD Sidoarjo. Dengan demikian Kabupaten Sidoarjo atas prestasinya membangun zona integritas pada Perangkat Daerah dengan predikat WBK/WBBM sampai tahun ini telah mendapatkan total 7 (tujuh) Perangkat Daerah. Kemudian pada indeks pelayanan publik 2 (dua) Perangkat Daerah sudah berpredikat Pelayanan Prima yaitu DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil. Selain itu hasil penilaian ombousmen tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 84,46 dengan katagori “B” pridikat Hijau nomor Dua Se-Jawa Timur dan akan ditingkatkan untuk optimalisasi pelyanan public di Kabupaten Sidoarjo



## 4.2 Tindak Lanjut

Adapun dari indikator sasaran yang sudah tercapai dengan kategori Sangat Berhasil dan Berhasil akan di pertahankan dan ditingkatkan kedepannya, sedangkan pada pencapaian target kinerja dengan kategori cukup akan dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk peningkatan di tahun akan datang. Untuk indicator sasaran yang masuk katagori Cukup, antara lain :

### 1. Nilai Indeks SPBE

Berkenaan dengan capaian kinerja yang masih dalam katagori Cukup, yang terdapat pada indikator Nilai Indeks SPBE dengan realisasi 2,29 dari target 3,35 sehingga tercapai sebesar 68,35%. Kalau dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar 2,37 maka terjadi penurunan sebesar 0,08. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan dan regulasi perhitungan nilai indeks SPBE dimana sebelumnya terdapat 3 domain menjadi 4 domain dan penambahan jumlah indikator dari 35 menjadi 47 indikator. Pada tahun berikutnya dilakukan upaya penyesuaian pola perhitungan yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan Perangkat Daerah (PD) yang menunjang pencapaian indeks SPBE tahun 2023

### 2. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dalam arti luas

Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dalam arti luas tahun 2022 dengan capaian 2,27 dari target 2,77 tercapai 81,95% katagori Cukup. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya minus 0,08% mengalami peningkatan sebesar 2,35. Namun demikian nilainya sangat kecil. Hal tersebut disebabkan produksi maupun produktivitas pertanian cenderung kecil dan menurun karena luas lahan di sektor pertanian serta menurunnya investasi dibidang pertanian karena masyarakat kurang tertarik bekerja di sektor pertanian. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mempertahankan luas



lahan pertanian produktif yang masih ada, serta melalui dinas terkait terus memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat agar tetap bersemangat mengelola lahan pertaniannya sehingga lahannya tidak dijual dan beralih fungsi.

### 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mencapai target tahun 2022 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dikarenakan (1) Hasil verifikasi tutupan lahan oleh KLHK bahwa terdapat pengurangan luas hutan mangrove; (2) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat dalam menyediakan RTH. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya luas tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas lahan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeliharaan RTH maupun tutupan hutan mangrove yang ada;
- b. Melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH secara terpadu melalui deliniasi RTH pada peta google / citra satelit;
- c. Mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH atau vegetasi pepohonan;
- d. Bekerjasama dengan instansi lain bersama-sama melakukan penghijauan, termasuk penghijauan mangrove;
- e. Mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022



#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD MUHDLOR, SIP.**

Jabatan : **BUPATI SIDOARJO**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sidoarjo, 25 Nopember 2022

**BUPATI SIDOARJO**

Ditandatangani secara elektronik oleh



AHMAD MUHDLOR, S.I.P.

**AHMAD MUHDLOR, S.I.P.**



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	<b>Misi 1 :</b> <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b>		
	<b>Tujuan 1 :</b> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Opini Atas Laporan BPK	WTP
		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76
		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,35
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A - Sangat Baik
	<b>Misi 2 :</b> <b>Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan</b>		



	<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan	Pertumbuhan Ekonomi	1,36
	<b>Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>0,359</b>
3	<b>Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan</b>	<b>Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan</b>	<b>16,17</b>
		<b>Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri</b>	<b>52,29</b>
		<b>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.</b>	<b>2,77</b>
		<b>Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi</b>	<b>0,92</b>
4	<b>Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa</b>	<b>Persentase Usaha Mikro Mandiri</b>	<b>1,93</b>
		<b>Persentase Koperasi Berkualitas</b>	<b>23,20</b>
		<b>Persentase Desa Mandiri</b>	<b>12,42</b>
	<b>Tujuan 3 :</b> Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	<b>Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)</b>	<b>10,39%</b>
		<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>6,00%</b>
5	<b>Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor</b>	<b>89,61</b>



6	<b>Menurunnya Penduduk Miskin</b>	<b>Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)</b>	<b>94,00</b>
	<b>Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan</b>		
	<b>Tujuan 4: Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Indeks Infrastruktur</b>	<b>0,762</b>
		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>59,80</b>
7	<b>Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata</b>	<b>Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum</b>	<b>0,754</b>
		<b>Indeks Infrastruktur Pendidikan</b>	<b>84,56</b>
		<b>Indeks Infrastruktur Kesehatan</b>	<b>71,13</b>
8	<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>	<b>51,53</b>
		<b>Indeks Kualitas Udara</b>	<b>85,15</b>
		<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>27,11</b>
		<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>98,44</b>
	<b>Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui</b>		



	<b>Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya</b>		
	<b>Tujuan 5 : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>80,77</b>
9	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat</b>	<b>Harapan Lama Sekolah (HLS)</b>	<b>15,22</b>
		<b>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</b>	<b>10,79</b>
10	<b>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Usia Harapan Hidup (UHH)</b>	<b>74,77</b>
11	<b>Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	<b>94,53</b>
	<b>Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</b>		
	<b>Tujuan 6 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</b>	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	<b>82,77</b>
12	<b>Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat</b>	<b>Indeks Toleransi</b>	<b>78,68</b>
		<b>Indeks Pelestarian Budaya</b>	<b>60,55</b>
13	<b>Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram</b>	<b>Indeks Rasa Aman</b>	<b>77,92</b>



## PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

1. 12 Januari 2022 : Menerima piagam Penghargaan Kategori Terbaik ke-4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), diwakili Sekda Kab Sidoarjo dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Halaman Disnaker Provinsi Jawa Timur.



2. 24 Maret 2022 : Menerima Penghargaan dari PWI Jawa Timur sebagai "Kepala Daerah Tokoh Penggerak Olahraga" pada acara Anugerah Olahraga 2022 Seksi Wartawan Olahraga, diwakili Plt. Kadiskominfo Sidoarjo, di Wahana Ekspresi Pusponegoro, Gresik.





3. 31 Maret 2022 : Menerima Penghargaan Kategori Tokoh Kepala Daerah Pendorong Transformasi Digital dalam UMKM dan Pelayanan Publik Berita Jatim Award dalam rangka HUT Berita Jatim ke- 16 tahun, diwakili Plt. Kadiskominfo Sidoarjo, di Hall Hotel Mercure Surabaya.



4. 27 Juli 2022 : Menerima Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Daerah Kabupaten/Kota Pembina Koperasi Terbaik dalam Puncak Hari Koperasi ke-78 tahun 2022 dan Pembukaan KUKM Expo ke-9 Provinsi Jawa Timur, di Grand City, Surabaya.





5. 02 Agustus 2022 : Menerima Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas kinerja pencapaian Imunisasi Rutin Lengkap (IRL), periode Januari s/d Mei 2022, dalam BIAN (Bulan Imuniasi Anak Nasional), di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, pada Selasa, 2 Agustus 2022.



6. 10 Agustus 2022 : Menerima 3 Penghargaan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) sebagai "Instansi Pengelola Kepegawaian Terbaik" dalam Implementasi Manajemen ASN Terbaik diberikan oleh Wakil Kepala BKN, di Hall Golden Tulip, Batu, Rabu 10 Agustus 2022.





7. 05 September 2022 : Mendapat Penghargaan dari MNC Portal Indonesia sebagai *Best Leadership Based on Potential Area* dalam ajang *Indonesia Visionary Leader 2022 (IVL)*, Senin 05 September 2022, di Jakarta.



8. 01 November 2022 : Mendapat Penghargaan "Penyokong Ekspor Jawa Timur" dari Gubernur Jatim sebagai salah satu Kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekspor Jatim, di Novotel Samator, Surabaya.





9. 14 November 2022 : Mendapat Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke 9 berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Gubernur Jatim, di Hotel Bumi Surabaya.



10. 06 Desember 2022 : Mendapat Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Nasional dari Kemenpan RB, di Jakarta.





11.07 Desember 2022 : Mendapat Penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jatim Tahun 2022 melalui Peduli Dilan (Peduli Disabilitas, Orang Denga Gangguan Jiwa dan Lanjut Usia) oleh Kemenpan RB, di Madiun.



12. 11 Desember 2022 : Mendapat Penghargaan Sistem Merit milik BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sidoarjo dengan Kategori Baik dengan nilai 314.7 dari Kemenpan RB, di Hotel Grand Sahid, Jakarta.



Kepala BKD Kab Sidoarjo, Drs Imam Mukri Affandy MSi, saat menerima penghargaan sistim merit dari Kemenpan RB di hotel Grand Sahid, Jakarta.



13.15 Desember 2022 : Mendapat Penghargaan Peringkat I Pemda Penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terbaik dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Prov. Jatim diberikan oleh Gubernur Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.



14. 23 Desember 2022 : Mendapat Penghargaan *Innovatife Government Awards* (IGA) kategori Kabupaten Sangat Inovatif dalam Acara Penganugerahan *Innovatife Government* (IGA), di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri.

